

# JURNAL

## AKUNTANSI & MANAJEMEN

### JAM

#### **PENGARUH PENERAPAN STRATEGI INOVASI TERHADAP KINERJA OPERASIONAL**

*Nursiah  
Fahmy Radhi*

#### **INDEPENDENSI AUDITOR SETELAH PEMBERLAKUAN SARBANES-OXLEY ACT DI PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA (BEJ)**

*Sri Astuti*

#### **PELAPORAN LABA KOMPREHENSIF DAN IMPLIKASINYA DALAM PRAKTIK**

*Efrain Ferdinan Giri*

#### **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN SUKARELA OLEH PERUSAHAAN MULTINASIONAL DI INDONESIA**

*Endang Kiswara*

#### **PERAN DANA PENGUATAN MODAL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA ANGGOTA KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN LELE DI KECAMATAN MOYUDAN, KABUPATEN SLEMAN**

*Siti Mustholihah*

#### **PENERAPAN TOTAL QUALITY SERVICE SEBAGAI UPAYA MENCAPAI LOYALITAS CUSTOMER**

*Siti Al Fajar*



**Rp7.500,-**

JAM	VOL. 20	NO. 2	Hal 69 - 132	AGUSTUS 2009	ISSN: 0853-1269
-----	---------	-------	--------------	--------------	-----------------

Vol. 20, No. 2, Agustus 2009

ISSN: 0853-1269

**JURNAL**  
AKUNTANSI & MANAJEMEN

Tahun 1990

## **JURNAL AKUNTANSI & MANAJEMEN**

### *EDITOR IN CHIEF*

Prof. Dr. Djoko Susanto, MSA., Akuntan  
*STIE YKPN Yogyakarta*

### *EDITORIAL BOARD MEMBERS*

Dr. Baldric Siregar, MBA., Akuntan  
*STIE YKPN Yogyakarta*

Dr. Harsono, M.Sc.  
*Universitas Gadjah Mada*

Dr. Dody Hapsoro, MSPA., MBA., Akuntan  
*STIE YKPN Yogyakarta*

Dr. Soeratno, M.Ec.  
*Universitas Gadjah Mada*

Dr. Eko Widodo Lo, SE., M.Si., Akuntan  
*STIE YKPN Yogyakarta*

Dr. Wisnu Prajogo, SE., MBA.  
*STIE YKPN Yogyakarta*

### *MANAGING EDITORS*

Dra. Sinta Sudarini, MS., Akuntan  
*STIE YKPN Yogyakarta*

Dra. Enny Pudjiastuti, MBA., Akuntan  
*STIE YKPN Yogyakarta*

### *EDITORIAL SECRETARY*

Drs. Rudy Badrudin, M.Si.  
*STIE YKPN Yogyakarta*

### *PUBLISHER*

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIE YKPN Yogyakarta  
Jalan Seturan Yogyakarta 55281  
Telpon (0274) 486160, 486321 ext. 1100 Fax. (0274) 486155

### *EDITORIAL ADDRESS*

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIE YKPN Yogyakarta  
Jalan Seturan Yogyakarta 55281  
Telpon (0274) 486160, 486321 ext. 1332 Fax. (0274) 486155  
<http://www.stieykpn.ac.id> • *e-mail:* [rudy@stieykpn.ac.id](mailto:rudy@stieykpn.ac.id)  
Bank Mandiri atas nama STIE YKPN Yogyakarta No. Rekening **137 - 0095042814**

Jurnal Akuntansi & Manajemen (JAM) terbit sejak tahun 1990. JAM merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (STIE YKPN) Yogyakarta. Penerbitan JAM dimaksudkan sebagai media penguatan karya ilmiah baik berupa kajian ilmiah maupun hasil penelitian di bidang akuntansi dan manajemen. Setiap naskah yang dikirimkan ke JAM akan ditelaah oleh MITRA BESTARI yang bidangnya sesuai. Daftar nama MITRA BESTARI akan dicantumkan pada nomor paling akhir dari setiap volume. Penulis akan menerima lima eksemplar cetak lepas (*off print*) setelah terbit.

JAM diterbitkan setahun tiga kali, yaitu pada bulan April, Agustus, dan Desember. Harga langganan JAM Rp7.500,- ditambah biaya kirim Rp12.500,- per eksemplar. Berlangganan minimal 1 tahun (volume) atau untuk 3 kali terbitan. Kami memberikan kemudahan bagi para pembaca dalam mengarsip karya ilmiah dalam bentuk *electronic file* artikel-artikel yang dimuat pada JAM dengan cara mengakses artikel-artikel tersebut di *website* STIE YKPN Yogyakarta (<http://www.stieykpn.ac.id>).

## **DAFTAR ISI**

**PENGARUH PENERAPAN STRATEGI INOVASI TERHADAP KINERJA OPERASIONAL**

*Nursiah  
Fahmy Radhi  
69-77*

**INDEPENDENSI AUDITOR SETELAH PEMBERLAKUAN SARBANES-OXLEY ACT  
DI PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA (BEJ)**

*Sri Astuti  
79-87*

**PELAPORAN LABA KOMPREHENSIF DAN IMPLIKASINYA DALAM PRAKTIK**

*Efrain Ferdinan Giri  
89-106*

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN SUKARELA OLEH  
PERUSAHAAN MULTINASIONAL DI INDONESIA**

*Endang Kiswara  
107-117*

**PERAN DANA PENGUATAN MODAL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA ANGGOTA  
KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN LELE DI KECAMATAN MOYUDAN,  
KABUPATEN SLEMAN**

*Siti Mustholihah  
119-132*

**PENERAPAN *TOTAL QUALITY SERVICE* SEBAGAI UPAYA MENCAPAI LOYALITAS *CUSTOMER***

*Siti Al Fajar  
133-139*

## **PENGARUH PENERAPAN STRATEGI INOVASI TERHADAP KINERJA OPERASIONAL**

***Nursiah***

STIE Panca Bhakti Palu  
Jalan Dr. Suharso Nomor 36-A. Palu 94111  
Telepon +62 451 421303, Fax. +62 451 421303

***Fahmy Radhi***

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada  
Jalan Humaniora Nomor 1, Bulaksumur, Yogyakarta 55281  
Telepon +62 274 548510 – 548515, Fax. +62 274 563212  
*E-mail: fahmyradhi@feb.ugm.ac.id*

### **ABSTRACT**

This study examined the effect of innovation strategy on operational performance of manufacturing companies. In this study, the dimensions of innovation strategy were leadership orientation, process innovation, product innovation, and implementation of innovation. While, operational performance measured by using productivity, defect of production volume, claims of warranty cost, quality cost, and on time delivery. The data was collected through questionnaires, which consist of 63 manufacturing companies in Sulawesi, by using purposive sampling method. The hypotheses were tested by multiple regression. The study indicates that there were direct significant effects among the dimensions of innovation strategy, i.e. process innovation, product innovation, and implementation of innovation, on the operational performance. Only leadership orientation did not effect significantly on the operational performance of manufacturing companies.

**Keywords:** innovation strategy, operational performance, leadership orientation, process and product innovation

### **PENDAHULUAN**

Dalam kondisi lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, setiap perusahaan dituntut untuk selalu mengembangkan strategi yang dapat menciptakan keunggulan bersaing. Salah satu strategi untuk menciptakan keunggulan bersaing adalah strategi inovasi. Menurut Cottam (2001), strategi inovasi merupakan salah satu strategi perusahaan untuk dapat bertahan dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Strategi inovasi merupakan strategi yang diarahkan pada proses penemuan, pengembangan, dan implementasi ide baru yang berkaitan dengan pengembangan proses, teknologi, dan produk (Slater and Olson, 2001). Menurut Chase et al. (1998), strategi inovasi dapat meningkatkan posisi perusahaan di pasar dengan menciptakan keunggulan bersaing. Di samping itu, inovasi berkelanjutan dapat memberikan alternatif bagi perusahaan dalam menentukan prioritas strategi bersaing, tidak hanya memprioritaskan pada *cost leadership*, tetapi juga pada *quality leadership*, *delivery*, dan *responsiveness*. Perusahaan yang menerapkan strategi inovasi akan memperoleh keuntungan pada peningkatan kinerja perusahaan (Means dan Faulkner

2000).

Penelitian empiris yang menguji hubungan antara strategi inovasi dan kinerja perusahaan mendapatkan perhatian cukup besar dari para peneliti di bidang manajemen strategik, manajemen operasi dan manajemen teknologi. Namun, hasil penelitian yang menguji hubungan antara strategi inovasi dengan kinerja perusahaan masih memunculkan adanya kontroversi. Beberapa hasil penelitian tersebut masih belum konsisten dan menyisakan pertanyaan apakah pengaruh strategi inovasi tersebut terhadap kinerja perusahaan secara langsung atau secara tidak langsung. Sebagian penelitian membuktikan bahwa strategi inovasi yang dilakukan oleh perusahaan akan berdampak secara langsung pada kinerja perusahaan (Zahra dan Das, 1993; Deshpande *et al*, 1993). Beberapa penelitian lainnya membuktikan bahwa strategi inovasi yang dilakukan perusahaan hanya memberikan pengaruh tidak langsung terhadap kinerja perusahaan (Kim dan Manborgue, 1999; Powel, 2000). Kim dan Manborgue (1999) membuktikan bahwa strategi inovasi akan memberikan pengaruh pada kinerja jika perusahaan mampu menciptakan *value innovation* dalam proses inovasi. Powel (2000) menyatakan bahwa inovasi akan mempengaruhi *positioning advantage*. Dimensi inilah yang kemudian berpengaruh secara langsung terhadap kinerja perusahaan.

Selain itu, beberapa hasil penelitian juga masih menyisakan kontroversi berkaitan dengan dimensi apa yang lebih dominan memberikan pengaruh terbesar terhadap kinerja perusahaan. Fernandez (2001) lebih menekankan inovasi proses sebagai penentu keberhasilan inovasi perusahaan. Selanjutnya Desphande *et al* (1993) menyatakan bahwa perusahaan yang ingin berhasil dalam proses inovasinya harus mengintegrasikan secara bersama-sama pada inovasi produk dan inovasi proses. Sedangkan Zahra dan Das (1993) menyatakan bahwa hubungan antara dimensi inovasi yang ada merupakan hubungan yang terintegrasi dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain baik secara simultan maupun sekuensial dalam mempengaruhi kinerja organisasi. Makadok (1998) menyatakan bahwa kepemimpinan inovasi merupakan dimensi utama bagi perusahaan untuk menuju kinerja yang tinggi. Selain itu, sebagian besar penelitian yang dilakukan menggunakan kinerja keuangan sebagai indikator kinerja perusahaan. Kinerja non-keuangan,

seperti kinerja operasional masih jarang digunakan (Schroeder, 1993).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Zahra dan Das (1993) tentang pengaruh strategi inovasi terhadap kinerja keuangan, dengan melakukan beberapa pengembangan. Penelitian ini menggunakan 4 dimensi strategi inovasi yang meliputi orientasi kepemimpinan, inovasi produk, inovasi proses, dan implementasi inovasi. Sedangkan variabel sumber inovasi dan tingkat investasi tidak dimasukkan dalam dimensi strategi inovasi. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini lebih terfokus. Penelitian ini mengukur kinerja perusahaan dari perspektif operasional, berbeda dengan penelitian Zahra dan Das (1993) yang mengukur kinerja berdasarkan pertumbuhan keuangan perusahaan. Schroeder (1993) mengatakan bahwa pengukuran kinerja perusahaan dapat ditinjau dari kinerja operasionalnya, yang meliputi kualitas, biaya, pengiriman produk, fleksibilitas, dan inovasi. Lebih lanjut Schroeder (1993) mengatakan bahwa pengukuran kinerja yang hanya mempertimbangkan kinerja keuangan perlu diperbaiki dengan mempertimbangkan juga pengukuran kinerja operasionalnya.

Penelitian ini memasukkan implementasi inovasi sebagai salah satu dimensi strategi inovasi. Menurut Read (2000), beberapa dimensi inovasi adalah tipe inovasi, tahap inovasi, dan tingkat analisis. Tipe inovasi produk versus proses, radikal versus *incremental*, dan teknik versus administratif. Tahapan inovasi terdiri dari pengembangan, pengadopsian, dan penerapan inovasi. Klein dan Sorra (1996) menyatakan bahwa kegagalan organisasi untuk mencapai keunggulan inovasi yang diadopsi merefleksikan kegagalan implementasi inovasi, yang berpengaruh terhadap kinerja operasional. Lebih lanjut Klein dan Sorra (1996) menyatakan bahwa implementasi inovasi jika efektif akan dapat meningkatkan kinerja organisasi.

Penelitian ini memasukkan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol guna mengetahui apakah ukuran mempengaruhi kinerja operasional perusahaan. Variabel ukuran diadaptasi dari penelitian Kemp, *et al* (2003) yang menguji hubungan antara inovasi dengan kinerja perusahaan pada perusahaan kecil, menengah, dan besar di Uni Eropa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Rahmani (2003), dalam

penelitian tentang penerapan strategi inovasi pada perusahaan kecil dan menengah menunjukkan bahwa dimensi-dimensi strategi inovasi yang diimplementasikan perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia tidak semuanya mempengaruhi kinerja operasional perusahaan.

Permasalahan penelitian ini adalah apakah penerapan strategi inovasi berpengaruh terhadap kinerja operasional perusahaan. Tujuan penelitian ini untuk 1) Menganalisis pengaruh orientasi kepemimpinan terhadap kinerja operasional perusahaan manufaktur; 2) Menganalisis pengaruh inovasi proses terhadap kinerja operasional perusahaan manufaktur; 3) Menganalisis pengaruh inovasi produk terhadap kinerja operasional perusahaan manufaktur; dan 4) Menganalisis pengaruh implementasi inovasi terhadap kinerja operasional perusahaan manufaktur.

#### MATERI DAN METODE PENELITIAN

Dimensi kepemimpinan menunjukkan apakah suatu perusahaan mengikuti *first-to market* (pertama masuk pasar), *second-to-market* (kedua masuk pasar), atau *late-entrant* (sebagai pengikut) dalam kegiatan inovasi (Porter 1990). Perusahaan yang *first-to market* menawarkan keunikan inovasi-inovasi produk dan proses untuk memperoleh suatu keunggulan kompetitif. Sedangkan perusahaan yang menerapkan strategi *second-to-market* menekankan pada kecepatan meniru proses dan atau produk pesaingnya dengan beberapa modifikasi terhadap proses dan produk pesaing yang sudah lebih dulu masuk di pasar (Maidque dan Patch 1998, dalam Zahra dan Das 1993). Perusahaan yang menerapkan strategi *late entrant* meniru secara konsisten terhadap proses dan produk pesaing dengan menawarkan harga produk yang lebih murah dibanding harga produk pesaingnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Melum (2002) menyimpulkan bahwa orientasi kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan karena orientasi kepemimpinan dapat menentukan posisi perusahaan terhadap pesaingnya di pasar (Melum 2002). Hasil penelitian Melum mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zahra dan Das (1993). Hasil penelitian Zahra dan Das (1993) menyimpulkan bahwa penerapan strategi *first to market* akan berpotensi besar menjadi pemimpin pasar dengan

pangsa pasar terbesar. Sedangkan penerapan strategi *second to market* dan *late to entrant* cenderung memiliki pangsa pasar yang lebih rendah sehingga tingkat kinerjanya juga lebih rendah. Berdasar uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1:** Orientasi kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja operasional perusahaan manufaktur.

Inovasi proses merupakan bentuk inovasi yang menekankan pada metode-metode baru dalam pengoperasian dengan cara membuat teknologi baru atau mengembangkan teknologi yang telah ada (Leonard-Barton 1991). Inovasi proses ini termasuk perekayasaan ulang proses bisnis yang tidak terkait langsung dengan proses produksi (Cumming 1998). Inovasi proses berpengaruh terhadap kinerja karena dengan ditemukannya teknik produksi yang baru akan perusahaan dapat beroperasi secara lebih efisien. Inovasi proses merupakan sarana untuk meningkatkan produktivitas yang berpengaruh terhadap kualitas produk dan pengurangan unit biaya produksi (Baldwin 2000). Sedangkan inovasi produk terkait dengan pengembangan desain produk maupun tambahan fitur akan menghasilkan produk yang unik dan berbeda dengan produk-produk pesaingnya yang telah ada di pasar (John 1999). Hasil penelitian Bustamante (1999) menyimpulkan bahwa inovasi proses dan inovasi produk dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, baik secara *parsial* maupun bersama-sama. Ettlie dan Reza (1992) menyatakan bahwa perusahaan yang menawarkan keunikan produk yang berbeda dengan produk pesaingnya dapat memposisikan perusahaan tersebut secara berbeda dengan perusahaan lain dalam industri sejenis. Berdasar uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2a:** Inovasi proses berpengaruh positif terhadap kinerja operasional perusahaan manufaktur.

**H2b:** Inovasi produk berpengaruh positif terhadap kinerja operasional perusahaan manufaktur.

Kinerja perusahaan tidak hanya diukur dengan kinerja keuangan tetapi juga harus dilihat pada kinerja non keuangan, seperti kualitas, biaya, layanan tepat waktu, dan fleksibilitas (Noori dan Radford 1995). Pengukuran kinerja yang hanya berfokus pada kinerja keuangan dapat mengaburkan indikator yang mengukur peningkatan kinerja sebagai dampak aktivitas-aktivitas inovasi (Kaplan dan Norton 1992).

Dengan implementasi inovasi proses dapat dihasilkan produk yang sama dengan proses yang lebih efisien dan biaya lebih rendah. Inovasi produk memungkinkan untuk mendesain produk yang unik dan kualitas lebih baik. Implementasi inovasi dalam suatu organisasi dapat diartikan sebagai proses memperoleh karyawan yang tepat dan bertanggung jawab dalam menggunakan inovasi (Klein dan Sorra 1996).

Menurut Read (2000), implementasi inovasi adalah suatu proses manajemen yang mendukung dan berusaha menuju perubahan budaya yang harus berasal dari puncak organisasi. Keberhasilan inovasi tergantung pada penggunaan inovasi oleh seluruh anggota organisasi bukan pada individu saja (Tornatsky dan Fleischer 1990 dalam Klein dan Sorra 1996). Selanjutnya Klein dan Sorra (1996) mengatakan bahwa implementasi inovasi jika efektif akan dapat meningkatkan kinerja organisasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3:** Implementasi inovasi berpengaruh positif terhadap kinerja operasional perusahaan manufaktur.

Kinerja perusahaan merupakan tingkat keberhasilan dalam pengelolaan perusahaan (Gibson dan Donnelly, 1995). Dalam menentukan ukuran kinerja dapat digunakan beberapa indikator, baik indikator finansial maupun indikator operasional. Beberapa literatur menyarankan untuk menggunakan indikator finansial yang terdiri dari *profit margin*, *return on asset*, *return on equity*, *return on sales*. Sedangkan untuk industri manufaktur, pengukuran kinerja diukur dengan menggunakan beberapa dimensi seperti produktivitas, biaya produksi per unit, kualitas, kapabilitas pengiriman, dan intensitas *research* dan *development* (R&D) (Demeter, 2003).

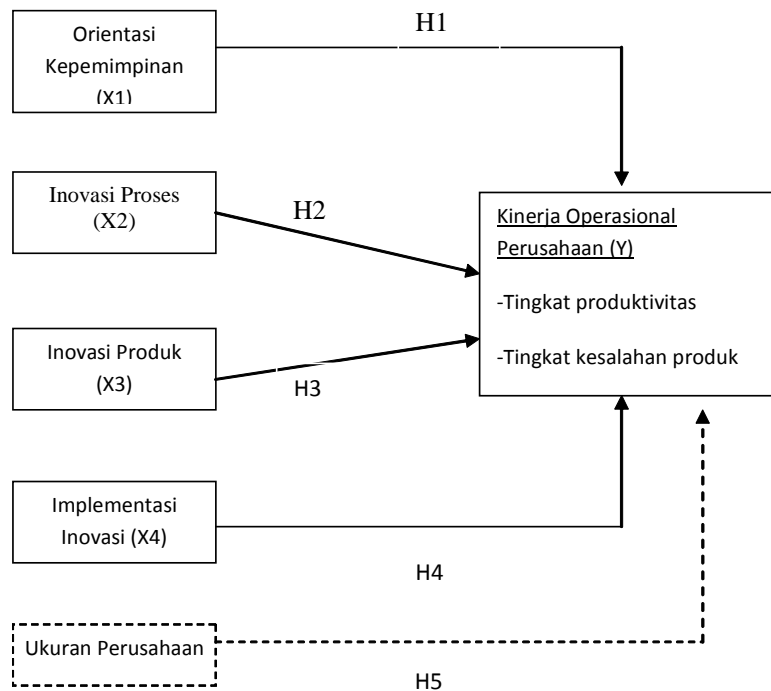
Untuk meningkatkan ketepatan indikator pengukuran kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan mengkombinasikan antara indikator finansial dan indikator operasional (Ellitan, 2001). Noori dan Radford (1995) menyatakan bahwa kinerja perusahaan tidak hanya dapat diukur dengan kinerja keuangan tetapi juga harus dilihat pada kinerja non keuangan, seperti kualitas, biaya, layanan tepat waktu, dan fleksibilitas. Pengukuran kinerja yang hanya berfokus pada ukuran keuangan dapat mengaburkan tanda-tanda yang berkaitan dengan peningkatan kinerja dan aktivitas-aktivitas inovasi (Kaplan dan Norton, 1992).

Berdasar pada penelitian Zahra dan Das (1993), Read (2000), Terziovski dan Samson (1999), dan Kemp et al. (2003), tentang inovasi dan kinerja perusahaan, maka peneliti mencoba memodifikasi penelitian ini dengan memasukkan implementasi inovasi sebagai dimensi dari strategi inovasi, kinerja non keuangan sebagai pengukuran kinerja perusahaan, dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol, dengan mengadaptasi model penelitian yang dikemukakan oleh Zahra dan Das (1993).

Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur di Sulawesi yang terdaftar di Direktori Industri Pengolahan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2003. Kuesioner dikirimkan melalui surat (*mailed questionnaires*) kepada sampel yang dipilih dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria perusahaan manufaktur berskala menengah dan besar sesuai kriteria BPS 2003. Data diperoleh dari berbagai sumber (*multisource data*) dengan menggunakan 3 responden untuk setiap sampel, terdiri dari satu orang manajer umum, satu orang manajer operasional, satu orang manajer penelitian dan pengembangan (R&D), dan masing-masing responden mendapat kesempatan untuk menjawab semua pertanyaan yang sama. Data ketiga sumber tersebut kemudian dirata-rata sebagai data untuk satu sampel. Sampel yang mengembalikan kuesioner tetapi tidak memiliki responden yang lengkap tidak diikutsertakan dalam analisis.

Berdasar sejumlah 150 perusahaan yang dikirim kuesioner, terdapat 48 perusahaan yang mengembalikan kuesioner tetapi hanya 42 yang hanya diisi secara lengkap dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Di samping pengiriman melalui pos, penggalan data juga dilakukan dengan mendatangi langsung sumber data dan diperoleh sejumlah 21 perusahaan sehingga secara total diperoleh response *rate* akhir sejumlah 42%. Berdasar data 63 perusahaan yang berpartisipasi dalam penelitian, 18 perusahaan adalah perusahaan besar dan 45 adalah perusahaan menengah. Seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu orientasi kepemimpinan, inovasi proses, inovasi produk, implementasi inovasi, diukur dengan menggunakan skala Likert 5 poin. Item-item pertanyaan tersebut merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Leonard-Barton (1991), Zahra dan Das (1993), Terziovski dan Samson





**Gambar 1**  
**Model Penelitian**

Diadaptasi dari Zahra dan Das, S.R, (1993), Terziovski dan Samson (1999), Read (2000), dan Kemp et al (2003).

(1999), Read (2000), dan Kemp et al. (2003).

Ukuran perusahaan ditentukan dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Industri (KLUI) (BPS, 2003) yang membagi skala usaha perusahaan berdasarkan jumlah tenaga kerja. Penggolongan skala perusahaan dibagi dalam empat golongan yaitu 1) besar dengan jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih; 2) sedang dengan jumlah tenaga kerja 20-99 orang, 3) kecil dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang, dan 4) rumah tangga dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang. Ukuran yang digunakan untuk kinerja operasional adalah tingkat produktivitas, tingkat kesalahan produk, biaya garansi, biaya kualitas, dan ketepatan waktu produk sampai konsumen (Terziovski dan Samson 1999). Tingkat kesalahan produksi dihitung melalui jumlah produk

cacat (*defect*) yang dihasilkan pada setiap tingkat volume produksi tertentu dan dinyatakan dalam persentase dari volume produksi dimana angka jawaban 1 menunjukkan kurang dari 0,1% dan angka jawaban 5 menunjukkan lebih dari 5%. Biaya jaminan dinyatakan dalam persentase dari total penjualan, dimana angka jawaban 1 berarti kurang dari 0,1% dan angka jawaban 5 berarti lebih dari 3%. Biaya kualitas dinyatakan dalam persentase dari total penjualan, angka jawaban 1 berarti kurang dari 0,1% dan angka jawaban 5 berarti lebih dari 15%. Ketepatan dinyatakan dengan 1 untuk menyatakan kurang dari 50% dan angka jawaban 5 menyatakan antara 97-100%.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda untuk



menganalisis hubungan antara satu variabel terikat dan beberapa variabel bebas (Hair et al. 1998: 148). Persamaan model regresi yang akan dianalisis adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 OK + \beta_2 PS + \beta_3 PR + \beta_4 IMP + \beta_5 SIZE + e$$

dimana;

- Y = Kinerja operasional perusahaan (tingkat produktivitas, tingkat kesalahan produk, biaya jaminan/garansi, biaya kualitas, dan tingkat penyampaian produk).  
 OK = Orientasi Kepemimpinan  
 PS = Inovasi Proses  
 PR = Inovasi Produk  
 IMP = Implementasi Inovasi  
 SIZE = Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol  
 bo = Konstanta  
 b1 - b5 = koefisien regresi  
 e = error dari persamaan regresi

#### HASIL PENELITIAN

Uji validitas ditujukan untuk menganalisis apakah instrumen yang digunakan dalam penelitian ini benar-benar mengukur variabel yang sedang diamati (Sekaran 2000: 206). Uji validitas dilakukan terhadap 23 butir instrumen dari 5 variabel yaitu orientasi kepemimpinan

6 butir, inovasi proses 4 butir, inovasi produk 5 butir, implementasi inovasi 3 butir, dan kinerja operasional 5 butir. Berdasarkan hasil faktor analisis secara keseluruhan hanya ada satu item pernyataan yang harus dikeluarkan karena memiliki *factor loading* di bawah 0.40 sebagai syarat minimal konstruk agar dapat diterima (Hair et al. 1998). Untuk menguji reliabilitas digunakan *rule of thumb* nilai Cronbach alpha sebesar 0,60. Hasil uji terhadap seluruh variabel yang diamati diperoleh nilai seluruh Cronbach alpha dari variabel yang digunakan di atas 0,60 sehingga dapat dianalisis lebih lanjut.

#### PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan memasukkan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Pengujian statistik menunjukkan bahwa orientasi kepemimpinan, inovasi proses, inovasi produk, implementasi inovasi, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Namun demikian, nilai koefisien determinasi atau R<sup>2</sup> dalam model ini bernilai 0.560 yang berarti hanya 56% dari variasi kinerja operasional perusahaan yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel yang digunakan dalam model tersebut sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak teridentifikasi.

**Tabel 1**  
**Hasil Pengujian *Multiple Regression* dengan Ukuran perusahaan sebagai Variabel Kontrol**

Variabel Independen	Koefisien	Standar Error	t	Sig t
Orientasi Kepemimpinan	0.003	0.114	0.030	0.976
Inovasi Proses	0.563	0.151	5.479	0.000
Inovasi Produk	0.420	0.157	4.147	0.000
Implementasi Inovasi	0.235	0.128	2.577	0.013
Ukuran perusahaan	0.072	0.147	0.664	0.510
R <sup>2</sup>				0.560
Adjusted R <sup>2</sup>				0.521
F				14.492
Sig F				0.000

Sumber: Data primer, diolah.

Berdasar hasil tersebut, pengujian terhadap hipotesis 1 yang menguji apakah orientasi kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja operasional perusahaan tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Temuan ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Zahra dan Das (1993). Tidak konsistennya hasil penelitian ini kemungkinan disebabkan oleh variabel orientasi kepemimpinan dalam penelitian ini lebih berorientasi pasar (*market oriented*). Orientasi kepemimpinan yang mengarah pada pasar cenderung hanya menekankan pada inovasi produk. Inovasi produk hanya menghasilkan desain yang sesuai dengan kebutuhan pasar atau selera pelanggan tanpa memperhatikan bagaimana inovasi tersebut diciptakan. Akibatnya, proses penciptaan inovasi yang berorientasi pasar tersebut berpotensi menimbulkan biaya produksi tinggi. Salah satu alternatif yang dapat diaplikasikan adalah mengkombinasikan dengan orientasi kepemimpinan teknologi (Porter 1990). Orientasi ini dapat menghasilkan proses produksi yang lebih efisien, berkualitas, dan memiliki akurasi tinggi karena menekankan inovasi proses. Dengan dikombinasikannya orientasi kepemimpinan teknologi, maka akan dapat dihasilkan produk yang sesuai selera pelanggan tetapi dengan biaya produksi yang lebih efisien.

Berbeda dengan hipotesis pertama, hasil uji statistik memberikan dukungan terhadap hipotesis 2a. Uji statistik menunjukkan bahwa inovasi proses memiliki pengaruh positif terhadap kinerja operasional perusahaan, yang ditunjukkan dengan hasil uji signifikansi 0.000 yang berarti signifikan pada tingkat  $\alpha = 5\%$ . Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Zahra dan Das (1993) dan Kemp, et al. (2003). Fakta ini menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil dalam mengembangkan inovasi prosesnya. Skinner (1984) mengemukakan bahwa inovasi dalam peralatan operasi dan teknologi proses dapat digunakan secara strategis sebagai suatu alat kompetitif yang sangat ampuh. Adanya ketidaksesuaian antara sistem produksi dengan produk yang dihasilkan berpotensi untuk menghasilkan produk dengan biaya tinggi.

Hipotesis 2b yang menguji pengaruh inovasi produk terhadap kinerja perusahaan juga memberikan hasil positif dan signifikan. Dengan kata lain, inovasi produk berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Uji signifikansi menunjukkan hasil 0.000

yang berarti signifikan pada tingkat  $\alpha = 5\%$ . Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Zahra dan Das (1993) yang menunjukkan bahwa perusahaan cukup berhasil dalam pengembangan inovasi produk dan sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu menghasilkan produk-produk baru yang menguntungkan dan sesuai dengan selera konsumen. Keberhasilan perusahaan untuk menerapkan inovasi produk ini tidak terlepas dari keberhasilan perusahaan dalam mengimplementasikan inovasi proses. Inovasi proses merupakan salah satu faktor dalam menentukan kesuksesan perusahaan untuk menerapkan inovasi produk.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa implementasi inovasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja operasional perusahaan. Uji signifikansi menunjukkan hasil 0.013 yang berarti signifikan pada tingkat  $\alpha = 5\%$ . Pengaruh ini menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur telah mampu mengimplementasikan strategi manufaktur secara terintegrasi pada seluruh elemen organisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan telah menyusun berbagai infrastruktur terutama infrastruktur lunak guna mendukung strategi inovasi. Infrastruktur lunak ini di antaranya adalah pendidikan dan pelatihan karyawan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Dukungan sumber daya manusia terutama karyawan *level* bawah merupakan faktor penting dalam kesuksesan implementasi strategi inovasi. Karyawan *level* bawah juga menentukan bagaimana strategi yang berasal dari manajemen diterjemahkan ke dalam operasional perusahaan (Read (2000).

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan dengan menggunakan jumlah karyawan sebagai proksi dari ukuran perusahaan sesuai standar BPS. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Tidak konsisten dengan hasil penelitian Kemp, et al. 2003 karena penelitian ini hanya menggunakan jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan sebagai proksi dari ukuran perusahaan. Alasan ini diperkuat hasil penelitian dan saran Zhou dan Stan (1998) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang menggunakan proksi total penjualan sebagai proksi ukuran perusahaan.

## SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN PENELITIAN

### Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang berhasil mengembangkan inovasi proses dan produk dapat meningkatkan kinerja operasional perusahaan manufaktur. Perusahaan yang berhasil dalam pengembangan inovasi produk akan menghasilkan produk-produk baru sesuai dengan ekspektasi konsumen yang berbeda dengan produk pesaing. Demikian juga dengan implementasi inovasi yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja operasional perusahaan menunjukkan bahwa implementasi inovasi didukung oleh iklim yang kondusif bagi karyawan untuk mengimplementasikan metode dan teknologi baru secara inovatif dalam menerapkan inovasi proses.

Dalam penelitian ini, orientasi kepemimpinan tidak memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja operasional perusahaan, yang tidak konsisten dengan hasil penelitian Zahra dan Das (1993). Tidak konsistennya hasil penelitian ini salah satunya disebabkan oleh penggunaan variabel orientasi kepemimpinan dalam penelitian ini bersifat *market leader* bukan *technology leader*. Porter (1990) mengemukakan bahwa kepemimpinan teknologi merupakan upaya perusahaan untuk menjadi yang pertama dalam memperkenalkan perubahan teknologi yang mendukung inovasi proses dan produk..

Ukuran perusahaan yang digunakan sebagai variabel kontrol juga tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kinerja operasional perusahaan yang tidak konsisten dengan hasil penelitian Kemp, *et al* (2003). Hal ini disebabkan penelitian ini hanya menggunakan jumlah tenaga kerja sebagai proksi dari ukuran. Penelitian Kemp, *et al* (2003) tidak hanya menggunakan tenaga kerja tetapi juga menggunakan total penjualan sebagai indikator dalam menentukan ukuran perusahaan

### Implikasi dan Saran Penelitian

Penelitian ini memberikan implikasi bagi para manajer akan pentingnya inovasi proses dan inovasi produk. Hasil analisis menunjukkan bahwa inovasi proses dan inovasi produk berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kinerja operasional perusahaan. Ini berarti pengembangan teknologi yang digunakan, metode-metode kerja baru, serta kreasi produk yang dihasilkan atau modifikasi produk yang sudah ada akan meningkatkan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Terdapat beberapa area yang dapat dijadikan obyek pengamatan dan sekaligus menutupi kekurangan dari penelitian ini. Salah satu kelemahan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini hanya menguji pengaruh dimensi-dimensi strategi inovasi terhadap kinerja operasional perusahaan tanpa melihat sudah berapa lama perusahaan menerapkan strategi inovasinya. Penelitian selanjutnya disarankan agar memasukkan variabel, antara lain kurun waktu perusahaan dalam menerapkan inovasi.

Tingkat generalisasi merupakan permasalahan yang umum terjadi pada berbagai penelitian akademis karena keterbatasan waktu dan sumberdaya. Penelitian ini hanya mengambil sampel pada perusahaan manufaktur yang ada di Sulawesi sehingga tidak dapat digeneralisasikan pada perusahaan selain perusahaan manufaktur. Penelitian berikutnya disarankan agar perusahaan jasa juga dilibatkan sebagai sampel penelitian dengan area penelitian yang lebih luas. Penggunaan jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan sebagai proksi ukuran perusahaan belum dapat menggambarkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Penelitian selanjutnya sebaiknya juga menggunakan total penjualan sebagai variabel kontrol.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baldwin, J.R. 1995. Innovation: The Key To Success In Small Firm, Working Paper Series, Micro-Economic Studies and Analysis Division, *Statistics Canada and Canadian Institute for Advanced Research Economic*. Project Growth, No. 76.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2003. *Statistik Industri Perusahaan Manufaktur Skala Menengah dan Besar*, Jakarta, Indonesia.

- Chase, B.R, Aquilano, J.N, and Jacobs, R.F. 1998. *Operation Management for Competitive Advantage*. New York: Mc. Graw Hill, Ninth Edition.
- Cumming, B.S. 1998. Innovation Overview and Future Challenges. *European Journal of Innovation Management*, 1,1: 21-29.
- Delios, A and Beamish, P. W. 1999. Geographic Scope, Product Diversification, and The Corporate Performance of Japanese Firms. *Strategic Management Journal*, 20: 711-727.
- Ettlie, J.E and Reza, E.M. 1992. Organizational Integration and Process Innovation, *Academy of Management Journal*, 35, 4, pp, 795-827.
- Hair, J.R, R.E. Anderson, R.L.Tatham, and W.C.Black. 1998. *Multivariate Data Analysis*, 5 th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentise-Hall, Inc.
- Johne, A. 1999. Successful Market Innovation. *European Journal of Innovation Management*, 2, 1: 6-11.
- Kaplan, R. S and Norton, D. P. 1992. The Balance Scorecard Measure that Drive Performance. *Harvard Business Review*, Vol. 3, pp, 71-79.
- Kemp, R. G M, M. Folkeringa, J. P. J. De Jong, and E. F. M. Wubben. 2003. Innovation and Firm Performance: differences between small and medium-sized firms. *Scientific Analysis of Entrepreneurship and SMEs*.
- Klein Katherine, J and Sorra Joann Specer. 1996. The Challenge of Innovation Implementation, *Academy of Management Review*, pp, 1055-1077.
- Leonard-Barton, D. 1991. *The Role of Process Innovation and Adaptation in Attaining Strategic Technological Management*, 6, 3, pp, 303-320.
- Means, G.E and Faulkner, M. 2000. Strategic Innovation in The New Economy. *Journal of Business Strategy*, 25-29.
- Melum, M. 2002. Developing High Performance Leaders. *Quality Management in Health Care*, Vol.11, pp, 55-68.
- Noori, H and Radford, R. 1995. *Production and Operation Management: Total Quality and Responsiveness*, Mc Graw-Hill, Inc, USA.
- Bustamante, Perez. 1999. Knowledge Management in Agile Innovation Organizations. *Journal of Knowledge Management*, 3,1: 6-17.
- Porter, M.E. 1990. *Competitive Advantage-Creating and Sustaining Superior Performance*, The Free Press, pp, 145-156.
- Read, A. 2000. Determinant of Successful Organizational Innovation: A Review of Current Research. *Journal of Management Practice*, Vol. 3 (1), pp, 95-119.
- Schroeder, R.G, 1993. *Operation Management: Decision Making in the Operation Function*. Fourth Edition. McGraw Hill Inc.
- Sekaran, U. 2000. *Research Methods or Business: A Skill Buiding Approach*, 3<sup>rd</sup> ed. New York: John Willey & Sons, Inc.
- Sharma, B and Fisher, T. 1997. Functional Strategies and Competitiveness: an empirical analysis using data from Australian Manufacturing. *Benchmarking for Quality Management and Technology*, 4: 286-294.
- Terziovski, M, and Samson, D. 1999. *The Link Between Total Quality Management*, Vol. 16, (3), pp, 1-18.
- Zahra, S. A. and Das, S. R. 1993. Innovation Strategy and inancial Performance in Manufacturing Companies: An Empirical Study, *Production and Operation Management*, 2, 1, pp, 15-37.
- Zhou, S and S. Stan. 1998. The Determinants of Export Performance: a Review of the Empirical Literature Between 1987-1997. *International Marketing Review*, 15 (5), pp, 333-356.

## **INDEPENDENSI AUDITOR SETELAH PEMBERLAKUAN SARBANES-OXLEY ACT DI PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA (BEJ)**

*Sri Astuti*

Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta  
Jalan SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283  
Telepon +62 274 486733, 486402, Fax +62 274 486188  
E-mail: toeti\_2003@yahoo.com

### **ABSTRACT**

This paper examines whether auditor independence after Sarbanese Oxley Act (SOA) affect audit quality and earnings management at Jakarta Stock Exchange. Sarbanese Oxley Act is the Act was triggered by the bankruptcies and alleged audit failures involving Enron and WorldCom, that affect an auditor independence. Using sample of 75 between 2000 to 2003, and logistic regression test and ordinary least square regression, we find that auditor independence after Sarbanese Oxley Act (SOA) affect audit quality and earnings management.

**Keywords:** auditor independence, audit quality, earnings management

### **PENDAHULUAN**

*Sarbanes-Oxley Act* muncul dilatarbelakangi oleh runtuhnya korporasi di Amerika Serikat, yaitu adanya skandal akuntansi dan tidak diindahkannya *corporate governance* pada Enron (perusahaan energi terbesar di dunia). Selama bertahun-tahun, perusahaan memberikan informasi perhitungan akuntansi yang salah, namun menjelang kebangkrutan keuntungan

Enron masih sempat dinyatakan *overstated* sedangkan kewajibannya dinyatakan *understated* dalam laporan keuangannya (Suharto, 2004). *Securities Exchange Committee* (SEC) melakukan penyidikan dan menemukan bahwa laporan keuangan Enron tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dampak manipulasi itu, *auditor* independen Enron -Arthur Andersen- dianggap terlibat dalam skandal tersebut. Oleh karena itu, independensi profesional *auditor* banyak dipertanyakan publik.

Berdalih untuk melindungi kepentingan publik dan mengembalikan kepercayaan publik, maka diundangkan *Sarbanes-Oxley Act*. Inti pengaturan ini adalah untuk melindungi kepentingan investor dengan meningkatkan akurasi dan kepercayaan terhadap keterbukaan perusahaan sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan di pasar modal. Pemberlakuan perundangan ini secara dramatis mengubah *landscape* profesi akuntan di Amerika dan dampaknya menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Perundangan yang berlaku di Indonesia diatur dalam KMK No. 423/KMK.06/2002, yang mana mengacu pada *Sarbanes-Oxley Act* dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Hilangnya kepercayaan publik terhadap laporan keuangan pada saat ini sangatlah beralasan bila dilihat dari akibat yang ditimbulkannya. Gagalnya laporan keuangan menggambarkan kondisi perusahaan dan mengakibatkan keputusan-keputusan besar yang



diambil berdasarkan laporan keuangan semakin diabaikan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan secara langsung maupun tidak langsung adalah manajemen, Dewan Komisaris, dan peran yang tak kalah pentingnya adalah *auditor* independen. *Auditor* menjalankan audit terhadap laporan keuangan entitas untuk memberikan keyakinan laporan keuangan disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU). Adanya audit dan opini yang dihasilkan akan berpengaruh besar terhadap kredibilitas laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan merupakan tanggungjawab manajemen, *auditor* mempunyai peran yang vital dalam mempertahankan kredibilitas laporan keuangan.

Sebelum terjadinya skandal yang mengakibatkan kredibilitas laporan keuangan menurun, sebenarnya sudah banyak kelemahan struktural yang dapat diidentifikasi. Salah satunya adalah fungsi audit yang dijalankan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). KAP tersebut pada praktiknya tidak hanya memberikan jasa audit saja karena juga memberikan jasa-jasa lain seperti konsultasi manajemen, perpajakan, jasa akuntansi, bahkan jasa konsultasi hukum bagi klien yang diaudit. Melihat begitu banyaknya jasa yang diberikan, maka akan memicu anggapan bahwa jasa audit hanya menjadi sampingan guna mendapatkan jasa-jasa lain yang memberikan keuntungan lebih besar bagi KAP. Dengan demikian, jasa audit yang diberikan akan menurunkan kualitas audit yang diberikan.

Menurut De Angelo (1981), dimensi kualitas audit ada 2 yaitu kompetensi dan independensi. Standar umum dalam standar audit mensyaratkan seorang *auditor* harus memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai *auditor*, serta dalam melaksanakan audit dan penyusunan laporannya *auditor* harus menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama (*due professional care*). Kompetensi tersebut bisa diperoleh melalui pendidikan formal dan pengalaman kerja. Angelo juga mendeskripsikan independensi sebagai kebebasan auditor dalam melaksanakan pekerjaan lapangan, *auditor* tidak bisa dipengaruhi oleh pihak manajemen.

Keinginan perusahaan untuk mendapatkan nilai positif dari pasar, yang selanjutnya menentukan jumlah dana yang dapat diperoleh, dapat menjadi insentif bagi manajer untuk menyusun laporan keuangan yang

menarik bagi pemakainya. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh manajer adalah melakukan manajemen laba dengan rekayasa akrual, dengan tujuan untuk mengurangi fluktuasi laba perusahaan.

Untuk melihat perusahaan melakukan manajemen laba atau tidak, akan ditunjukkan oleh nilai akrualnya. Nilai *total accrual* dapat dibedakan menjadi akrual yang wajar (*nondiscretionary accrual*) dan akrual yang direkayasa manajemen (*discretionary accrual*). Subramanyam (1996) menemukan bahwa *discretionary accruals* berhubungan dengan harga saham, laba yang akan datang dan aliran kas, serta menyimpulkan bahwa manajer memilih akrual untuk meningkatkan jumlah laba akuntansi. Hal ini dikarenakan laba akrual dipandang sebagai ukuran kinerja perusahaan yang *superior* dibandingkan dengan aliran kas (Dechow, 1995). Manajer mempunyai dorongan untuk menyesuaikan laba dengan tujuan kesejahteraan perusahaan dan atau manajer itu sendiri dengan cara melakukan manajemen laba. Perusahaan yang mempunyai *abnormal accrual* menunjukkan bahwa perusahaan tersebut melakukan manajemen laba.

Kualitas audit juga diukur dari kemampuan auditor untuk membatasi *discretionary accruals*. *Discretionary accruals* menggambarkan bagian dari *total accruals* yang lebih rentan terhadap manipulasi manajer dan sering digunakan sebagai indikasi manajemen laba (Jones, 1991 dan Jiambalvo, 1994). Becker et. al. (1998) dan Francis et. al. (1999) melaporkan bahwa *auditor the big five* mempunyai kualitas audit yang tinggi, mampu menekan manipulasi laba, serta *auditeenya* berhubungan dengan *discretionary accruals* yang rendah. Pemberlakuan *Sarbanes-Oxley Act* akan mendorong independensi *auditor* sehingga praktik manajemen laba setelah diberlakukannya adalah kecil.

Penelitian ini akan menguji apakah independensi *auditor* setelah pemberlakuan *Sarbanes-Oxley Act* mempengaruhi kualitas audit dan manajemen laba. Kualitas audit di sini ditunjukkan dengan adanya opini *auditor* dengan modifikasi, sedangkan manajemen laba ditunjukkan oleh nilai *discretionary accruals*. Penelitian ini diharapkan akan mendorong sikap profesional *auditor* dalam hal independensi *auditor* dan kualitas yang dihasilkan sehingga kredibilitas laporan yang dihasilkan adalah tinggi. Dengan munculnya *Sarbanes-Oxley Act* diharapkan akan

mengembalikan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan.

#### MATERI DAN METODE PENELITIAN

Independensi mutlak harus dipenuhi, yaitu bahwa akuntan dalam menjalankan tugasnya bertindak secara independen. Dalam kenyataan bahwa akuntan menerima *fee* merupakan peluang timbulnya kondisi tidak independen. Untuk mencapai kondisi yang benar-benar independen hanya diri sendiri yang tahu. Sementara bila independensi ini terganggu, maka sudah dapat dipastikan hasil dan opini yang diberikan akan terganggu.

Independensi akuntan mulai dipertanyakan sejak pasca Enron. Akuntan yang memberikan jasa lain selain audit dalam waktu yang bersamaan akan selalu mengganggu independensinya dan hasil auditnya. Hal ini juga terjadi apabila perusahaan merupakan klien terbesar bagi kantor akuntan tersebut, maka independensinya menjadi terganggu. Badan Pengatur Pasar Modal Indonesia (Bapepam) membatasi jangka waktu akuntan dan kantor akuntan publik dalam melakukan audit pada suatu perusahaan secara berurutan. Jangka waktu untuk *auditor* adalah 3 tahun dan kantor akuntan publik adalah 5 tahun. Hal ini diatur dalam KMK No. 423/KMK.06/2002. Independensi merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam melaksanakan audit. Tanpa adanya independensi, maka opini yang diberikan oleh seorang auditor atas hasil pemeriksaan tidak dapat dipercaya oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil audit tersebut.

Mautz & Sharaf (1993) menyatakan ada dua aspek independensi, yaitu 1) Independensi dari praktisi individual dalam melaksanakan pekerjaannya dan 2) Independensi *auditor* sebagai suatu kelompok profesi. Seorang *auditor* harus memiliki keahlian di bidang teknologi informasi, mengingat pemrosesan transaksi sudah berbasis komputerisasi dan jaringan. Independensi praktisi terdiri dari tiga dimensi, yaitu 1) *Programming Independence*, yaitu adanya kebebasan dari pengendalian atau pengaruh yang tidak pantas dalam memilih teknik audit, prosedur, dan dalam luasnya pengaplikasian teknik dan prosedur tersebut; 2) *Investigate Independence*, yaitu adanya kebebasan dari pengendalian atau pengaruh yang tidak pantas dalam

menyeleksi bidang, aktivitas, hubungan personel, dan kebijakan manajerial yang akan diperiksa; dan (3) *Reporting Independence*, yaitu adanya kebebasan dari pengendalian atau pengaruh yang tidak pantas dalam menyatakan fakta-fakta yang diungkapkan melalui pengujian atau dalam pernyataan rekomendasi atau opini dari hasil pengujian.

Agar hasil audit yang dilakukan *auditor* dapat dipercaya keakuratannya dan dapat diandalkan, maka *auditor* harus selalu mempertahankan sikap independensi tersebut, baik independensi sebagai praktisi individual maupun independensi sebagai suatu kelompok profesi serta independensi dalam keahlian. Tanpa independensi, *auditor* akan kehilangan kepercayaan dari para pengguna jasanya. Reputasi *auditor* sering digunakan sebagai proksi kualitas audit, namun demikian dalam banyak penelitian kompetensi dan independensi masih jarang digunakan untuk melihat seberapa besar kualitas audit secara aktual (Ruiz Barbadillo *et al*, 2004). Reputasi *auditor* didasarkan pada kepercayaan pemakai jasa *auditor* bahwa *auditor* memiliki kekuatan monitoring yang secara umum tidak dapat diamati. DeAngelo (1981) menyatakan bahwa *auditor* skala besar memiliki insentif yang lebih untuk menghindari kritikan kerusakan reputasi dibandingkan *auditor* skala kecil. *Auditor* skala besar juga lebih cenderung untuk mengungkapkan masalah-masalah yang ada karena mereka lebih kuat menghadapi risiko proses pengadilan.

Dalam penelitian Crasswell dan kawan-kawan (1995) dalam Setyarno (2006), kualitas *auditor* diukur dengan menggunakan ukuran *auditor specialization*. Crasswell menunjukkan bahwa spesialisasi *auditor* pada bidang tertentu merupakan dimensi lain dari kualitas audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fee* audit spesialis lebih tinggi dibandingkan *auditor* nonspesialis. Mayangsari (2003) melakukan penelitian pengaruh spesialisasi industri *auditor* sebagai proksi lain dari kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa spesialisasi *auditor* berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.

Laporan *auditor* berisi tentang kewajaran laporan keuangan perusahaan. Kewajaran laporan keuangan tersebut dituangkan dalam opini *auditor*. Adapun tipe opini *auditor* menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik



(2001) tersebut adalah 1) Pendapat wajar tanpa pengecualian yang menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pendapat ini dinyatakan dalam laporan keuangan bentuk baku; 2) Bahasa penjelasan ditambahkan dalam laporan *auditor* bentuk baku. Pertimbangan *auditor* memberikan bahasa penjelasan, antara lain adalah adanya kesangsian *auditor* terhadap kelangsungan usaha perusahaan, adanya perubahan material dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya, dan kondisi ekonomi yang tidak pasti; 3) Pendapat wajar dengan pengecualian yang menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan; 4) Pendapat tidak wajar yang menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; dan 5) Pernyataan tidak memberikan pendapat yang menyatakan bahwa *auditor* tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

Opini *auditor* merupakan informasi bagi pemakai laporan keuangan. Opini *auditor* dapat menggambarkan kondisi keuangan dan manajemen perusahaan. Opini *auditor* dengan modifikasi mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut sedang mengalami permasalahan keuangan ataupun manajemen sehingga *auditor* tidak mampu memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Mereka akan memberikan modifikasi tentang *going concern*, *uncertainty*, dan perubahan prinsip akuntansi. Auditor yang mampu menggali kondisi perusahaan akan mampu memberikan opini yang sesuai dengan keadaan tersebut. Banyak penelitian yang menguji tentang opini auditor dengan modifikasi, contohnya penelitian Choi and Jetter (1992), dia meneliti opini dengan modifikasi *going concern* menunjukkan kandungan informasi bagi return saham dan kejadian kebangkrutan (Hopwood et. Al., 1989). Bradshaw et. Al. (2001) menemukan bahwa manajemen laba meningkat sehubungan dengan adanya modifikasi

opini auditor. Healy (1985) menemukan bahwa perusahaan dengan kinerja rendah akan memperoleh opini dengan modifikasi *going concern* dan *accrualnya* negatif.

**HI:** Independensi *auditor* setelah pemberlakuan Sarbanes-Oxley Act berpengaruh pada kualitas audit.

Jensen dan Meckling (1976) dan Scott (1997) menggambarkan hubungan keagenan sebagai hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan antara *principal* yang menggunakan agen untuk melakukan jasa yang menjadi kepentingan *principal* dalam hal terjadi pemisahan kepemilikan dan kontrol perusahaan. Agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan lancar, *principal* akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada agen dan hubungan ini juga perlu diatur dalam suatu kontrak yang bisaanya menggunakan angka-angka akuntansi yang dinyatakan dalam laporan keuangan sebagai dasarnya. Melalui laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab agen, *principal* dapat mengukur, menilai, dan mengawasi kinerja agen, sejauh mana agen telah bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan *principal*. Selain itu, pemegang saham dapat memberikan kompensasi kepada agen berdasarkan laporan keuangan, kreditur dapat memberikan pinjaman dengan mempertimbangkan laporan keuangan, dan pemerintah dapat menetapkan regulasi berdasarkan laporan tersebut.

Laporan keuangan yang dibuat menggunakan angka-angka akuntansi diharapkan berperan besar dalam meminimalkan konflik antarpihak yang berkepentingan dengan perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976; Watts dan Zimmerman, 1986). Ketergantungan pihak eksternal pada angka akuntansi, kecenderungan manajer untuk mencari keuntungan sendiri, dan tingkat asimetri informasi yang tinggi mengakibatkan keinginan besar bagi manajer untuk memanipulasi kinerja yang dilaporkan untuk kepentingan mereka sendiri. Perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham mengakibatkan manajemen menggunakan *accounting discretion* untuk mempengaruhi transfer dari pemegang saham ke manajemen.

Standar akuntansi yang memberikan keleluasaan kepada pihak manajemen untuk memilih dan menggunakan kebijakan atau metoda akuntansi

tertentu, dijadikan sebagai alasan bagi pihak manajer untuk melakukan aktivitas manajemen laba. Aktivitas manajemen laba dapat terjadi karena tiga faktor, yaitu pemanfaatan transaksi akrual, perubahan metoda akuntansi, dan penerapan suatu kebijakan akuntansi. Transaksi akrual memberikan kebebasan pada manajemen untuk menentukan jumlah transaksi secara fleksibel. Adapun faktor-faktor yang mendorong manajer melakukan aktivitas manajemen laba (Scott, 1997), adalah 1) Kontrak bonus, manajer perusahaan yang memperoleh laba di bawah target laba akan melakukan manipulasi laba agar memperoleh bonus yang maksimal di periode mendatang; 2) Kontrak hutang, Sweeney (1994) menemukan bahwa perusahaan secara signifikan menaikkan laba sehingga rasio *debt to equity* dan *interest coverage* pada frekuensi yang ditentukan; 3) Faktor politik, banyak perusahaan yang terkena dampak politik akan melakukan manajemen laba untuk mengurangi visibilitas mereka; 4) Faktor pajak, pada periode terjadi kenaikan harga, penggunaan metode *Last In First Out* (LIFO) akan menghasilkan laba yang dilaporkan lebih rendah dan pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah; 5) Perubahan *Chief Executive Officer* (CEO), pada *bonus plan hypothesis* memprediksikan bahwa semakin mendekati periode pensiun seorang CEO akan cenderung melakukan strategi *income maximization* untuk meningkatkan bonus mereka. DeAngelo dan Skinner (1994) mengemukakan bahwa CEO akan melakukan *take a bath* untuk meningkatkan probabilitas peningkatan laba di masa mendatang; dan 6) Penawaran saham perdana, Sutanto (2000) menemukan bahwa perusahaan yang akan melakukan penawaran saham perdana (*Initial Public Offering* atau IPO) melakukan aktivitas manajemen laba pada periode terakhir sebelum IPO.

Banyak penelitian membuktikan bahwa pada saat manajer memiliki insentif tertentu, sering tergoda untuk mempengaruhi besarnya laba perusahaan dengan cara melakukan rekayasa akrual. Pada dasarnya akrual itu penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang sah. Sebagian dari akrual yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan (sebagai bagian dari angka laba) bukan akrual yang menjadikan laporan keuangan yang sah tetapi akrual yang digunakan oleh manajer untuk mempengaruhi *stakeholders*. Oleh karena itu, *total accrual* dapat dibedakan

menjadi akrual yang wajar dan akrual yang direayasa manajemen. Perusahaan yang mempunyai *abnormal accrual* merupakan signal bahwa perusahaan tersebut melakukan *earnings management*. Perusahaan melakukan manajemen laba mempunyai beberapa alasan, yaitu metode akuntansi memberikan peluang kepada manajemen untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan yang berbeda, dan melibatkan subjektivitas dalam menyusun estimasi.

Munculnya *Sarbanes-Oxley Act* karena penurunan kredibilitas laporan keuangan, di mana profesi auditor sangat berhubungan dengan opini atas laporan keuangan yang diauditnya. *Sarbanes-Oxley Act* mengatur tentang praktik manajemen dan profesi akuntan sebagai profesi penunjang pasar modal. *Sarbanes-Oxley Act* berfungsi sebagai pengawas dan pengendali profesi akuntan dan kantor akuntan. Setiap kecurangan ataupun skandal yang dilakukan oleh *auditor* akan diberikan sanksi yang material. Contohnya penutupan Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen sehubungan dengan skandal Enron. Enron melakukan manipulasi laba, akan tetapi manipulasi itu ditutup-tutupi oleh Arthur Andersen sehingga kinerja keuangan perusahaan nampak bagus, padahal tidak. Selama waktu yang relatif lama, skandal tersebut terungkap, dan hal ini menjadi puncak dari runtuhnya kredibilitas akuntan.

**H2:** Independensi *auditor* setelah pemberlakuan Sarbanes-Oxley Act berpengaruh pada *discretionary accruals*.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2003. *Sarbanes Oxley Act* muncul pada tahun 2001 sebagai akibat penurunan citra akuntan publik di tahun 2000. Respon terhadap pemberlakuan *Sarbanes Oxley Act* dapat dilihat 2 tahun setelah peraturan dimunculkan, yaitu sampai tahun 2003.

Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah dengan *purposive sampling*, artinya populasi yang akan dijadikan sampel penelitian ini adalah populasi yang memenuhi kriteria sampel tertentu sesuai dengan yang dikehendaki peneliti. Sampel yang dipilih adalah perusahaan manufaktur yang sahamnya cukup aktif diperdagangkan di BEJ pada saat periode pengamatan. Penentuan kriteria sampel diperlukan untuk menghindari timbulnya *misspesifikasi* dalam

penentuan sampel penelitian yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap hasil penelitian. Adapun kriteria yang dipakai sebagai sampel penelitian adalah 1) Seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ sejak tahun 2000 sampai tahun 2003 dan 2) Perusahaan tersebut mendapatkan opini dengan modifikasi pada tahun amatan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 1) Laporan Keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 yang diperoleh dari *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) dan dari <http://www.jsx.co.id>; 2) Laporan *auditor* seluruh perusahaan yang terdaftar di BEJ mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 yang diperoleh dari Laporan Keuangan tahunan perusahaan individual; dan 3) Risiko sistematis atau BETA yang diperoleh dari ICMD.

Penelitian ini terdiri dari dua persamaan. Persamaan 1 dipakai untuk menguji H1 dalam penelitian ini dengan variabel dependen adalah kualitas audit, variabel independen adalah independensi *auditor*, dan variabel kontrol adalah tahun dasar pengamatan. Persamaan 2 dipakai untuk menguji H2 dengan variabel dependen adalah manajemen laba, variabel independen adalah independensi *auditor*, dan sebagai variabel kontrol adalah tahun dasar pengamatan.

Persamaan 1:

$$\text{MODIFY} = a_0 + a_1\text{LTA} + a_2\text{CATA} + a_3\text{QUICK} + a_4\text{DE} + a_5\text{ROI} + a_6\text{PLOSS} + a_7\text{PMODIFY} + a_8\text{BETA} + a_9\text{THN}$$

Variabel dependen dalam persamaan 1 adalah *modify*, yaitu opini *auditor* dengan modifikasi pada tahun t. Apabila pada tahun t terdapat opini dengan modifikasi maka diberi *score* 1 dan apabila tidak 0. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah *natural logarithm* dari *total asset* (LTA), rasio aset lancar terhadap *total asset* (CATA), rasio aset lancar dikurangi dengan sediaan terhadap hutang lancar (QUICK), rasio utang jangka panjang terhadap *total asset* (DE), ROI, kerugian yang dialami perusahaan 1 apabila perusahaan mengalami kerugian pada tahun t-1 dan 0 jika tidak (PLOSS), opini *auditor* dengan modifikasi 1 jika perusahaan menerima opini dengan modifikasi pada tahun t-1 dan 0 jika tidak (PMODIFY), BETA, variabel *dummy* 1 jika observasi berhubungan dengan laporan keuangan tahun 2000 dan 0 jika tidak (THN). Variabel ini sebagai variabel pengontrol.

Persamaan 2:

$$\text{ABSDA} = b_0 + b_1\text{ABSAC} + b_2\text{DE} + b_3\text{MKTBKEQ} + b_4\text{LOSS} + b_5\text{LTA} + b_6\text{CHNI} + b_7\text{CASHFLOW} + b_8\text{THN}$$

Variabel dependen dalam persamaan 2 ini adalah ABSDA yaitu nilai absolut akrual yang direkayasa yang diukur dengan menggunakan model Jones (1991). Formulasi untuk menghitung akrual yang direkayasa adalah:

$$\text{DAC}_{pt} = (\text{TAC}_{pt}/\text{SALE}_{pt}) - (\text{TAC}_{pd}/\text{SALE}_{pd})$$

Dimana  $\text{DAC}_{pt}$  adalah akrual yang direkayasa pada periode t,  $\text{TAC}_{pt}$  adalah total akrual pada periode t,  $\text{SALE}_{pt}$  adalah penjualan pada periode t. Sedangkan  $\text{TAC}_{pd}$  adalah total akrual pada periode dasar,  $\text{SALE}_{pd}$  adalah penjualan pada periode dasar.

Variabel independen dalam persamaan 2 adalah: nilai *absolute* total akrual (ABSAC), DE, rasio *market value of equity to book value of equity* (MKTBKEQ), kerugian perusahaan (LOSS) 1 jika perusahaan melaporkan rugi pada tahun t dan 0 jika tidak, LTA, perubahan laba bersih (CHNI), rasio kas dari aktivitas operasi terhadap total aset (CASHFLOW), THN. Adapun formulasi untuk menghitung nilai absolute total akrual adalah:

$$\text{TAC}_{it} = a_0 + a_1\text{DSales}_{it} + \text{PPE}_{it} + e_{it}$$

Dimana  $\text{TAC}_{it}$  merupakan selisih antara laba bersih dengan arus kas dari aktivitas operasi perusahaan I pada tahun t,  $\text{DSales}_{it}$  adalah perubahan penjualan perusahaan I pada tahun t, dan  $\text{PPE}_{it}$  adalah aktiva tetap bersih perusahaan i pada tahun t.

## HASIL PENELITIAN

Alat analisis yang digunakan adalah *logistic regression* untuk menguji hipotesis 1, dan *ordinary least square regression* untuk pengujian hipotesis 2. H1 didukung apabila koefisien beta ke 9 dari persamaan 1 (AFTER) mempunyai nilai positif. Sedangkan H2 didukung apabila koefisien beta ke 7 dari persamaan 2 (CASHFLOW) mempunyai nilai negatif.

**PEMBAHASAN**

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2003. Jumlah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ dari tahun 2000 sampai 2003 secara konsisten adalah 296 perusahaan. Sedangkan jumlah data yang diobservasi setelah mempertimbangkan kriteria sampel adalah 75. Alat analisis yang digunakan adalah *logistic regression* untuk menguji H1 dan *ordinary least square regression* untuk pengujian H2.

Pengujian H1 dengan menggunakan persamaan *logistic regression* berikut ini:

$MODIFY = a0 + a1LTA + a2CATA + a3QUICK + a4DE + a5ROI + a6PLOSS + a7PMODIFY + a8BETA + a9THN$   
 Adapun hasil pengolahan data adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Tabel Pengujian Kelayakan Model Regresi**

Step	Chi-square	df	Sig.
1	1.402	8	.994

**Sumber:** Data diolah. Tahun 2006.

Tabel 1 menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini adalah layak yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi *godness of fit* sebesar 0,994. Hal ini berarti

bahwa tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan yang diamati.

Berdasarkan pengujian signifikansi t seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2, maka H1 dalam penelitian ini didukung. apabila nilai koefisien X9 nilainya positif.

Hasil pengolahan tersebut menggambarkan bahwa independensi auditor setelah pemberlakuan *Sarbanes-Oxley Act* pada tahun 2001 akan mempengaruhi kualitas audit. *Sarbanes-Oxley Act* diacu oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 423/kmk.06 /2002 mengatur tentang independensi auditor dan keputusan ini diwajibkan untuk diberlakukan pada tahun 2002. Sanksi yang diberikan apabila tidak memenuhi keputusan tersebut adalah tegas sehingga baik akuntan publik maupun Kantor Akuntan Publik yang mengaudit perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta (BEJ) akan patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi. Peningkatan sikap independensi auditor ini akan mampu meningkatkan kualitas audit, dan citra profesi akuntan public akan dibangun kembali setelah adanya kasus skandal Enron-Anderson tahun 2000. H2 diuji dengan menggunakan *ordinary least square regression*. H2 didukung apabila nilai koefisien dari CASHFLOW adalah negative. Model regresinya adalah sebagai berikut:

$ABSDA = b0 + b1ABSAC + b2DE + b3MKTBKEQ + b4LOSS + b5LTA + b6CHNI + b7CASHFLOW + b8THN$

**Tabel 2**  
**Tabel Pengujian H1**

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step	X1	-.179	.368	.237	1	.627	.836
1(a)	X2	9.374	5.926	2.502	1	.114	11780.840
	X3	-2.253	.980	5.288	1	.021	.105
	X4	18.292	7909.522	.000	1	.998	87951961.563
	X5	.007	.004	3.067	1	.080	1.007
	X6	-2.549	1.555	2.686	1	.101	.078
	X7	1.966	1.729	1.292	1	.256	7.139
	X8	-.013	.036	.137	1	.711	.987
	X9	.745	1.615	.213	1	.645	2.106
	Constant	7.413	10.772	.474	1	.491	1657.115

**Sumber:** Data diolah. Tahun 2006.

Hasil pengolahan untuk persamaan ini adalah:

**Tabel 3**  
**Tabel Pengujian H2**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.291	55.052		.369	.714
	ABSAC	.105	.901	.015	.116	.908
	DE	-6.193	7.613	-.100	-.813	.419
	MKTBKEQ	1.015	1.577	.081	.644	.522
	LOSS	-3.149	6.707	-.068	-.470	.640
	LNTA	-.878	1.624	-.069	-.540	.591
	CHNI	-.846	1.264	-.096	-.669	.506
	CF	-.138	1.486	-.012	-.093	.926
	THN	-.263	5.518	-.006	-.048	.962

a. Dependent Variable: ABSDA

Sumber: Data diolah. Tahun 2006.

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai koefisien CASHFLOW adalah negatif, berarti H2 dalam penelitian ini didukung. Hal ini menunjukkan bahwa independensi auditor setelah pemberlakuan *Sarbanes-Oxley Act* berpengaruh pada *discretionary accruals*. Manajer yang memiliki insentif tertentu sering tergoda untuk mempengaruhi besarnya laba perusahaan dengan cara melakukan rekayasa akrual. Akrual pada dasarnya adalah penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang sah. Sebagian dari akrual yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan (sebagai bagian dari angka laba) bukan akrual yang menjadikan laporan keuangan yang sah tetapi akrual yang digunakan oleh manajer untuk mempengaruhi *stakeholders*. Oleh karena itu, *total accrual* dapat dibedakan menjadi akrual yang wajar dan akrual yang direayasa manajemen. Perusahaan yang mempunyai *abnormal accrual* merupakan *signal* bahwa perusahaan tersebut melakukan *earnings management*. Perusahaan melakukan manajemen laba mempunyai beberapa alasan, yaitu metode akuntansi memberikan peluang kepada manajemen untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan yang berbeda dan melibatkan subjektivitas dalam menyusun estimasi.

Munculnya *Sarbanes-Oxley Act* karena penurunan kredibilitas laporan keuangan, di mana profesi auditor sangat berhubungan dengan opini atas laporan keuangan yang diauditnya. *Sarbanes-Oxley Act* mengatur tentang praktik manajemen dan profesi akuntan sebagai profesi penunjang pasar modal. *Sarbanes-Oxley Act* berfungsi sebagai pengawas dan pengendali profesi akuntan dan kantor akuntan. Setiap kecurangan ataupun skandal yang dilakukan oleh auditor akan diberikan sanksi yang material. Contohnya penutupan KAP Arthur Andersen sehubungan dengan skandal Enron. Enron melakukan manipulasi laba, akan tetapi manipulasi itu ditutup-tutupi oleh Arthur Andersen sehingga kinerja keuangan perusahaan nampak bagus, padahal tidak. Selama waktu yang relatif lama, skandal tersebut terungkap. Hal ini menjadi puncak dari runtuhnya kredibilitas akuntan.

**SIMPULAN DAN SARAN**

**Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa independensi auditor setelah



pemberlakuan *Sarbanase Oxley Act* berpengaruh pada kualitas audit yang berarti H1 dalam penelitian ini didukung. Pengujian H1 menggunakan alat analisis *logistic regression* dan hipotesis didukung karena nilai koefisien X9 (variabel *dummy* tahun) nilainya positif. Selain itu, independensi *auditor* setelah pemberlakuan *Sarbanase Oxley Act* juga berpengaruh pada akrual yang direkayasa yang berarti H2 dalam penelitian ini didukung. Pengujian hipotesis ini menggunakan alat analisis *ordinary least square regression* dan hipotesis didukung karena nilai koefisien X7 (*cash flow*) nilainya negatif.

### Saran

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan. Pertama periode pengamatan yang terlalu pendek, padahal untuk menguji pengaruh dibutuhkan waktu yang relatif panjang. Sehingga diharapkan penelitian berikutnya untuk menambah periode pengamatan karena pemberlakuan *Sarbanase Oxley Act* di Indonesia secara efektif dijalankan pada tahun 2003. Kedua, kualitas audit diukur dengan reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP), padahal masih banyak ukuran kualitas audit yang dapat digunakan, seperti spesialisasi audit karena dimungkinkan dengan adanya spesialisasi audit akan mendorong adanya ketelitian dalam audit sehingga dapat meningkatkan kualitas audit.

### DAFTAR PUSTAKA

- Becker, C. L. De Fond, Jiambalvo and Subramanyam, 1998, The Effect of Audit Quality on Earnings Management, *Contemporary Accounting Research* (Spring): 1-24.
- Bradshaw, M., Richardshon, S., and Sloan, R., 2001, Do Analysts and Auditors Use Information in Accruals?, *Journal of Accounting Review*: 39: 45-74.
- Choi, S., and Jetter, D., 1992, The Effects of Qualified Audit Opinions on Earnings Response Management Buyouts of Public Shareholders, *The Accounting Review*: 61: 400-420.
- DeAngelo, L., 1981, Auditor Size and Audit Quality, *Journal Accounting and Economic* 3 (Desember): 183-199.
- Dechow, P., Sloan, R., and Sweeney, 1995, A Detecting Earnings Management, *The Accounting Review*: 70: 193-225.
- Francis, J. R., and J. Krishnan, 1999, Accounting Accruals and Auditor Reporting Conservatism, *Contemporary Accounting Research* (Spring): 135-165.
- Healvy, P.M., and Wahlen, J.M., 1999, A Review of The Earnings Management Literature and Its Implications for Standard setting, *Accounting Horizon*: 85-107.
- Healy, P., 1985, The Effects of Bonus Schemes on Accounting Decisions, *Journal of Accounting and Economics*: 1: 85-107.
- Hopwood, W., Mckeown, J., and Mutchler, J., 1989, A Reexamination of Auditor versus Model Accuracy Within The Context of The Going Concern Opinion Decision, *Contemporary Accounting Review*: 10: 409-134.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2001, *Standar Profesional Akuntan Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Jones, J. J., 1991, Earnings Management during Import Relief Investigations, *Journal of Accounting Research* (Autumn): 193-228.
- Mautz, R. K., and H.A. Sharaf, 1993, *The Philosophy of Auditing*, 7<sup>th</sup> Edition, United states of America.
- Subramanyam, K., 1996, The Pricing of Discretionary Accruals, *Journal of Accounting and Economics*: 22: 249-281.
- Suharto, Harry, 2004, Dampak *Sarbanes-Oxley Act* terhadap Profesi Akuntan, *Media Akuntansi*, edisi 40.

## **PELAPORAN LABA KOMPREHENSIF DAN IMPLIKASINYA DALAM PRAKTIK**

***Efraim Ferdinan Giri***

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta  
Jalan Seturan Yogyakarta 55281  
Telepon +62 274 486160, 486321, Fax. +62 274 486155  
*E-mail: efraim@stieykpn.ac.id*

### **ABSTRACT**

FASB defined comprehensive income in Statement of Financial Concept 6. Comprehensive income is another way of looking at the asset-liability approach (balance-sheet view) to income. Financial reporting needs to reflect this approach of income because, the traditional approach to income is too narrow. Using asset-liability approach can help financial statement user to understand information income with their own judgment. The difficulty is that focus on measurement of assets and liabilities does not give adequate recognition to the importance of measurement of result operations. This is need to define concept of operating income and to measure the net changes in equity resulting from the remeasurement of assets and liabilities. There are variety of ways to report comprehensive income, such as: a) created total comprehensive income as bottom line of income statement; b) displaying comprehensive income component (CIC) in separate new statement, and c) in a statement of changes in equity. Most of firms in US chose c) format during fiscal years 1997-1999. Firms with negative CIC were more likely to disclose CIC in the statement of stockholders equity, whereas firms with positive CIC more likely to report CIC in the income statement. Foreign currency adjustment represent the largest CIC. Earnings per share would be negatively affected by the inclusion of CIC. The impact of SFAS No. 130 will vary from industry to industry, but foreign currency translations will affect a majority of the multinational firms in most industries. If the objectives of reporting comprehensive

income are met, financial statement users should gain additional insights into a company's activities, which should enable them to better predict future cash flows. Investors and creditors might shift their focus toward comprehensive income and broader income concept should play expanding role in the future financial decisions.

**Keywords:** laba komprehensif, asset-liability approach, revenue-expenses approach, transaction approach, capital maintenance approach, laba akuntansi; laba ekonomi

### **PENDAHULUAN**

Tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai, namun tidak semua informasi yang dibutuhkan tersedia. Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya (PSAK, 2004). FASB menjelaskan bahwa pemakai utama laporan keuangan adalah investor dan kreditor. Dalam hal ini, investor dan kreditor didefinisikan secara luas yang meliputi pihak-pihak yang memiliki tuntutan terhadap



sumberdaya perusahaan, termasuk pihak yang memberi nasihat atau yang mewakili investor dan kreditor (SFAC, No. 1, 1978).

FASB menyatakan bahwa satu set lengkap laporan keuangan sebaiknya menunjukkan posisi keuangan, laba-rugi, laba komprehensif, dan arus kas, serta investasi dan distribusi dari dan kepada investor selama periode tertentu (SFAC, No. 5, 1984).<sup>1</sup> Hal senada dijelaskan juga oleh IAI. Namun, tidak semua komponen informasi keuangan lengkap tersebut disajikan oleh setiap entitas bisnis. FASB telah menyatakan bahwa laporan keuangan yang lengkap harus menunjukkan laba komprehensif periode tertentu. IAI sendiri belum memutuskan perlunya laporan laba komprehensif diwajibkan bagi entitas bisnis di Indonesia. Sejalan dengan pernyataan dalam SFAC No. 5 tersebut, FASB baru dapat merealisasi konsep tersebut setelah 25 tahun berdiri, yaitu dengan menetapkan Statement No. 130 yang mengharuskan perusahaan menyusun laporan laba komprehensif.

Penentuan laba secara wajar telah menjadi tuntutan para pemakai laporan keuangan pada saat ini. Seperti yang diungkap dalam SFAC No. 5, bahwa laba merupakan ukuran kinerja perusahaan selama periode tertentu (SFAC, No. 5, 1984). Lingkungan bisnis perusahaan telah banyak berubah, instrumen keuangan pun telah berkembang semakin kompleks sehingga perubahan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Perusahaan memperoleh sumber dana dari para investor atau kreditor melalui penjualan sekuritas utang dan modal. Pembiayaan semacam ini akan menjadi sesuatu yang biasa. Harga jual beli sekuritas sangat ditentukan oleh kekuatan tarik-menarik antara permintaan dan penawaran sekuritas tersebut di pasar modal. Nilai beli sekuritas dapat berbeda dengan nilai yang para investor (pasar) bersedia membayarnya. Dengan demikian, tidak layak sekuritas tersebut dinilai dengan kos saat pembelian sebab harga pasar tersedia dan terukur secara layak. Naik dan turunnya harga sekuritas mencerminkan nilai yang dikandung sekuritas tersebut, sehingga layak untuk diakui dan dilaporkan. Kondisi ini mengakibatkan instrumen keuangan tertentu yang

tidak dimasukkan sebagai komponen laba saat yang lalu, saat ini kemungkinan besar akan menjadi komponen laba (komprehensif) sehingga perlukah disiapkan laporan keuangan khusus ataukah hanya cukup dengan memodifikasi laporan laba-rugi tradisional saja.

Sebelum FASB dibentuk, APB telah mencanangkan konsep *all-inclusive* dan pelaporan laba komprehensif. Sejak dibentuk tahun 1973, FASB berusaha mendorong penggunaan konsep laba *all-inclusive*. Namun selama 25 tahun FASB justru lebih mendorong penggunaan konsep *current operating income* untuk mengukur laba. Selama waktu itu, banyak item tertentu yang dilaporkan langsung dalam bagian modal dan tidak melalui laporan laba-rugi. Setelah 25 tahun berdiri, FASB menetapkan SFAS No. 130 tentang pelaporan laba komprehensif. Akan tetapi penetapan standar ini lama setelah banyak badan profesi akuntansi di negara-negara lain dan International Accounting Standard Committee (IASC) telah menetapkan dan mengimplementasikan standar pelaporan laba komprehensif.

Di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) belum merasa penting untuk membuat standar akuntansi keuangan yang mengharuskan entitas bisnis melaporkan laba komprehensif. Tidak tertutup kemungkinan telah banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sudah melaksanakan transaksi bisnis yang informasinya mungkin perlu dilaporkan dalam laporan laba komprehensif. Tentu saja pertimbangannya adalah apakah para investor di Indonesia sudah membutuhkan laporan laba komprehensif tersebut?

Sangat penting bagi badan otoritas akuntansi di suatu negara mulai mempertimbangkan pembuatan standar pelaporan laba komprehensif dengan mempelajari berbagai dampak implementasi standar pelaporan laba komprehensif yang dilaksanakan di beberapa negara. Kita dapat belajar banyak dari badan otoritas akuntansi di Amerika Serikat. Pembelajaran ini penting, agar suatu saat pada masa depan ketika IAI akan menyusun standar ini, maka akan menghasilkan standar pelaporan laba komprehensif yang lebih baik dan komprehensif. Ada aspek keperilakuan yang terkait

<sup>1</sup> Satu set laporan keuangan lengkap tidak identik dengan nama laporan keuangan, tetapi satu set laporan keuangan lengkap harus menyediakan berbagai informasi yang seharusnya tersedia.

dalam pelaporan laba komprehensif yang ditunjukkan oleh perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Hal ini berkaitan dengan pemilihan format laporan laba komprehensif yang tepat. Format laporan laba komprehensif yang dipilih sangat erat hubungannya dengan nilai positif atau negatif dari item laba komprehensif yang akan dilaporkan.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, mengapa laporan laba tradisional belum cukup? Dapatkah laba komprehensif menjadi tolok-ukur prestasi suatu entitas? Berbagai konsep yang mendasari penyusunan laporan laba komprehensif? Apa sajakah alternatif penyusunan laporan laba komprehensif? Pertanyaan lain yang perlu dijawab adalah apakah dampak yang ditimbulkan jika perusahaan diharuskan untuk menyusun laporan laba komprehensif?

#### MASALAH DAN PEMBAHASAN

Pertanyaan-pertanyaan yang telah diungkap pada bagian pembahasan di atas merupakan masalah yang akan dibahas lebih rinci dalam bagian ini. Mengapa Pelaporan Laba Tradisional Belum Mencukupi? Pelaporan keuangan, khususnya informasi laba akan menimbulkan konsekuensi ekonomi. Pelaporan laba akan mempengaruhi distribusi kekayaan antarinvestor, menentukan level risiko yang dapat diterima, mempengaruhi tarif informasi modal dalam perekonomian dan menghasilkan realokasi kekayaan antara konsumsi dan investasi dalam perekonomian, serta dapat mempengaruhi bagaimana investasi dialokasikan kepada masing-masing entitas.

Pelaporan laba tradisional dilakukan melalui penyajian laporan laba-rugi. Pelaporan laba bertujuan menyediakan informasi mengenai hasil operasi suatu entitas. Laporan laba-rugi merupakan fokus pelaporan keuangan, sebab memberikan nilai prediksi, mengukur jumlah aliran tunai masa depan, sebagai ukuran efisiensi manajemen, dan sebagai tolok-ukur ketercapaian tujuan manajemen. Namun, pertanyaan yang timbul pada saat ini adalah apakah laporan laba-rugi telah mampu membantu para pemakai mencapai tujuan pelaporan yang telah ditetapkan badan otoritas akuntansi?

Pelaporan laba tradisional menggunakan pendekatan transaksi. Berdasarkan pendekatan

transaksi, laba diakui jika ada bukti pertukaran dengan pihak luar (*arm's-length transactions*). Pendekatan ini mengakui bahwa laba merupakan hasil kesepakatan antara perusahaan dan individu-individu eksternal terhadap unit pelaporan dan penggunaan prinsip realisasi. Prinsip ini menyebutkan bahwa laba sebaiknya diakui saat proses *earnings* selesai, atau secara virtual selesai, atau saat pertukaran telah terjadi. Pertanyaan akan muncul, apakah keuntungan atau kerugian yang disebabkan oleh naik atau turunnya nilai sekuritas perlu diakui atau tidak, sementara belum terjadi pertukaran? Padahal transaksi pertukaran merupakan dasar pertanggungjawaban dan penentuan saat dan jumlah pengakuan pendapatan.

Pelaporan laba tradisional lebih menekankan pada penentuan laba menurut akuntansi daripada laba ekonomi. Laba akuntansi ditentukan dengan pengukuran perubahan dalam aset bersih yang dicatat atau terealisasi tidak termasuk transaksi modal dan dividen. Konsep ini tidak berusaha menempatkan nilai harapan atau perubahan nilai harapan aset dan utang dalam pelaporan laba. Pendekatan ini tidak melaporkan semua informasi yang relevan mengenai entitas bisnis. Schroeder dan Clark (1995, p. 118) mengutip dari Edwards dan Bell mengusulkan prosedur penentuan laba akuntansi ke dalam empat komponen laba, yaitu: (a) *current operating profit*; (b) *realizable cost savings*; (c) *realized cost*; dan (d) *realized capital gain*. Alasan memasukkan item (c) dan (d) adalah agar ada peningkatan kualitas dan isi laporan laba-rugi.

FASB dan APB menggunakan konsep *all-inclusive* sebagai dasar pelaporan laba. Namun, konsep ini secara perlahan telah terkikis. Hal ini terlihat dalam statemen yang dikeluarkan oleh FASB, yaitu: *Statement No. 12, Accounting for Certain Marketable Securities*; *Statement No. 52, Foreign Currency Translation*; *Statement No. 80, Accounting For Future Contracts*; *Statement No. 87, Employee's Accounting For Pensions*; dan *Statement No. 115, Accounting for Certain Investment in Debt and Equity Securities*. Dalam statemen-statement tersebut ada beberapa item laba yang secara langsung dilaporkan pada bagian ekuitas. Hal ini akan mengakibatkan item ekuitas menjadi tempat penampungan informasi-informasi penting mengenai kinerja entitas bisnis (Beresford, Johnson, dan Reither, 1996).

Pelaporan laba berkaitan erat dengan konsep

pengukuran dan pengakuan terhadap pendapatan dan biaya. Pengukuran adalah penentuan angka suatu objek atau kejadian yang akan dicatat. Ini juga merupakan proses perbandingan untuk mendapatkan informasi yang lebih baik untuk membedakan satu alternatif dari alternatif lain dalam suatu situasi pengambilan keputusan. Penggunaan asumsi unit pengukuran nilai nominal mata uang mengakibatkan pengukuran laba menjadi kurang bermanfaat dan kurang dapat diperbandingkan. Hal ini disebabkan karena secara umum daya beli akan selalu berubah.

Pengakuan adalah pencatatan suatu transaksi atau kejadian secara formal, sedangkan realisasi adalah pengkonversian aset bukan tunai menjadi kas atau tuntutan terhadap kas. Konsep realisasi menyebutkan beberapa kriteria, yaitu: (a) pendapatan harus dapat diukur; (b) pengukuran harus diuji oleh transaksi pasar eksternal; dan (c) kejadian penting telah terjadi (Johnson, Reither, dan Swieringa, 1995). Pengakuan pendapatan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepastian terjadinya suatu transaksi. Jika tingkat kepastian suatu transaksi terjadi sangat tinggi, maka pengukuran pendapatan dapat dilakukan sebelum titik penjualan. Jika terjadi sebaliknya, maka pengukuran pendapatan sebaiknya ditunda. Penggunaan pengujian *crucial event* dan pendekatan transaksi dalam pengukuran pendapatan telah menghasilkan laba akuntansi yang mengukur perbedaan antara penjualan produk perusahaan (pendapatan) dan kos yang terjadi dalam produksi dan penjualan produk (biaya). Penggunaan prinsip realisasi menyebabkan pendapatan cenderung lebih diakui pada titik penjualan. Sebenarnya, pengukuran pendapatan dapat dilakukan pada titik penjualan atau sebelum titik penjualan, tergantung pada tingkat kepastian transaksi tertentu.

Prinsip penandingan adalah penting dalam pengukuran pendapatan, sebab konsep ini menjadi dasar konsep laba akrual dan pelaporan secara periodik. Prinsip ini berusaha mempertemukan antara usaha dan hasil. Kos harus dihubungkan dengan pendapatan yang direalisasi pada periode tertentu dengan dasar korelasi antara kos dengan pendapatan yang diakui. Penekanan pada konsep ini menyebabkan pelaporan laba lebih menekankan pada pengukuran langsung terhadap pendapatan dan biaya. Prinsip ini mengakibatkan item-item pendapatan atau keuntungan

yang tidak dapat ditandingkan secara langsung dengan kos dilaporkan langsung ke dalam bagian ekuitas. Dengan demikian, tidak semua komponen laba tercakup dalam laporan laba-rugi tradisional.

Perkembangan bisnis perusahaan telah meningkatkan variasi dan kompleksitas transaksi atau kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh suatu entitas. Kompleksitas bisnis perusahaan ditunjukkan juga dengan munculnya berbagai instrumen-instrumen keuangan baru yang mempengaruhi perhitungan *earn-ing per share* perusahaan, misalnya, obligasi konvertibel, opsi, *right*, waran, *futures*, dan lain-lain. Pelaporan laba tradisional lebih banyak menggunakan ukuran kos historik dalam penentuan biaya yang akan dipertemukan dengan pendapatan. Pemakai laporan keuangan cenderung kurang menyukai pengukuran berdasarkan kos historik, sebab tidak mencerminkan gambaran yang realistik terhadap aset dan utang perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, kemungkinan penyusun standar perlu menetapkan standar yang mendukung pelaporan laba dengan konsep yang sebenarnya telah ditetapkan oleh badan otoritas akuntansi seperti FASB atau IAI, yaitu laba komprehensif.

Laba komprehensif menjadi salah satu ukuran kinerja. FASB mendefinisikan laba komprehensif sebagai perubahan dalam ekuitas (aset bersih) suatu entitas dalam suatu periode yang berasal dari semua transaksi, kejadian atau keadaan yang bukan berasal dari pemilik (SFAC, No. 6, 1985; SFAS No 130, (1997), par. 8). Laba komprehensif tidak mencerminkan investasi dan distribusi dari dan kepada pemilik, tetapi meliputi komponen laba operasi, berbagai tipe penghasilan/keuntungan dan biaya atau kerugian, serta penyesuaian periode sebelumnya. Selain itu termasuk juga item-item laba atau rugi yang disebabkan karena perubahan keadaan lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan keamanan. Masalah utama dalam pelaporan laba adalah adanya item-item pembentuk laba yang belum dimasukkan dalam perhitungan laba tradisional, sebab belum terealisasi. Namun, item-item tersebut menunjukkan nilai substansinya dan ukurannya diakui oleh pemakai informasi keuangan. Tabel 1 menunjukkan beberapa contoh item yang disebabkan karena perubahan kondisi lingkungan, namun belum dimasukkan ke dalam pelaporan laba-rugi perusahaan. Item-item tersebut

dilaporkan langsung pada bagian ekuitas dalam laporan neraca.

Salah satu organisasi pemakai informasi laporan keuangan yang berpengaruh kuat di Amerika Serikat adalah *Association of Investment Management and Research* (AIMR). AIMR telah berusaha mendorong FASB untuk membangun jembatan dari konsep kepada standar untuk pelaporan laba komprehensif. AIMR menyatakan bahwa tidak ada suatu dasar konseptual untuk menghindari laporan laba-rugi dengan langsung melaporkan item-item tertentu ke seksi ekuitas (Johnson, Reither, dan Swieringa, 1995). Seharusnya item-item tersebut dilaporkan dengan dasar konseptual *representational-faithfulness* ke dalam laporan laba-rugi terlebih dahulu. Salah satu alternatif yang digunakan oleh *Accounting Standard Board* (ASB) di Inggris adalah menyajikan laporan total keuntungan dan kerugian yang diakui sebagai laporan laba-rugi kedua untuk mendukung laporan laba-rugi utama (Cope, Johnson dan Reither, 1996). ASB telah menetapkan standar untuk pelaporan keuangan ini sejak tahun 1995. Pelaporan laba komprehensif diharapkan akan memperbaiki kualitas pelaporan keuangan dan kemanfaatannya. Selain itu, akan mendukung peningkatan keterpahaman investor dan kreditor serta pemakai lainnya terhadap laporan keuangan, serta lebih meningkatkan kepercayaan terhadap hasil perbandingan laporan keuangan.

Melalui SFAC No. 5, FASB berusaha menguraikan secara luas konsep pengukuran dengan menjelaskan dan memperkenalkan pendefinisian laba komprehensif sebagai suatu konsep dalam pelaporan laba. Pendefinisian laba komprehensif seperti di atas bertujuan mengikat pendekatan *capital maintenance* dan pendekatan tradisional akuntansi mengenai laba. Secara konseptual pelaporan laba komprehensif telah ditetapkan oleh FASB dalam SFAC No. 5, disebutkan bahwa laporan keuangan sebaiknya berisi laporan berikut: (a) posisi keuangan akhir periode; (b) laba atau rugi periode; (c) *comprehensive income* selama suatu periode; (d) aliran kas selama periode tertentu; dan (e) investasi dan distribusi oleh/kepada investor selama periode tertentu. Dengan demikian, ada dua ukuran yang dapat digunakan untuk menilai prestasi suatu entitas, yaitu ukuran laba bersih dan *comprehensive income*. Laba bersih lebih mengukur kinerja transaksional suatu entitas bisnis, sedangkan laba

komprehensif lebih fokus pada kinerja pertumbuhan ekonomi suatu entitas bisnis. Hubungan antara laba bersih, *earnings* dan *comprehensive income* ditunjukkan dalam Tabel 2.

Konsep Penyusunan Pelaporan Laba Komprehensif. Ada beberapa konsep penting yang mendasari penyusunan laporan laba komprehensif, yaitu konsep *all-inclusive*; pendekatan aset-utang dan pendapatan-biaya; konsep laba akuntansi dan laba ekonomi; dan pendekatan pengukuran laba. Konsep *All-Inclusive* dan Laporan Laba Komprehensif. Jika kita berbicara tentang laba komprehensif, maka konsep laba *all-inclusive* merupakan suatu alasan untuk mendukung pengembangan konsep laba komprehensif. Penciptaan istilah laba komprehensif dan konsep laba *all-inclusive* merupakan hasil dari suatu keinginan untuk menggabungkan dan melaporkan semua perubahan ekuitas yang bukan bersumber dari pemilik selama suatu periode tertentu dalam satu laporan akhir yang terintegrasi (Robinson, 1991). Namun FASB, telah membuat suatu pengecualian tertentu dalam konsep laba *all-inclusive* dengan menentukan agar item-item tertentu dilaporkan langsung sebagai ekuitas dalam neraca. Sebagai contoh item-item pada Tabel 1.

Pendekatan Aset-Utang Versus Pendekatan Pendapatan-Biaya. Laporan laba-rugi, *earnings*, dan laba komprehensif memiliki elemen-elemen yang sebagian besar serupa. Perhitungan laba komprehensif mencerminkan perubahan dalam aset bersih, namun perhitungan laba bersih dan *earnings* lebih mencerminkan aspek penandingan pendapatan dengan biaya. Penentuan laba komprehensif menunjukkan penerapan pendekatan aset-utang, sedangkan penentuan laba bersih menunjukkan penerapan pendekatan pendapatan-biaya. Secara konseptual, laba yang dihasilkan suatu entitas melekat pada setiap pos laporan keuangan dan tidak hanya pada pos pendapatan dan biaya. Oleh karena itu, penentuan laba secara wajar sebaiknya menggunakan pendekatan aset-utang, sebab dapat mencerminkan semua perubahan dalam setiap pos laporan keuangan pembentuk laba.

Hunt (1994) mengutip dari seksi *1000 CICA Handbook*, menyebutkan bahwa pada tahun 1991, komite standar akuntansi (*Accounting Standards Committee*) telah menyetujui rerangka konseptual

**Tabel 1**  
**Perubahan Ekuitas Bukan dari Pemilik yang Dikeluarkan dari Perhitungan Laba Bersih**

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyesuaian translasi mata-uang asing (SFAS, No. 52)<sup>1</sup></li> <li>• Laba atau rugi transaksi mata-uang asing yang didesain sebagai <i>hedging</i> investasi pada entitas luar negeri (SFAS, No. 52, par. 20a)<sup>2</sup></li> <li>• Laba atau rugi transaksi mata-uang asing antarperusahaan yang bersifat investasi jangka panjang (SFAS, No. 52, par. 20b)</li> <li>• Perubahan nilai pasar kontrak masa depan yang memenuhi kriteria sebagai <i>hedging</i> aset yang dilaporkan sebesar nilai wajar, kecuali kejadian khusus yang diuraikan dalam paragraf 11, meminta agar laba atau rugi diakui lebih awal, sebab tidak memiliki keterhubungan yang erat (SFAS, No. 80, par. 5)</li> <li>• Jumlah lebih kewajiban pension tambahan terhadap kos jasa yang belum diakui (SFAS, No. 87, par. 37)<sup>3</sup></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keuntungan dan kerugian pemilikan sekuritas utang berkategori tersedia untuk dijual (SFAS, No. 115, par. 13)</li> <li>• Keuntungan dan kerugian pemilikan yang belum diakui dari sekuritas utang berkategori <i>held-to-maturity</i> yang ditransfer menjadi kategori tersedia untuk dijual (SFAS, No. 115, par 15c)</li> <li>• Kenaikan nilai wajar sekuritas berkategori tersedia untuk dijual (<i>TUD</i>) yang sebelumnya diakui sebagai kerugian (SFAS, No. 115, par 16)<sup>6</sup></li> <li>• Penurunan nilai wajar sekuritas berkategori tersedia untuk dijual (<i>TUD</i>)--jika bukan merupakan kerugian sementara yang sebelumnya diakui sebagai kerugian (SFAS, No. 115, par. 16)</li> </ul> |
|---|---|

**Sumber:** Beresford, Dennis R; L. Todd Johnson; and Cherri L. Reither (1996). "Is a Second Income Statement Needed?" *Journal of Accountancy*, Volume 181, pp. 69-72.

pelaporan keuangan yang terutama didasarkan pada sudut pandang neraca (pendekatan aset-utang). Dalam seksi tersebut dijelaskan definisi aset, utang, ekuitas, pendapatan, biaya, keuntungan dan kerugian. Definisi elemen laporan keuangan tersebut, semuanya diturunkan dari definisi dasar aset dan utang. Dengan demikian, kerangka konseptual memfokuskan pada sumber ekonomi dan kewajiban (utang) yang dilaporkan dalam neraca, dan perubahan di dalam sumber ekonomi serta utang dalam laporan laba-rugi. Menurut Hunt (1994), secara substansi definisi elemen-elemen laporan keuangan dalam Section 1000 tersebut sama dengan yang didefinisikan oleh SFAC No. 6 yang dikeluarkan oleh FASB dalam tahun 1985. Kesukaran dari pendekatan aset-utang adalah adanya pihak yang

percaya bahwa pengukuran aset dan utang tidak memberikan pengakuan yang memadai mengenai pentingnya pengukuran hasil operasi. Untuk itu, mungkin diperlukan pendefinisian kembali elemen-elemen pembentuk laba atau rugi. SFAC No. 5 menyatakan bahwa laba (*earnings*) adalah: *is measure of entity performance during a period. It measures the extent to which asset inflow (revenue and gain) associated with cash-to-cash cycles substantially completed during the period exceed asset outflows (expenses and losses) associated, directly or indirectly, with the same cycles.*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendapatan dan keuntungan atau biaya dan kerugian diukur berdasarkan aliran masuk dan aliran keluar aset,

<sup>1</sup> Serupa dengan SAK No. 11, "Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing," par. 14., 1994.

<sup>2</sup> Serupa dengan SAK No. 10, "Transaksi Dalam Mata Uang Asing," par. 16 dan 17, 1994.

<sup>5</sup> Serupa dengan SAK No. 18, "Akuntansi Dana Pension," par. 27, 1994.

<sup>6</sup> Serupa dengan SAK No. 50, "Akuntansi Investasi Efek Tertentu," par. 14, 1998.



sehingga jika tidak ada aliran masuk atau keluar aset, maka tidak ada pendapatan atau biaya dan kerugian atau keuntungan yang dapat diukur dan perlu diakui. Di bagian lain, SFAC No. 5 juga menjelaskan bahwa *current-price* dapat diakui, jika cukup relevan dan dapat dipercaya (SFAC No. 5, 1984). Harga pasar sekuritas mencerminkan nilai yang dikandung dalam sekuritas dan para investor serta kreditor sangat berkepentingan terhadap informasi terkini daripada informasi masa lalu, sehingga nilai tersebut dapat diakui. Oleh karena itu, pernyataan di atas sebaiknya didefinisikan kembali agar selaras dengan definisi pendapatan, biaya, keuntungan dan kerugian dalam SFAC No. 6, 1985. Definisi dalam SFAC No. 6 menunjukkan bahwa pendapatan, biaya, keuntungan dan kerugian didefinisikan sebagai perubahan dalam aset dan/atau utang. Dengan demikian, definisi tersebut sangat dekat hubungannya dengan pendekatan aset-utang dan neraca tidak sekadar menjadi tempat menyimpan nilai residu dalam proses penentuan laba.

Dalam praktik saat ini, pendekatan yang digunakan dalam pengukuran laba lebih menekankan pada prinsip penandingan (*matching principle*), yaitu dengan melakukan pengukuran langsung terhadap item-item pendapatan dan biaya. Berdasarkan pendekatan ini, laba merupakan sisa hasil pengukuran pendapatan dan biaya. Pendekatan ini mendukung penerapan dasar akrual dalam pengakuan pendapatan dan biaya. Perubahan dalam aset dan utang diakui, hanya jika terjadi transaksi dan perubahan nilai di pasar atau sekadar perubahan nilai harapan yang tidak perlu diakui. Pendekatan ini pada tingkat sintaksis dikenal dengan pendekatan transaksi (*transaction approach*).

Item-item mendasar dari pendekatan aset-utang akan membantu mengarahkan FASB untuk memfokuskan pada laporan laba komprehensif menjadi lebih bermanfaat. Tabel 3 menunjukkan berbagai hal yang mungkin menjadi aspek penting bagi FASB untuk menerapkan konsep laba komprehensif. Peningkatan kompleksitas transaksi bisnis, diversitas transaksi bisnis, dan meningkatnya kepiawaian para pemakai

Tabel 2  
Hubungan Antara Laba Bersih, *Earnings*, dan Laba K

Keterangan	Lab Bersih	Ear
Pendapatan	Rp100	
Biaya	-80	
Lab tidak biasa	3	
Lab dari operasi dilanjutkan	23	
Rugi penghentian bisnis		
Lab dari operasi segmen dihentikan	Rp10	Rp10
Rugi dari segmen dihentikan	-12	-12
Lab sebelum item ekstraordiner dan Pengaruh kumulatif perubahan prinsip akuntansi	21	
Rugi ekstraordiner	-6	-6
Rugi penyesuaian perubahan prinsip akuntansi	-2	-
<i>Earnings</i>		
<i>Lab bersih</i>	Rp13	
Rugi penyesuaian perubahan prinsip akuntansi		
Perubahan modal_sumber bukan pemilik		
<i>Lab komprehensif</i>		

Sumber: SFAC No. 5, Recognition and Measurement in Financial Statements of Business Enterprises.

informasi keuangan serta dukungan teknologi informasi yang semakin canggih, merupakan dasar argumentasi yang cukup kuat untuk menerapkan pendekatan aset-utang dalam penentuan laba perusahaan.

Investor, kreditor, dan pemakai lainnya menggunakan informasi keuangan dengan berbagai cara. Entitas bisnis perlu melaporkan informasi berkualitas dalam format yang dapat membantu para pemakai memanfaatkan laporan keuangan untuk berbagai tujuan. Pelaporan laba komprehensif merupakan salah satu cara membantu para pemakai melakukan evaluasi, prediksi, penetapan, konfirmasi, perubahan dan penolakan suatu alternatif tindakan tertentu. Kemanfaatan pelaporan laba sangat tergantung pada keterpahaman tentang siapakah penerima laba. Penjelasan mengenai konsep laba akan membantu menjawab pertanyaan tersebut.

Perbandingan Antara Konsep Laba Akuntansi dan Konsep Laba Ekonomi. Menurut Mitchell (1995), laporan laba-rugi memiliki peranan penting dalam dunia bisnis saat ini. Akan tetapi ada dua pandangan yang

berbeda mengenai konsep laba, yaitu konsep laba menurut akuntan dan menurut ahli ekonomi (Tabel 4). Mitchell juga setuju bahwa konsep *income* didasari oleh konsep: (a) *going concern*; (b) *objectivity*; (c) *realization of revenues*; dan (d) *monetary unit*. Pada akhirnya, Mitchell membuat konklusi bahwa akuntan dan ekonom memiliki tujuan yang berbeda dalam penentuan laba. Akuntan memperhatikan apa yang telah terjadi atau historis, sedangkan ekonom lebih memperhatikan sesuatu yang akan terjadi atau futuris. Akuntan memandang laba harus direalisasi dan dikuantifikasi secara objektif. Ekonom memandang laba dapat diakui setelah ada penetapan secara layak untuk menjaga agar modal tetap. Konsep ekonomi didasarkan pada pertimbangan subjektif dan akuntansi bersifat objektif (Mitchell, 1995, p. 137). Jika perusahaan melaporkan laba komprehensif, maka pelaporan laba akan mendekati pelaporan laba menurut ekonom. Pelaporan laba juga berhubungan erat dengan konsep yang menentukan penerima laba perusahaan, yaitu konsep laba.

**Tabel 3**  
**Perbandingan Antara Pendekatan Aset -Utang dan Pendekatan Pendapatan – Biaya**

<b>Pendekatan Aset-Utang</b>	<b>Pendekatan Pendapatan-Biaya</b>
1. Laba sebagai ukuran perubahan dalam aset bersih pada periode tertentu	1. Laba sebagai ukuran langsung keefektifan perusahaan menggunakan input untuk mendapatkan atau menjual output dan tidak perlu dibatasi oleh perubahan dalam sumber ekonomi bersih
2. Laba tergantung pada definisi aset dan utang	2. Laba tergantung pada pendefinisian dan penandingan pendapatan dan biaya
3. Beban ditangguhkan akan diakui hanya pada saat mereka merupakan sumber ekonomi atau utang	3. Beban ditangguhkan dan cadangan kemungkinan dihasilkan dari pengukuran laba periodik
4. Informasi laba lebih bermanfaat bagi investor dan kreditor	4. Informasi laba lebih bermanfaat bagi investor dan kreditor
5. Tidak ada satu pun pendekatan berhubungan otomatis dengan atribut-atribut ukuran tertentu	5. Sama.
6. Tidak meminta semua item sumber ekonomi dan kewajiban yang diakui sebagai aset dan utang atau semua perubahan dalam aset dan utang tercakup dalam laba. Laba membatasi elemen-elemen laporan keuangan yang dipilih mewakili aset bersih dan transaksi atau kejadian yang mengubah atribut aset bersih	6. Laba merupakan perbedaan antara pendapatan dan biaya, mungkin juga termasuk item-item lain yang perlu dipertemukan, sekalipun mereka tidak mewakili perubahan dalam aset bersih



Siapakah Penerima Laba? Ada tiga konsep laba, yaitu (a) *physic-income*; (b) *real-income*; dan (c) *money-income*. *Physic-income* berkaitan dengan pemuasan keinginan manusia. Konsep ini sukar untuk diukur sebab keinginan manusia sulit untuk dikuantifikasikan. *Real income* berhubungan dengan kenaikan kekayaan ekonomi dan keuntungan individu, sedangkan *money income* sangat mudah diukur, namun konsep ini tidak mempertimbangkan perubahan nilai dalam unit moneter (Schroeder dan Clark, 1995, p. 115). Para ekonom lebih memfokuskan pada penentuan seberapa baik kondisi (*better-off*) suatu entitas selama ini. Mereka lebih menekankan pada penentuan *real income*. Schroeder dan Clark mengutip dari Hicksian menyebutkan bahwa:

*the purpose of income calculation in practical affairs is to give people an indication of the amount which they can consume without impoverishing themselves. Following out this idea it would seem that we ought to define a man's income as the maximum value which he can consume during a week, and still expect to be as well off at the end of the week as he was at the beginning.*

Konsep ini lebih menekankan pada laba individual. Jika diterapkan dalam penentuan laba perusahaan, maka kata konsumsi diubah menjadi

distribusi. Konsep laba ini digunakan oleh suatu entitas untuk mengukur *net-asset* awal dan akhir periode dalam periode yang sama dengan mengeluarkan transaksi dividen dan modal. Laba bisnis adalah perubahan yang terjadi dalam nilai aset bersih. Konsep ini lebih dikenal akuntan sebagai *capital maintenance concept*. Konsep ini menyebutkan bahwa tidak ada laba yang diakui sampai dengan ditahan dan diperoleh kembali. Ada dua kritik yang berhubungan dengan konsep ini, yaitu bersifat subyektif dan faktor diskonto tidak diketahui. Bersifat subjektif, sebab aliran masuk aset masa depan dan aliran keluar utang masa depan tidak diketahui secara pasti.

Untuk menentukan siapa yang tepat sebagai penerima laba, maka perlu mempertimbangkan konsep laba yang diterapkan. Hendriksen mengusulkan, laba bersih disajikan dengan dasar konsep berikut: (a) *value-added*; (b) *enterprises net income*; (c) *net income to investor*; (d) *net income to stockholders*; dan (e) *net income to residual equity holders* (Hendriksen, 1982, pp.163-167).

*Value added concepts* memandang laba sebagai *current market price* (termasuk *unrealized holding gains*) produk perusahaan dikurangi kos barang dan jasa eksternal yang dihubungkan dengan pemerolehan produk (sebagai kenaikan harga pasar

**Tabel 4**  
**Perbandingan Konsep Laba Akuntansi dan Ekonomi**

Konsep Laba Akuntansi	Konsep Laba Ekonomi
1. Lebih sempit dibandingkan dengan konsep laba ekonomi	1. Lebih luas dibandingkan dengan konsep laba akuntansi (domain akuntan adalah ekonom)
2. Laba bisnis adalah sisa penandingan pendapatan direalisasi dengan kos yang terkonsumsi	2. Laba bisnis adalah jumlah kekayaan yang dapat didistribusikan selama periode tertentu tanpa menurunkan prospek masa depan entitas di bawah kondisi periode awal.
3. <i>Net worth</i> = aset - utang	3. <i>Net worth</i> = nilai kini aset tetap + nilai tunai penerimaan masa depan - utang
4. Tidak mempertimbangkan perubahan level harga atau <i>holding gains</i> (apresiasi aset tetap)	4. Mempertimbangkan level perubahan harga dan <i>holding gains</i>
<b>Lab akuntansi</b> dapat dihitung menuju laba ekonomi dengan cara sebagai berikut:	
= <i>unrealized changes</i> nilai aset tetap selama periode tertentu. Nilai lebih diakui sebagai <b>depresiasi</b> dan <b>markdown</b> sediaan.	
(-) jumlah terealisasi periode tertentu; perubahan nilai aset tetap pada periode sebelumnya yang tidak diakui pada periode kini	
(+) Perubahan dalam nilai aset tak berujud selama periode tertentu	
= <b>Laba Ekonomi</b>	

produk). Pihak lain selain investor dan kreditor memiliki hak terhadap laba perusahaan, misal karyawan dan pemerintah. Kelemahan konsep ini adalah memasukkan pemerintah sebagai penerima laba.

Dalam perusahaan modern terdapat dua kegiatan utama, yaitu operasi dan pembelanjaan. *Enterprise net income* ditentukan dari aspek operasi saja dan semua kegiatan pembelanjaan serta pembayaran lain yang diperlukan oleh kegiatan operasi dipandang sebagai *return on investment* daripada sebagai beban. Konsep ini konsisten dengan konsep entitas yang memandang perusahaan sebagai entitas terpisah dari pemilik dan tidak dipengaruhi oleh sumber pembiayaan modal. Pajak laba perusahaan dipandang sebagai distribusi laba kepada pemerintah. Artinya, pemerintah dipandang sebagai penerima laba. Laba dihitung dengan mengurangi pendapatan dari biaya (selain pajak laba dan bunga). Kritik terhadap konsep ini adalah mengeluarkan aspek karyawan dan memasukkan aspek pemerintah sebagai penerima laba.

Konsep *net income to investor* juga konsisten dengan teori entitas. Menurut konsep ini, pemegang saham dan kreditor jangka panjang dipandang sebagai investor perusahaan. Laba dilaporkan sebagai pendapatan dikurangi biaya-biaya (kecuali biaya bunga). Perbedaan antara konsep *enterprise net income* dengan *net income to investor* adalah perlakuan terhadap pajak. Berdasarkan konsep ini pajak dipandang sebagai biaya. Berdasarkan konsep *net income to shareholders*, pemilik perusahaan merupakan penerima laba. Laba bersih dihitung berdasarkan konsep propriori. Konsep ini menjelaskan laba sebagai kewajiban kepada pemegang saham preferen dan saham biasa. Berdasarkan konsep ini laba bersih ditentukan dengan mengurangi semua biaya dari pendapatan.

Berdasarkan konsep *net income to residual equity holders*, laba tersedia bagi pemegang saham biasa yang dipandang sebagai figur penting. Semua biaya termasuk dividen pemegang saham preferen dianggap sebagai biaya dan dikurangkan dari pendapatan untuk menentukan laba. Konsep ini konsisten dengan teori pembelanjaan, yang menyatakan bahwa model *earnings* berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan saham biasa. Berdasarkan konsep ini, laba bagi pemegang saham merupakan fungsi keterkelolaan sumber daya

perusahaan secara baik, sedangkan sumber modal lain seperti obligasi secara umum kurang berisiko, sebab aliran laba dijamin terus-menerus dan tidak tergantung pada kesuksesan perusahaan. Ringkasan konsep laba ditunjukkan pada Tabel 5.

Jika ditinjau dari tujuan pelaporan laba-rugi bisnis perusahaan, maka pelaporan laba-rugi terutama ditekankan pada penyediaan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor dan pemakai lainnya. Berdasarkan kutipan tersebut, FASB menyebutkan secara langsung mengenai investor dan kreditor, sedangkan pemakai lainnya bisa siapa saja yang berkepentingan. FASB ingin menunjukkan bahwa pemakai utama informasi akuntansi adalah investor dan kreditor. Namun, apakah kreditor dipandang sebagai penerima laba merupakan persoalan lain. Investor dan kreditor berkepentingan terhadap informasi laba sebagai indikasi kemampuan perusahaan saat ini dan masa yang akan datang dalam penciptaan aliran kas. Selain itu untuk mengevaluasi kinerja manajemen, menentukan *earnings power*, memprediksi laba masa depan, menentukan risiko, mengkonfirmasi, mengubah dan menolak ketentuan dan prediksi yang telah direncanakan sebelumnya. Pembahasan mengenai konsep laba bertujuan meningkatkan relevansi pelaporan laba, yaitu mengenai kualitas laba. Kualitas laba menyangkut kelengkapan, informasi laba yang menyangkut ketertaksiran dan ketepatan waktu pelaporannya.

Laba bersih bagi pemegang saham merupakan gambaran laba yang sering dipublikasikan. Namun, masing-masing konsep laba memiliki kemanfaatan pada kondisi tertentu. Misal, VAC lebih bermanfaat dalam penentuan *gross national product*; konsep ENI dan NII bermanfaat dalam penentuan laba perusahaan; NIREH merupakan dasar penentuan laba per lembar saham (Schroeder dan Clark, 1995, p. 135).

Pendekatan Pengukuran Laba. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pengukuran laba, *Transaction Approach (TA)* dan *Capital Maintenance Approach (CMA)*. Berdasarkan TA laba merupakan hasil pengukuran langsung pendapatan dan biaya selama periode tertentu. Semua perubahan nilai perusahaan yang tidak disebabkan oleh transaksi bukan merupakan laba perusahaan. Laba yang dihasilkan berdasarkan prinsip akuntansi yang berterima umum lebih didasarkan pada TA.

**Tabel 5**  
**Perhitungan Laba Berdasarkan Konsep-Konsep Laba**

<b>Komponen Perhitungan Laba</b>	<b>Konsep Laba</b>	<b>Penerima Laba</b>
Harga pasar (kini) produk		
(-) Kos barang dihasilkan dan biaya-biaya eksternal lainnya	= <i>Value Added Concept (VAC)</i>	Karyawan, pemilik, kreditor, dan pemerintah
(-) <i>Unrealized holding gains</i> dan pembayaran kpd karyawan	= <i>Enterprise net income (ENI)</i>	Pemegang saham dan obligasi, serta pemerintah.
(-) <i>Income taxes</i>	= <i>Net income to investor (NII)</i>	Pemegang saham dan obligasi.
(-) Biaya bunga	= <i>Net income to shareholders (NIS)</i>	Pemegang saham biasa dan preferen
(-) Dividen saham preferen	= <i>Net income to residual equity holders (NIREH)</i>	Pemegang saham biasa

Berdasarkan CMA, laba merupakan perbedaan antara aset bersih awal periode dengan aset bersih akhir periode, tidak termasuk kontribusi dan distribusi dari dan kepada pemilik selama suatu periode tertentu. Konsep ini memasukkan semua perubahan nilai perusahaan selama periode tertentu. Konsep ini merupakan wujud tanggapan ketidakpuasan para pemakai terhadap penggunaan kos historik sebagai atribut pengukuran yang dominan (Gamble, 1995).

Ada dua konsep utama dalam CMA, yaitu *financial capital concept (FCC)* dan *physical capital concept (PCC)*. Kedua konsep ini dapat diukur dalam satuan moneter dan atau daya beli konstan (*constant purchasing power*) (SFAC, No. 6, 1985). Perbedaan utama ke dua konsep ini terletak pada perlakuan terhadap dampak perubahan harga aset dan utang selama suatu periode. Berdasarkan FCC, dampak pengaruh perubahan harga diakui sebagai *holding-gains* dan dilaporkan sebagai *return-on-capital*. Jika konsep yang digunakan adalah PCC, maka dampak tersebut diakui sebagai "*capital maintenance adjustment*," dan dimasukkan secara langsung ke dalam seksi ekuitas. Pendefinisian laba komprehensif di atas merupakan *return on financial capital*.

Keseluruhan laporan keuangan didasarkan pada konsep pemupukan modal keuangan (*financial capital maintenance*) (SFAC No. 5, 1985, par. 45). Dengan demikian, perubahan harga seharusnya dilaporkan terlebih dahulu dalam laporan laba-rugi

sebelum dimasukkan ke bagian ekuitas. Hal ini tidak konsisten, sebab adanya perubahan harga (sekuritas atau aset tertentu) yang sudah terukur dan diakui keberadaannya tidak dilaporkan dahulu dalam laporan laba-rugi, tetapi langsung dimasukkan ke dalam bagian ekuitas (neraca). Kelemahan masing-masing konsep di atas adalah penggunaan standar pengukuran. Konsep *capital maintenance* tidak akan cukup bermanfaat, jika nilai rupiah tidak stabil. Laporan laba komprehensif mencerminkan CMA. Pelaporan item laba komprehensif mendorong transparansi informasi kinerja perusahaan yang selama ini dilaporkan dalam bagian modal pemegang saham.

Alternatif Solusi Pelaporan Laba. Hunt (1994) menyatakan bahwa laporan laba-rugi terlalu dibebani, sehingga perlu didefinisikan kembali agar mampu mengkomunikasikan hasil operasi secara lebih baik. Kemampuan laporan laba-rugi untuk memprediksi kemampuan entitas menghasilkan laba dan menciptakan aliran kas untuk memenuhi kewajiban dan menghasilkan return pada masa depan juga memunculkan tanda tanya. Penggunaan kos historis sebagai alat ukur instrumen keuangan merupakan salah satu kelemahan laporan laba-rugi tradisional. Salah satu kemungkinan solusi untuk menyelesaikan konflik di atas dibutuhkan dua tahapan. Pertama, mendefinisikan kembali konsep laba operasi. Kedua, mengukur perubahan bersih dalam ekuitas yang dihasilkan dari pengukuran kembali aset dan utang

(Hunt, 1994). Tahapan kedua dapat meliputi laba dan rugi yang belum direalisasi untuk item-item jangka panjang, seperti penurunan nilai aset modal, pertukaran mata uang asing, pengukuran nilai wajar instrumen keuangan tertentu. Dalam usaha untuk mengkomunikasikan hasil usaha secara lebih baik, kemungkinan ada baiknya entitas mengungkap sub-total laporan laba-rugi yang dijelaskan sebagai laba operasi atau laba dari operasi kontinu. Hal ini berkaitan dengan masalah konsistensi pelaporan semua item yang dihasilkan dari siklus bisnis normal entitas (SFAC No. 6, 1985).

Untuk mengakomodasi konflik dan ketidakmampuan laporan laba-rugi konvensional saat ini dan dalam mengantisipasi kompleksitas bisnis, alternatif pelaporan laba dapat dilaksanakan dengan meminta penentu standar menetapkan laporan keuangan keempat yang ditempatkan di antara laporan laba-rugi dan neraca (Johnson, Reither, dan Swieringa, 1995). Robinson (1991) juga menyatakan bahwa kompleksitas dan diversitas transaksi bisnis menyebabkan pelaporan laba perlu menggunakan pendekatan aset-utang. Robinson juga menyarankan penyusunan laporan keuangan untuk laba komprehensif yang melaporkan perubahan dalam aset bersih dan dilaporkan dalam format *multiple subtotals*.

AIMR percaya bahwa laba komprehensif dapat membuat pelaporan keuangan lebih baik dan lebih bermanfaat. Salah satu sebab adalah kemampuannya melaporkan perubahan nilai wajar sekuritas diperdagangkan dan semua perubahan dalam ekuitas yang saat ini dilaporkan sebagai ekuitas. Namun, pengukuran laba tradisional menciptakan dilema. Pengukuran instrumen keuangan dengan nilai wajar menghasilkan pengakuan terhadap keuntungan atau kerugian bagi instrumen tersebut, namun pelaporannya tidak perlu dilaporkan dalam laporan laba-rugi tradisional, kecuali FASB menetapkan item-item tertentu boleh dimasukkan dalam laporan laba-rugi atau dalam laporan laba komprehensif. Oleh karena itu dibutuhkan alat baru untuk melaporkan item-item yang dicontohkan pada Tabel 1.

Format Pelaporan Laba Komprehensif. Format laporan laba komprehensif telah diusulkan oleh beberapa ahli. Salah satunya adalah format laporan laba komprehensif yang diusulkan oleh Baresford et

al (1991). Laba komprehensif hasil bisnis perusahaan meliputi, (a) transaksi pertukaran bisnis perusahaan dengan entitas lain; (b) usaha produktif perusahaan; dan (c) perubahan harga, kasualitas, dan pengaruh interaksi antara perusahaan dengan lingkungan ekonomi, hukum, sosial, politik, dan fisik (SFAC No. 6, 1985). Komponen laba komprehensif dapat dilaporkan dengan menggunakan beberapa format, yaitu (a) pendekatan satu laporan, yaitu menciptakan suatu laporan baru yang diawali dengan hasil perhitungan laba bersih tradisional dan diakhiri dengan laba komprehensif sebagai *bottom-line*; (b) pendekatan dua laporan, yaitu menyajikan laporan laba-rugi dalam laporan terpisah, kemudian total laba atau rugi bersih disajikan sebagai bagian awal dari laporan laba komprehensif (*bottom line*); dan (c) pendekatan laporan perubahan modal, kolom pertama untuk laporan laba tradisional, kolom kedua untuk komponen laba komprehensif, dan kolom ketiga kombinasi keduanya. Format (a) tetap berusaha menjaga komponen laporan laba-rugi tradisional. Format (b) tidak memerlukan penciptaan laporan baru. Format (c) memberikan keuntungan, yaitu dapat diperbandingkan (Beresford, Johnson, dan Reither, 1991). Usulan format Baresford et al. (1991) ini sesuai dengan alternatif pelaporan laba komprehensif yang diatur dalam SFAS No. 130 (FASB, 1997).

Dengan pelaporan keuangan seperti yang diusulkan tersebut akan meningkatkan keterpahaman para pemakai laporan keuangan, sebab item-item laba yang secara langsung dilaporkan dalam ekuitas akan dilaporkan dalam laporan laba komprehensif yang lebih formal dan terorganisasi. Ilustrasi dan contoh pelaporan laba komprehensif ditunjukkan pada Tabel 6

Sebagai ilustrasi, pada tanggal 1 Januari 1996 PT Avis memiliki uang tunai (kas) dan saham biasa masing-masing senilai Rp250.000. Pada tanggal tersebut PT Avis tidak memiliki aset yang lain, kewajiban, atau ekuitas. Pada tanggal 2 Januari 1996, PT Avis membeli sekuritas modal secara tunai Rp250.000 yang diklasifikasikan sebagai *available for sale (AFS)*. Pada tanggal 30 Juni 1996, PT Avis menjual 40% sekuritas dan merealisasi laba sebagai berikut:

Nilai wajar sekuritas AFS yang laku terjual	Rp110.000
(-) Kos sekuritas terjual	100.000
Laba direalisasi	Rp 10.000

Selama tahun 1996, PT. Avis tidak melakukan transaksi yang berkaitan dengan sekuritas yang dimilikinya. PT Avis menerima dividen sebesar Rp15.000,- Pada tanggal 31 Desember 1996, portofolio PT Avis diketahui sebagai berikut:

Nilai wajar sekuritas saham	Rp170.000
(-): Kos sekuritas saham	150.000
Laba Belum Direalisasi	Rp 20.000

**Tabel 6**  
**Pelaporan Laba Komprehensif**

**(a) Pendekatan satu laporan**

**Laporan Laba-Rugi dan Laba Komprehensif**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 1996**

Pendapatan-Pendapatan, Biaya-Biaya, dan lain-lain		
Pendapatan Dividen		Rp15.000
Laba Direalisasi dari Investasi Sekuritas		<u>10.000</u>
<b>Laba Bersih</b>		<b>Rp25.000</b>
Total Keuntungan Selama Periode 1996	Rp30.000	
(-) Laba Direalisasi	<u>(10.000)</u>	<u>20.000</u>
<b>Laba Komprehensif</b>		<b>Rp45.000</b>

**(b) Pendekatan Dua Laporan**

**Laporan Laba-Rugi**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 1996**

Pendapatan-Pendapatan, Biaya-Biaya, dan lain-lain		
Pendapatan Dividen		Rp15.000
Laba Direalisasi dari Investasi Sekuritas		<u>10.000</u>
<b>Laba Bersih</b>		<b>Rp25.000</b>

**Laporan Laba Komprehensif**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 1996**

Laba Bersih		Rp25.000
Total Keuntungan Selama Periode 1996	Rp30.000	
(-) Laba Direalisasi	<u>(10.000)</u>	<u>20.000</u>
Laba Komprehensif		Rp45.000

**(c) Pendekatan Laporan Perubahan Modal 1**

**Laporan Perubahan Modal Pemegang Saham**  
**Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 1996**

	Modal Saham	Laba Ditahan	Laba Komprehensif terakumulasi	Total
Saldo awal	Rp250.000			Rp250.000
(+): Laba Bersih		Rp25.000		25.000
Lain-Lain			<u>Rp20.000</u>	<u>20.000</u>
Saldo Akhir	Rp250.000	Rp25.000	Rp20.000	Rp295.000

SFAS No. 130 memberi tiga pilihan pendekatan penyajian laporan laba komprehensif, 1) pendekatan satu laporan, yaitu item-item laporan laba-rugi digabung dengan item laba komprehensif; 2) pendekatan dua laporan, menyajikan secara terpisah komponen laba-rugi dan komponen laba komprehensif; atau 3) pendekatan laporan perubahan modal, yaitu laporan perubahan modal pemegang saham (bisa menggunakan format kolom atau format laporan)

Aspek Keperilakuan Dalam Pelaporan Laba Komprehensif. Bhamornsiri and Wiggins (2001) melakukan analisis terhadap perusahaan S&P 100 selama tahun fiskal dari 1997-1999. Hasil analisis menunjukkan 76 persen perusahaan menggunakan format modal pemegang saham (pendekatan c) untuk melaporkan item-item laba komprehensif dan hanya sebagian kecil yang menggunakan format a (4%) dan b (15%). Campbell et al. (1999), menyatakan bahwa perusahaan cenderung melaporkan item laba komprehensif negatif dalam laporan perubahan modal, sedangkan item laba komprehensif positif dalam laporan laba-rugi atau laporan laba komprehensif yang terpisah dari laba-rugi. 60 persen laba per saham (LPS) perusahaan akan menurun karena melaporkan item laba komprehensif dan 35 persen LPS perusahaan berpengaruh positif karena melaporkan item laba komprehensif. Beberapa perusahaan mengalami perubahan LPS lebih dari 100 persen.

FASB lebih mendorong perusahaan untuk menyajikan item laba komprehensif dalam laporan terpisah (Wilson and Walter, 1998). Pelaporan laba komprehensif tentu saja akan memberikan pengaruh yang signifikan kepada pemakai laporan keuangan.

(d) Pendekatan Laporan Perubahan Modal 2:

Pemakai akan lebih mudah menganalisis kinerja keuangan melalui pelaporan laba komprehensif. Item-item laba komprehensif yang tadinya disembunyikan dalam bagian modal pemegang saham, sekarang

dilaporkan dalam laporan keuangan terpisah dan jelas terlihat. Item laba komprehensif akan menonjol dan setara dengan informasi laporan laba bersih. Akan tetapi, pelaporan laba bersih dan laba komprehensif juga dapat menimbulkan kebingungan dalam laporan keuangan perusahaan.

Dengan demikian ada dua ukuran kinerja yang dilaporkan dalam laporan laba komprehensif, maka *bottom line* laba bersih yang dilaporkan akan berbeda. Jika perbedaan tersebut cukup signifikan, diharapkan pembuat keputusan akan bereaksi secara berbeda dalam mengevaluasi kinerja suatu perusahaan. Berdasarkan sampel yang dipilih dari 100 perusahaan publik terbesar menurut Wall Street Journal, September 1997, ada 15 perusahaan yang laba bersihnya menurun dan sembilan perusahaan yang labanya menaik setelah melaporkan laba komprehensif untuk tahun 1996. General Motors merupakan salah satu perusahaan yang laba bersihnya turun sebesar 64,1%

Laporan Perubahan Modal Pemegang Saham Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 1996	
Saham Biasa 1/1/1996	Rp2
Saham Biasa diterbitkan	Rp2
Saham Biasa 31/12/1996	( Rp
Laba Ditahan 1/1/1996	Rp2
Laba bersih tahun 1996	
Dividen dibagikan	
Laba Ditahan 31/12/1996	
Agio saham biasa 31/12/1996	
Laba Komprehensif Terakumulasi	
Total Pemegang Saham 31/12/1996	



dan Citibank adalah salah satu perusahaan yang laba bersihnya naik sebesar 18,3% (Schmidt, 1999). Dua faktor yang paling berpengaruh signifikan menyebabkan laba bersih perusahaan menaik atau menurun adalah rugi penyesuaian translasi mata uang asing dan rugi sekuritas belum direalisasi (Schmidt, 1999). Pelaporan laba komprehensif lebih banyak berpengaruh negatif daripada berpengaruh positif terhadap laba bersih (Raw and Walsh, 1999). Rugi penyesuaian translasi mata uang asing dilaporkan sebanyak 80 persen sampel, 30-35 persen melaporkan kewajiban pensiun dan laba-rugi belum direalisasi dilaporkan sebesar 45-55 persen (Bhamornsiri and Wiggins, 1999). Hasil ini juga sama dengan yang ditemukan oleh Raw and Walsh (1999).

Pengaruh Laporan Laba Komprehensif Terhadap Industri. Perusahaan-perusahaan di US telah menerapkan standar yang dikeluarkan oleh FASB, yaitu SFAS No. 130 tentang pelaporan laba komprehensif sejak Juni tahun 1997. Menurut SFAS No. 130, laporan laba komprehensif mencakup dua komponen, yaitu: laba bersih dan laba komprehensif. Motivasi FASB dengan standar ini adalah untuk menaikkan visibilitas komponen laba komprehensif yang sebelumnya tidak dilaporkan melalui laporan laba rugi, yaitu: penyesuaian translasi mata uang asing (*Foreign Currency Translation Adjustments*), laba dan rugi belum direalisasi atas investasi sekuritas utang dan modal yang diklasifikasi sebagai *available for sale (unrealized gains and losses on investment in debt and equity securities classified as available for-sale)*, dan penyesuaian kewajiban pensiun minimum tambahan (*additional minimum pension liability adjustments*) (Rao and Walsh, 1999).

Rao dan Walsh (1999) meneliti pengaruh SFAS No. 130 terhadap pelaporan keuangan industri di US. SFAS No. 130 akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan multinasional besar. Menurut Rao dan Walsh (1999), SFAS No. 130 akan berpengaruh melalui tiga cara, yaitu: pertama, jika mata uang fungsional perusahaan adalah mata uang asing dan perusahaan menggunakan *current rate method*, dan penyesuaian translasi akan dilaporkan dalam laporan laba komprehensif. SFAS No. 130 tidak akan memengaruhi laporan laba komprehensif jika perusahaan menggunakan *temporal method*, sebab penyesuaian akan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Kedua, jika perusahaan memiliki pos laba-rugi belum direalisasi

dari investasi dalam sekuritas utang dan modal yang diklasifikasikan sebagai "*available-for-sale*" berdasarkan SFAS No. 115, maka laba rugi belum direalisasi tersebut akan dilaporkan sebagai *Other Comprehensive Income*. Ketiga, jika perusahaan memiliki kewajiban pensiun minimum berdasarkan SFAS No. 87, dimana item tersebut sebelumnya diakui dalam bagian modal pemegang saham, kenaikan (kenurunan) atas jumlah tersebut akan dilaporkan dalam *Other Comprehensive Income*.

Menurut Rao dan Walsh (1999), SFAS No. 130 tidak akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang mensponsori rencana pensiun kontribusi pasti (*defined contribution pension plans*) atau perusahaan-perusahaan yang mensponsori rencana pensiun manfaat pasti (*defined benefit pension plans*) yang didanai secara penuh atau *over funded*. Perusahaan-perusahaan diwajibkan melaporkan item laba komprehensif dalam laporan keuangan interim. Namun, perusahaan tidak diharuskan menyajikan setiap item secara terpisah.

Rao dan Walsh (1999) mengasumsikan bahwa perusahaan-perusahaan akan banyak yang memilih menyajikan laporan laba komprehensif dengan menggunakan format pertama dan kedua, sebab dua format tersebut akan mencapai tujuan utama pelaporan laba komprehensif secara benar dengan menonjolkan angka laba komprehensif dan laba bersih secara setara. Namun Rao dan Walsh tidak melihat motivasi lain dari pemilihan metoda pelaporan laba komprehensif tersebut.

Dampak potensial yang paling signifikan dari perbandingan antara laba bersih tradisional dan laba komprehensif total yang diatur dalam SFAS No. 130 akan dirasakan oleh perusahaan-perusahaan dalam 11 industri. Perusahaan-perusahaan multinasional menduduki ranking sepuluh besar dalam industri yang paling dominan terpengaruh. Peningkatan ini dilakukan oleh Fortune Magazine pada April 1998 (*annual Fortune 500 ranking* berdasarkan pendapatan total).

Informasi laba komprehensif seharusnya dipergunakan secara hati-hati. Dampak negatif dari pelaporan item laba komprehensif sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab manajemen, sebab manajemen hanya memiliki sedikit kontrol terhadap item negatif tersebut. Pelaporan laba komprehensif



telah mendorong pengakuan kesetaraan informasi item laba komprehensif dengan laba bersih. Pelaporan laba komprehensif telah berusaha menunjukkan adanya risiko bisnis dalam pengevaluasian kinerja perusahaan. Harapannya adalah setiap perusahaan akan mengadopsi format laporan laba komprehensif untuk meningkatkan keterpahaman dan keterbandingan informasi laba-rugi dan neraca di antara perusahaan-perusahaan.

## SIMPULAN

Diversitas dan kompleksitas transaksi bisnis yang dilaksanakan entitas-entitas ekonomi saat ini menyebabkan munculnya berbagai instrumen keuangan baru. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa instrumen keuangan tersebut memiliki kemampuan menjelaskan kinerja perusahaan. Laporan keuangan seharusnya dapat mencerminkan nilai perusahaan. Ada tiga item laporan keuangan penting yang menjelaskan kinerja perusahaan, yaitu laba rugi belum direalisasi, kewajiban pensiun minimal, dan laba-rugi translasi mata uang asing. Ketika laporan laba komprehensif belum wajib disusun, item-item ini dilaporkan langsung dalam neraca pada bagian modal. Dengan demikian, nilai negatif tiga item tersebut dapat disembunyikan pada bagian modal, sehingga tidak akan mempengaruhi ukuran kinerja perusahaan. Item-item tersebut seharusnya dilaporkan terlebih dahulu dalam suatu laporan kinerja, seperti laporan laba-rugi atau laporan terpisah yang disebut laporan laba komprehensif.

Konsep yang ditetapkan oleh FASB mengenai definisi aset-utang, pendapatan, biaya, keuntungan, dan kerugian telah menggunakan pendekatan aset-utang, sehingga jika FASB menetapkan suatu standar agar setiap entitas melaporkan laba komprehensif, maka informasi tersebut telah mengarah dan mendekati pelaporan laba ekonomi. Laba komprehensif dapat dilaporkan dengan menggunakan beberapa alternatif format, yaitu: (a) menciptakan suatu laporan baru yang diawali dengan hasil perhitungan laba bersih tradisional dan diakhiri dengan laba komprehensif sebagai *bottom-line*; (b) menayangkan laporan laba-rugi sebagai subtotal dan laba komprehensif sebagai total final; dan (c) pendekatan laporan perubahan modal. Pendekatan pelaporan yang akan dipilih

tergantung pada komponen laba komprehensif apakah negatif ataukah positif.

Laporan laba komprehensif dapat memberikan beberapa manfaat berikut (a) menyajikan informasi keuangan yang lebih baik dan bermanfaat; (b) menaikkan keterpahaman investor dan kreditor dan pemakai lainnya terhadap laporan keuangan; dan (c) meningkatkan keterpercayaan terhadap hasil perbandingan laporan keuangan. Tulisan ini hanya ingin menguraikan landasan konseptual dan sedikit permasalahan serta solusi mengenai pelaporan laba. Namun, masih banyak masalah yang perlu dijawab untuk menerapkan pelaporan ini, misalnya (a) haruskah laba komprehensif per lembar saham dilaporkan? dan (b) haruskah laba ditahan dilaporkan dengan format yang dipakai saat ini? Jika perusahaan telah melaporkan laba komprehensif, investor dan kreditor mungkin perlu menggeser perspektif mereka terhadap pelaporan laba rugi kepada laba komprehensif. Laporan laba komprehensif lebih menunjukkan ukuran kinerja yang lebih luas. Ukuran kinerja yang lebih luas mungkin akan berperan penting dalam pembuatan keputusan keuangan masa depan (Bhamornsiri and Wiggins, 2001).

Jika suatu saat IAI akan menyusun standar tentang laba komprehensif akan lebih baik bagi IAI untuk mempelajari dampak pelaporan laba komprehensif dari negara-negara lain yang sudah menetapkan standar pelaporan laba komprehensif, seperti di Amerika Serikat. IAI juga perlu mempertimbangkan hasil penelitian penting mengenai penyusunan laporan laba komprehensif di beberapa negara. Misalnya format modal pemegang saham (pendekatan c) cenderung digunakan untuk melaporkan item laba komprehensif negatif dan laporan laba-rugi atau laporan laba komprehensif digunakan untuk melaporkan item laba komprehensif positif. FASB lebih mendorong perusahaan untuk menyajikan item laba komprehensif dalam laporan terpisah atau menggunakan format (a) atau (b). (Wilson and Walter, 1998). Rao dan Walsh (1999) mengasumsikan bahwa perusahaan-perusahaan akan banyak yang memilih menyajikan laporan laba komprehensif dengan menggunakan format (a) atau (b), sebab dua format tersebut akan mendorong pencapaian tujuan utama pelaporan laba komprehensif secara benar dengan menonjolkan angka laba komprehensif dan laba bersih

secara setara.

Pelaporan laba komprehensif akan memberikan pengaruh yang signifikan kepada pemakai laporan keuangan. Pemakai informasi laporan keuangan akan lebih mudah menganalisis kinerja keuangan melalui pelaporan laba komprehensif. Dua faktor yang paling berpengaruh signifikan menyebabkan laba bersih perusahaan menaik atau menurun adalah rugi penyesuaian translasi mata uang asing dan rugi sekuritas belum direalisasi (Schmidt, 1999). Pelaporan laba komprehensif lebih banyak berpengaruh negatif daripada berpengaruh positif terhadap laba bersih (Raw and Walsh, 1999). Rugi penyesuaian translasi mata uang asing dilaporkan sebanyak 80 persen sampel, 30-35 persen melaporkan kewajiban pensiun dan laba-rugi belum direalisasi dilaporkan sebesar 45-55 persen (Bhamornsiri and Wiggins, 1999; Raw and Walsh, 1999).

Dampak potensial yang paling signifikan dari perbandingan antara laba bersih tradisional dan laba komprehensif total yang diatur dalam SFAS No. 130 akan dirasakan oleh perusahaan-perusahaan dalam 11 industri. Perusahaan-perusahaan multinasional menduduki ranking sepuluh besar dalam industri yang paling dominan terpengaruh (Fortune Magazine, April 1998). Informasi laba komprehensif seharusnya dipergunakan secara hati-hati. Dampak negatif dari pelaporan item laba komprehensif sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab manajemen, sebab manajemen hanya memiliki sedikit kontrol terhadap item negatif tersebut. SFAS No. 130 mencerminkan pengakuan adanya kesetaraan informasi item laba komprehensif dengan laba bersih. SFAS No. 130 telah berusaha menunjukkan adanya risiko bisnis dalam pengevaluasian kinerja perusahaan. Harapannya adalah setiap perusahaan akan mengadopsi format laporan laba komprehensif yang dapat meningkatkan keterpahaman dan keterbandingan informasi laba-rugi dan neraca di antara perusahaan-perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bhamornsiri, Sak and Wiggins, Casper, (2001). Comprehensive Income Disclosures. *The CPA Journal*. 71, 10, pp. 54-56.
- Beresford, Dennis R; Johnson, L. Todd, and Reither, Cheri L. (1996). "Is a Second Income Statement Needed?" *Journal of Accountancy*, Vol. 181, pp. 69-72.
- Cope Anthony T.; Johnson L Todd; and Reither Cheri L. (1996). "The Call for Reporting Comprehensive Income." *Financial Analyst Journal*, Vol. 52, pp. 7-12.
- FASB (1978). Statement of Financial Accounting Concepts No. 1, *Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises*. Stamford-Connecticut: FAF.
- FASB (1984). Statement of Financial Accounting Concepts No. 5, *Recognition and Measurement in Financial Statements of Business Enterprises*. Stamford-Connecticut: FAF.
- FASB (1985). Statement of Financial Accounting Concepts No. 6, *Elements of Financial Statements*. Stamford-Connecticut: FAF.
- FASB (1997). Statement of Financial Accounting Standards No. 130, *Reporting Comprehensive Income*. Stamford-Connecticut: FAF.
- Fortune 500 ranked by industry (1998, April 27). *Fortune*, 137, F-30.
- Gamble, George O. (1995). "Concepts of Capital Maintenance." in *Accounting Theory: Text and Readings*. Ed. Schroeder, Richard G and Myrtle Clark. Fifth Edition. New-York: John Wiley & Sons.
- Hendriksen, Eldon S. (1982). *Accounting Theory*. Fourth Edition. Homewood, Ill.: Richard D. Irwin.

Hunt, Cally.(1994). "The Overboured Income Statement." *CA Magazine*, Vol. 127, pp. 53-54.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2004). *Standar Akuntansi Keuangan (SAK)*. Jakarta: Salemba Empat.

Johnson, L. Todd; Cheri L. Reither, and Robert J. Swieringa (1995). "Commentary: Toward Reporting Comprehensive Income." *Accounting Horizon*, Vol. 9, pp. 129-37.

Mitchell, Bert N. (1995). "A Comparison Of Accounting and Economic Concepts of Business Income." in *Accounting Theory : Text and Readings*. Ed. Schroeder, Richard G. and Myrtle Clark. Fifth Edition. New-York: John Wiley & Sons.

Rao, Arundhati and Walsh, Robert J. (1999). Impact of "reporting comprehensive income" on large multinational firms. *Southern Business Review*. 25, 1, pp. 22-30.

Robinson, Loudell E. (1991). "The Time Has Come to Report Comprehensive Income." *Accounting Horizon*, Vol. 5, pp. 107-12.

Schroeder, Richard G. and Clark Myrtle (1995). *Accounting Theory: Text and Readings*. Fifth Edition. New-York: John Wiley & Sons.

Schmidt, Richard J. (1999). The Impact of Report Comprehensive Income." *Ohio CPA Journal*, 58, 1, pp. 50-52.

Wilson, Arlette C. and Waters Gary. (1998). Reporting Comprehensive Income. *The National Public Accountant*. 43, 1, pp. 43-46.

## **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN SUKARELA OLEH PERUSAHAAN MULTINASIONAL DI INDONESIA**

*Endang Kiswara*

Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro  
Jalan Erlangga Tengah Nomor 17, Semarang 50241  
Telepon +62 24 81 229 20208, Fax. +62 24 8414747  
*E-mail: enara\_uk@yahoo.co.id atau enara.HK@gmail.com*

### **ABSTRACT**

Prior to Meek et al. (1995), this research concerned the factors impact voluntary disclosure by multinational corporations in Indonesia. Moreover, the variables of public ownership, company base and size of the directors were added. This study compares the information content of 59 annual reports of multinational corporations. The findings provide support for the hypothesis that variables of company base, and industrial base affected voluntary disclosures in the annual financial reporting of going public multinational corporations in Indonesia. Statistics significance at 0,05 and 0,1, but simultaneously all variables were significance at the determinant value of 32,3%. Outcomes of this research clarified the effect of all variables simultaneously to the annual voluntary disclosures. The findings also suggest that, for multinational corporations, the market perceives the announcement of the voluntary disclosure as less credible relative to that mandatory issuance. This could be because the practice of reporting voluntary disclosure isn't under the BAPEPAM's authoritative guidance, which brings consistency and comparability in that kind of reporting.

**Keywords:** voluntary disclosures, factors influenced, multinational corporations (MNCs)

### **PENDAHULUAN**

*Statements of Financial Accounting Concepts* No. 1 Paragraf 7 menyatakan bahwa manajemen dapat menyampaikan informasi kepada pihak-pihak di luar perusahaan melalui pelaporan keuangan. Informasi tersebut diungkapkan karena dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berwenang, pengatur kebijakan, atau karena manajemen mempertimbangkan kegunaannya untuk pihak-pihak di luar perusahaan dan pengungkapannya bersifat sukarela. Salah satu media utamanya adalah melalui laporan tahunan yang mengkomunikasikan kondisi keuangan dan informasi lainnya kepada pemegang saham, kreditur, dan *stakeholders* atau calon *stakeholders* lainnya. Laporan tersebut juga menjadi alat utama bagi para manajer untuk menunjukkan keefektifan pencapaian tujuan dan untuk melaksanakan fungsi pertanggungjawaban dalam organisasi.

Kualitas informasi tercermin dari luas pengungkapan dalam laporan tahunan yang diterbitkan perusahaan. Pengungkapan dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Peraturan mengenai pengungkapan informasi dalam laporan tahunan di Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu melalui Surat Keputusan Ketua

Bapepam No. Kep-38/PM/1996. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan melebihi dari yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku dan merupakan pilihan bebas manajemen perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk pembuatan keputusan oleh para pemakai laporan tahunannya (Meek, dkk, 1995).

Perusahaan mempunyai kepentingan untuk memberikan pengungkapan secara memadai karena perusahaan saling bersaing antara satu dengan yang lain di pasar modal dalam jenis sekuritas, termin dan imbal hasil yang ditawarkan. Sementara itu terdapat ketidakpastian mengenai kualitas perusahaan dan sekuritasnya, sehingga investor membutuhkan informasi untuk menilai perusahaan dan mengambil keputusan. Perusahaan memenuhi kebutuhan tersebut sebagian melalui pemberian informasi secara sukarela (Foster, 1986 dalam Meek, dkk, 1995).

Dalam mengambil keputusan melakukan pengungkapan, perusahaan hendaknya memperhatikan manfaat dan biaya yang ditimbulkan akibat melakukan pengungkapan. Manfaat yang didapat adalah diperolehnya biaya modal yang rendah dan dipahaminya risiko investasi. Sementara biaya pengungkapan sukarela berupa seluruh biaya yang berhubungan langsung atau tidak langsung terhadap penerbitan laporan sukarela.

Luas pengungkapan antara perusahaan dalam industri satu dengan industri lainnya berbeda-beda. Perbedaan ini dipicu oleh kandungan risiko masing-masing industri yang berbeda dan masing-masing industri memiliki karakteristik yang berbeda. Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela dalam konteks internasional telah dilakukan oleh Meek dkk (1995). Meek dkk (1995) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan multinasional di Amerika Serikat, Inggris dan Benua Eropa berdasarkan 3 (tiga) tipe informasi, yaitu informasi strategis, informasi keuangan dan informasi non keuangan. Penelitian dilakukan terhadap 226 buah sampel laporan tahunan perusahaan multinasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *size*, *region*, *listing status*, dan industri merupakan faktor-faktor yang penting dalam menjelaskan luas pengungkapan sukarela secara keseluruhan.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten, sehingga dalam penelitian ini akan dikembangkan faktor-faktor yang diharapkan berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan. Variabel yang meliputi rasio-rasio keuangan dikeluarkan dari faktor-faktor yang diteliti, karena berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-38/PM/1996, rasio-rasio keuangan merupakan bagian dari ikhtisar data keuangan penting yang wajib diungkapkan oleh perusahaan. Variabel-variabel yang akan diteliti antara lain, *size* perusahaan, proporsi kepemilikan saham oleh publik, basis perusahaan, tipe industri, dan ukuran dewan komisaris.

Penelitian ini merupakan replikasi atas penelitian yang telah dilakukan oleh Meek dkk (1995). Beberapa perbedaan mendasar dari penelitian sebelumnya, antara lain pertama, obyek penelitian ini adalah perusahaan multinasional di Indonesia yang terdaftar di BEJ, sedangkan pada penelitian Meek dkk (1995) obyek penelitian adalah perusahaan multinasional di USA, Inggris, dan Benua Eropa. Alasan pemilihan obyek penelitian pada perusahaan multinasional, karena perusahaan ini ikut serta atau terlibat dalam pasar modal internasional sehingga secara signifikan akan memberikan pengungkapan lebih luas daripada perusahaan domestik untuk menunjukkan kemampuannya dalam memperoleh tambahan investasi dana di pasar modal internasional.

Kedua, laporan tahunan yang akan diteliti adalah laporan tahun 2005 dengan pertimbangan untuk memperoleh data relatif terbaru sehingga dapat diperoleh tingkat independensi yang tinggi. Penelitian sebelumnya menggunakan laporan tahunan 1989 sebagai laporan terakhir yang telah diterbitkan pada saat penelitian tersebut dilakukan. Ketiga, dalam penelitian ini akan diuji kembali faktor-faktor yang ditemukan berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela menurut penelitian Meek dkk (1995), yaitu variabel *size* perusahaan dan tipe industri. Di samping itu, penelitian ini mencoba merekomendasikan variabel proporsi kepemilikan saham oleh publik, basis perusahaan, dan ukuran dewan komisaris yang diharapkan berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Alasan penambahan variabel, karena masih rendahnya *R square* ( $R^2$ ) dalam penelitian sebelumnya, yaitu sebesar 35%. Hal ini menunjukkan masih adanya

variabel-variabel lain yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela tetapi belum tercakup dalam model.

Keempat, sampel dalam penelitian ini lebih sedikit daripada penelitian sebelumnya yaitu 59 perusahaan. Hal ini disebabkan karena jumlah perusahaan dalam kelompok sampel yang memang lebih sedikit yaitu hanya pada perusahaan multinasional di Indonesia yang *listing* di BEJ. Sedangkan penelitian sebelumnya meneliti perusahaan multinasional di tiga negara besar yaitu USA, Inggris, dan Benua Eropa (Prancis, Jerman dan Belanda) sehingga sampel yang diteliti lebih banyak, yaitu 226 perusahaan.

#### MATERIDAN METODE PENELITIAN

Teori yang mendasari penelitian ini adalah *agency theory* yang dikenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976). *Agency theory* mempelajari hubungan antara dua pihak yaitu prinsipal dan agen, prinsipal sebagai pemilik, *shareholders*, atasan, atau penjamin agen dan agen sebagai manajer, kepala departemen, bawahan, atau orang yang dijamin oleh prinsipal. Dalam hubungan antara prinsipal dan agen, prinsipal mengajak agen untuk melayani kepentingan prinsipal dan mendelegasikan wewenang kepada agen dalam mengambil keputusan.

Fakta yang menarik dalam *agency theory* adalah informasi tidak terdistribusi secara memadai antara agen dan prinsipal dan atau prinsipal tidak mungkin secara langsung mengamati usaha agen, karena prinsipal tidak selalu berada di perusahaan sehingga informasi yang dimiliki lebih sedikit dibanding agen yang terjun langsung mengelola perusahaan. Hal ini dapat menimbulkan asimetri informasi (ketidakseimbangan informasi) yang dapat memicu terjadinya kegagalan pasar atau ketidakefisienan pasar (Baiman, 1990).

SFAC No. 1 Paragraf 50 menyatakan bahwa pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik (pemegang saham) atas pemakaian sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada prinsipal, agen akan berusaha memenuhi seluruh keinginan pihak prinsipal, dalam hal ini melalui pengungkapan sukarela yang lebih luas. Tujuan

pengungkapan menurut Belkaoui (2002) adalah 1) Untuk menjelaskan *item-item* yang diakui dan memberikan pengukuran yang relevan atas *item-item* tersebut di luar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan; 2) Untuk menjelaskan *item-item* yang diakui dan untuk memberikan pengukuran yang bermanfaat bagi *item-item* tersebut; 3) Untuk memberikan informasi yang akan membantu investor dan kreditor menilai risiko dan potensi dari *item-item* yang diakui dan tidak diakui; 4) Untuk memberikan informasi penting yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan melakukan perbandingan dalam satu tahun dan di antara beberapa tahun; 5) Untuk memberikan informasi mengenai arus kas masuk atau keluar di masa depan; dan 6) Untuk membantu para investor menilai pengembalian dari investasi mereka.

Laporan tahunan merupakan salah satu alat penting untuk mengatasi masalah keagenan antara manajemen dan pemilik dan sebagai upaya untuk mengurangi asimetri informasi. Sebagai pihak yang tidak mengikuti kegiatan operasi perusahaan sehari-hari, pemilik menginginkan pengungkapan informasi yang seluas-luasnya, sedangkan manajemen akan selektif dalam melakukan pengungkapan informasi karena pengungkapan informasi mengandung biaya. Manajemen hanya akan mengungkapkan informasi jika manfaat yang diperoleh melebihi biaya pengungkapan tersebut.

Berdasarkan adanya perbedaan kepentingan dan manfaat potensial yang ditimbulkan atau diperoleh, menimbulkan banyak pendapat dalam hal sejauh mana luas pengungkapan laporan keuangan seharusnya dilakukan. Menurut SFAC No. 1, terdapat tiga konsep mengenai pengungkapan sehubungan dengan kualitas laporan keuangan yaitu *adiquate disclosure*, *fair disclosure*, dan *full disclosure*. Konsep yang sering digunakan dari ketiga konsep tersebut adalah *adequate disclosure*, yaitu pengungkapan minimum yang harus dilakukan agar laporan keuangan tidak menyesatkan. Sementara kedua konsep yang lain, *fair disclosure* sangat menitikberatkan pada faktor etis agar dapat memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi semua pemakai laporan keuangan dan *full disclosure* merupakan pengungkapan atas semua informasi yang relevan, tetapi jarang digunakan. *Full disclosure* jarang digunakan karena adanya pertimbangan-pertimbangan manajemen antara lain menimbulkan



informasi yang berlebihan atau melimpah sehingga tidak bisa dikatakan layak, memicu sering munculnya interpretasi yang salah dari pembaca, dan tersebarnya informasi penting sehingga melemahkan strategi bersaing perusahaan.

Kualitas informasi keuangan ditunjukkan dengan seberapa luas tingkat pengungkapan informasi (laporan keuangan). Hingga sekarang belum ada indikator yang dijadikan ukuran kualitas laporan keuangan. Salah satu cara untuk mengukur luas pengungkapan yang digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya adalah berdasarkan daftar *item* pengungkapan yang dimuat dalam laporan tahunan. Pengukuran luas pengungkapan dengan cara tersebut ada dua macam, yaitu memberi bobot kepada setiap *item* dan tanpa memberi bobot kepada setiap *item*.

Menurut Surat Keputusan Bapepam No. Kep-38/PM/1996, terdapat dua jenis pengungkapan yaitu *mandatory disclosure* merupakan pengungkapan minimum yang harus diungkapkan atau diwajibkan oleh peraturan dan *voluntary disclosure* merupakan pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh peraturan, dimana perusahaan bebas memilih jenis informasi yang akan diungkapkan yang sekiranya dapat mendukung dalam pengambilan keputusan. Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh peraturan. Meek dkk (1995), menunjukkan bahwa pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan bebas, dimana manajemen dapat memilih jenis informasi yang akan diungkapkan yang dipandang relevan untuk pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang memakainya.

Luas pengungkapan dalam penelitian ini diukur dengan daftar *item* pengungkapan sukarela tanpa pembobotan yang didasarkan pada dua alasan, yaitu laporan tahunan disampaikan untuk tujuan umum, sehingga terdapat kemungkinan suatu *item* informasi penting untuk pihak tertentu tetapi tidak penting untuk pihak lain dan untuk menghindari subyektivitas pemberian bobot kepada masing-masing *item* informasi. Healy dan Palepu (1993) menyatakan bahwa pengungkapan sukarela merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kredibilitas pelaporan keuangan perusahaan dan untuk membantu investor dalam memahami strategi bisnis perusahaan. Pengungkapan-pengungkapan ini meliputi: gambaran strategi perusahaan dalam jangka panjang, indikator-indikator

non-keuangan penting yang bermanfaat untuk keefektifan implementasi strategi perusahaan dan berguna dalam membahas hubungan antara indikator-indikator tersebut dengan laba yang akan datang.

Menurut Belkaoui (2002), beberapa elemen laporan yang diungkapkan secara sukarela yang dirancang agar sesuai dengan keputusan yang digunakan oleh para pengguna dalam membuat proyeksi nilai perusahaan atau menilai prospek pembayaran kembali pinjaman perusahaan, antara lain data keuangan dan non keuangan, analisis manajemen terhadap data keuangan dan non keuangan, informasi yang menatap masa depan, informasi mengenai manajemen dan para pemegang saham, dan latar belakang perusahaan. Hasil penelitian Meek dkk (1995) menunjukkan bahwa tipe industri merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela. Dalam penelitian ini perusahaan sampel terdiri atas 11 industri sesuai dengan daftar perusahaan di BEJ. Berdasarkan 11 industri tersebut diklasifikasikan lagi menjadi dua kelompok industri, yaitu industri manufaktur (industri *basic and chemical, miscellaneous, consumer goods*) dan industri non manufaktur (industri *agriculture, mining, property and real estate, infrastructure, trade and service, bank, multifinance, insurance*). Hal ini sesuai dengan penelitian dari Cooke (1989) yang menyatakan bahwa jenis industri manufaktur memiliki tingkat pengungkapan lebih luas dibanding jenis industri lain. Industri jasa keuangan (bank) tidak dikeluarkan dari satuan analisis karena untuk membangun kepercayaan masyarakat diperlukan keterbukaan informasi, sehingga informasi tersebut tidak hanya dibutuhkan oleh investor tetapi juga untuk masyarakat yang lebih luas termasuk di dalamnya para nasabah dan calon nasabah. Oleh karena itu, industri jasa keuangan juga mempunyai kepentingan untuk memberikan pengungkapan dalam laporan tahunannya.

Pada dasarnya, pemodal tidak dapat secara langsung berhubungan dengan pengelola terutama pada perusahaan besar. Dalam keadaan inilah hubungan kelembagaan dewan komisaris diperlukan sebagai suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap pihak pengelola agar kepentingan perseroan dapat terjamin. Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggungjawab untuk

memonitor tindakan manajemen puncak. Alasan yang mendasari dewan komisaris dapat mempengaruhi luas pengungkapan sukarela adalah karena dewan komisaris merupakan pelaksana tertinggi dalam perusahaan.

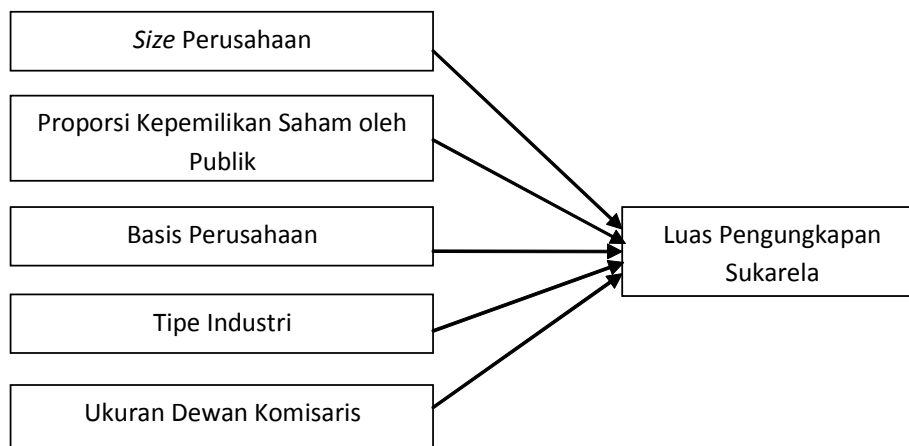
Cukup banyak penelitian mengenai pengungkapan sukarela yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Penelitian dalam lingkup internasional antara lain dilakukan oleh Meek dkk (1995) yang meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan multinasional dari USA, Inggris, dan Benua Eropa. Faktor-faktor yang diuji adalah *size*, *region of origin*, industri, *leverage*, *multinationality*, *profitability*, dan internasional status *listing*. Pengungkapan sukarela diukur dengan indeks yang terdiri atas 85 *item* informasi yang dikelompokkan ke dalam informasi strategik, informasi keuangan, dan informasi non keuangan. Peneliti melakukan pengelompokan informasi dengan alasan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya tidak membedakan *item-item* pengungkapan sukarela. Di samping itu, penentuan indeks skor pengungkapan sukarela dilakukan tanpa memberi bobot kepada setiap *item*, sehingga hal ini bersifat dikotomi. Penelitian dilakukan terhadap 226 buah sampel perusahaan multinasional yang berasal dari USA sebanyak 116, Inggris sebanyak 64, dan Benua Eropa: sebanyak 46. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *size*, *region*, *listing status*, dan

industri merupakan faktor-faktor yang penting dalam menjelaskan luas pengungkapan sukarela secara keseluruhan.

Berdasarkan pada kerangka pemikiran dan tinjauan pustaka di atas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

- H<sub>1</sub>:** *Size* perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan.
- H<sub>2</sub>:** Proporsi kepemilikan saham oleh publik berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan.
- H<sub>3</sub>:** Basis perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan.
- H<sub>4</sub>:** Tipe industri berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan.
- H<sub>5</sub>:** Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah luas pengungkapan sukarela, sedangkan variabel independen yang akan diuji dalam penelitian ini adalah variabel *size* perusahaan, proporsi kepemilikan saham oleh publik, basis perusahaan, tipe industri, dan ukuran dewan komisaris. Model persamaan regresi digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Dalam



Gambar 1  
Kerangka Pikir Penelitian

pengukurannya, variabel independen (yaitu variabel basis perusahaan dan tipe industri) menggunakan variabel *dummy*. Variabel yang dianalisis dengan model regresi dapat berupa variabel kuantitatif dan kualitatif. Variabel kualitatif sering disebut dengan istilah variabel *dummy*, yaitu variabel yang dinyatakan dalam ukuran kategori (data kategorik) dan dinyatakan dalam skala numerik.

Berikut akan dijelaskan mengenai pengukuran variabel dependen dan variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 1) Pengungkapan Sukarela, diukur berdasarkan jumlah *item* pengungkapan yang diungkap dalam laporan tahunan perusahaan sampel. Semakin banyak *item* pengungkapan sukarela yang dimuat dalam laporan tahunan berarti semakin besar indeks luas pengungkapan sukarela perusahaan. Daftar *item* pengungkapan dalam laporan tahunan untuk penelitian ini dikembangkan berdasarkan literatur Meek dkk (1995) yaitu sebanyak 85 *item*. Daftar *item* yang dikembangkan tersebut kemudian digunakan untuk mengukur tingkat keluasan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan sampel; 2) Variabel *Size* Perusahaan, untuk mengukur pengaruhnya terhadap luas pengungkapan sukarela dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki perusahaan sebagai alat pengukurannya; 3) Variabel Proporsi Kepemilikan Saham oleh Publik, yaitu jumlah saham yang dimiliki oleh publik (masyarakat) berdasarkan persentase saham yang dimiliki oleh publik sebagai alat pengukurannya; 4) Variabel Basis Perusahaan, yaitu dibedakan ke dalam dua jenis perusahaan yaitu perusahaan domestik dan perusahaan asing. Pembagian ini ditunjukkan dengan tingkat kepemilikan saham perusahaan. Perusahaan yang komposisi sahamnya sebagian besar dimiliki oleh pihak asing dikategorikan berbasis asing, begitu pula sebaliknya bila komposisi kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki pihak domestik, maka dikategorikan berbasis domestik; 5) Variabel Tipe Industri, yaitu membagi sampel perusahaan menjadi dua kelompok industri, manufaktur dan non manufaktur yang ditunjukkan dengan *dummy* 0 (nol) dan 1 (satu); dan 6) Variabel Ukuran Dewan Komisaris, yaitu wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas yang diukur berdasarkan jumlah anggota dewan komisaris. Semakin banyak jumlah anggota dewan

komisaris dalam suatu perusahaan, maka pengungkapan yang dibuat perusahaan akan semakin luas sehingga variabel ini diharapkan mempunyai pengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan multinasional.

Populasi data dalam penelitian ini terdiri atas seluruh perusahaan multinasional yang listing di BEJ tahun 2005. Menurut Hansen dan Mowen (2005), perusahaan multinasional adalah perusahaan yang menjalankan bisnis di lebih dari satu negara dalam suatu volume dimana kesehatan perusahaan dan pertumbuhannya bergantung pada lebih dari satu negara. Pemilihan laporan tahun 2005 karena merupakan laporan terbaru yang sudah diterbitkan dan dengan informasi terbaru diharapkan dapat diperoleh tingkat reliabilitas yang tinggi. Data yang digunakan berupa data *cross sectional*, karena penelitian ini mencoba menguji pengaruh faktor-faktor dari perusahaan yang berbeda-beda dalam beberapa industri terhadap luas pengungkapan sukarela, sehingga data yang digunakan adalah data perusahaan yang berbeda-beda dalam industri yang berbeda pada satu waktu bukan data *time series*.

Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan pertimbangan perusahaan termasuk perusahaan multinasional yang *listing* di BEJ tahun 2005, yaitu 1) Perusahaan yang mempunyai pabrik, kantor, atau anak cabang di luar negeri dan atau perusahaan luar negeri yang mempunyai anak cabang di Indonesia; 2) Perusahaan menerbitkan laporan tahunan khususnya laporan tahun 2005 yang dipublikasikan secara luas; dan 3) Perusahaan yang *listing* di BEJ tahun 2005 sebanyak 336 perusahaan, termasuk industri jasa keuangan. Berdasarkan jumlah tersebut yang termasuk perusahaan multinasional/memenuhi kriteria pertama sebanyak 61 perusahaan. Kemudian yang mempublikasikan laporan tahunannya sebanyak 59 perusahaan. Perusahaan yang memenuhi kedua kriteria di atas akan dijadikan sampel dalam penelitian ini, yaitu sebanyak 59 perusahaan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Meek dkk. (1995) menunjukkan bahwa informasi yang paling banyak diungkapkan oleh perusahaan multinasional di USA, Inggris, dan Eropa adalah informasi non keuangan yaitu sebesar 46%, kemudian informasi strategis sebesar 33%, dan yang paling sedikit adalah

informasi keuangan hanya sebesar 14%. Hal ini disebabkan perusahaan multinasional pada umumnya adalah perusahaan yang besar dan mempunyai kecenderungan memberikan informasi non keuangan secara sukarela lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan domestik yang berada di lingkup lebih kecil.

Berdasarkan analisis statistika deskriptif diketahui bahwa perusahaan multinasional di Indonesia rata-rata memberikan pengungkapan sukarela informasi strategik dan informasi non keuangan lebih banyak dibandingkan dengan informasi keuangan. Informasi strategik dan non keuangan rata-rata diberikan oleh 27 hingga 28 perusahaan atau sekitar 47% dari sampel dan informasi keuangan diberikan oleh 25 hingga 26 perusahaan (43% dari sampel). Variasi pengungkapan ketiga tipe informasi ini sangat kecil. Hal ini berarti bahwa perusahaan multinasional di Indonesia memberikan pengungkapan sukarela secara seimbang yaitu disamping mengungkapkan informasi keuangan juga mengungkapkan informasi strategik dan informasi non keuangan. Dengan memberikan pengungkapan terhadap ketiga tipe informasi ini diharapkan dapat memberi nilai tambah bagi perusahaan.

**HASIL PENELITIAN**

Hasil uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov (K-S) menunjukkan nilai 0,482 dengan signifikansi 0,974. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas karena tingkat signifikansinya melebihi a 0,05. Hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai d sebesar 1,752. Hasil ini kemudian dibandingkan dengan nilai tabel

dengan menggunakan derajat kepercayaan 5%, jumlah sampel 55 (mendekati sampel penelitian sebanyak 59 sampel) dan jumlah variabel independen 5, maka diperoleh nilai batas bawah ( $d_l$ ) sebesar 1,374 dan nilai batas atas ( $d_u$ ) sebesar 1,768. Nilai d yang diperoleh berada diantara  $d_l$  dan  $d_u$  ( $1,374 < 1,752 < 1,768$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari autokorelasi.

Hasil perhitungan menunjukkan nilai VIF tidak ada yang melebihi angka 10 dan tidak ada variabel independen yang nilai *tolerance* kurang dari 10%. Hal ini berarti bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil besaran korelasi menunjukkan basis perusahaan memiliki korelasi yang cukup kuat dengan variabel kepemilikan publik dengan tingkat korelasi 0,378 atau sekitar 38%. Angka tersebut masih di bawah 90%, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED tidak menunjukkan pola yang jelas, dimana titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tahap pengujian yang kedua adalah pengujian terhadap hipotesis, yaitu menggunakan metode regresi *linear* berganda, koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji signifikansi simultan (uji statistik F), dan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t). Metode regresi ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen (*size* perusahaan, proporsi kepemilikan saham oleh publik, basis perusahaan, tipe industri, dan ukuran dewan komisaris) terhadap variabel dependen (luas pengungkapan sukarela). Tujuan dilakukannya

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Regresi**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,471	,054		8,672	,000
SIZE	1,120E-09	,000	,183	1,423	,160
PUBLIK	-2,902E-05	,001	-,004	-,030	,977
BASIS	,058	,034	,209	1,690	,097
TIPE INDUSTRI	-,117	,032	-,428	-3,696	,001
DEWAN KOMISARIS	,004	,007	,067	,574	,569

a Dependent Variable: LUAS

analisis ini adalah untuk mendapatkan koefisien regresi yang akan menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan diterima atau ditolak. Berdasarkan hasil analisis regresi dengan menggunakan  $\alpha$  sebesar 0,05 dan 0,1, diperoleh suatu konstanta ( $\hat{\alpha}_0$ ) dari persamaan regresi sebesar 0,471, koefisien *size* perusahaan ( $\hat{\alpha}_1$ ) sebesar 0,000000001120, koefisien proporsi kepemilikan saham oleh publik ( $\hat{\alpha}_2$ ) sebesar -0,00002902, koefisien basis perusahaan ( $\hat{\alpha}_3$ ) sebesar 0,058, koefisien tipe industri ( $\hat{\alpha}_4$ ) sebesar -0,117, dan koefisien ukuran dewan komisaris ( $\hat{\alpha}_5$ ) sebesar 0,004.

Konstanta ( $\hat{\alpha}_0$ ) dalam persamaan regresi ini menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen tidak mengalami perubahan, maka rata-rata pengungkapan sukarela perusahaan akan naik sebesar 0,471. Koefisien basis perusahaan ( $\hat{\alpha}_3$ ) sebesar 0,058 menunjukkan bahwa perusahaan berbasis asing akan memberikan pengungkapan lebih banyak 0,058 dibanding perusahaan berbasis domestik. Sedangkan koefisien tipe industri ( $\hat{\alpha}_4$ ) sebesar -0,117 menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur memberikan pengungkapan lebih rendah 0,117 dibandingkan dengan perusahaan non manufaktur lainnya.

Berdasarkan hasil output SPSS dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) dalam penelitian ini sebesar 0,382 atau 38,2%. Namun karena  $R^2$  bias

terhadap penambahan variabel yang dimasukkan dalam model, maka dalam penelitian ini menggunakan nilai *adjusted R<sup>2</sup>* yaitu sebesar 0,323 atau 32,3%. Hal ini berarti 32,3% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya (67,7%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

### PEMBAHASAN

Hasil uji F terhadap persamaan regresi luas pengungkapan sukarela dan faktor-faktor yang mempengaruhinya menunjukkan bahwa model regresi memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, yaitu sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yaitu *size* perusahaan, proporsi kepemilikan saham oleh publik, basis perusahaan, tipe industri, dan ukuran dewan komisaris secara bersama-sama berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan.

Tahap uji hipotesis yang kedua adalah uji t untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Berdasarkan pada *output* statistik dapat diketahui bahwa pada tingkat signifikansi 0,05, hanya variabel tipe industri yang berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela dengan nilai signifikansi

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary (b)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,618(a)	,382	,323	,11229

A Predictors: (Constant), DEWAN KOMISARIS, PUBLIK, TIPE INDUSTRI, BASIS, SIZE  
B Dependent Variable: LUAS

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Statistik F ANOVA (b)**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,412	5	,082	6,543	,000(a)
	Residual	,668	53	,013		
	Total	1,081	58			

A Predictors: (Constant), DEWAN KOMISARIS, PUBLIK, TIPE INDUSTRI, BASIS, SIZE  
B Dependent Variable: LUAS

sebesar 0,001. Sedangkan pada tingkat signifikansi 0,1, diperoleh dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela, yaitu variabel basis perusahaan dan tipe industri dengan nilai signifikansi 0,097 dan 0,001.

Variabel *size* perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela karena mempunyai nilai signifikansi lebih dari 0,05 dan 0,1, yaitu sebesar 0,160 dan nilai t-hitungnya bertanda positif sebesar 1,423. Variabel proporsi kepemilikan saham oleh publik juga ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela karena nilai signifikansinya melebihi 0,05 dan 0,1, yaitu sebesar 0,977 dan mempunyai t-hitung bertanda negatif sebesar -0,030.

Variabel terakhir yang ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela adalah variabel ukuran dewan komisaris. Variabel ini memiliki t-hitung bertanda positif sebesar 0,574 dan nilai signifikansinya sebesar 0,569. Hal ini menunjukkan bahwa teori yang menyatakan bahwa semakin banyak anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan akan semakin luas pula pengungkapan yang diberikan dalam laporan tahunannya, tidak terbukti. Nilai signifikansi 0,569 yang ditemukan dalam penelitian melebihi derajat kepercayaan 0,05 yang berarti bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan.

Berdasarkan sekian banyak *item* pengungkapan ternyata terdapat *item* yang hanya diungkapkan oleh tiga perusahaan saja, yaitu *item* tentang perkiraan laba di masa yang akan datang secara kuantitatif. *Item* yang paling banyak diungkapkan dalam penelitian ini adalah *item* mengenai sejarah singkat perusahaan (53 perusahaan), *item* tentang strategi dan tujuan perusahaan (57 perusahaan), dan *item* tentang hasil penjualan di masa sekarang secara kuantitatif (57 perusahaan).

Berdasarkan analisis per sampel perusahaan dapat diketahui bahwa perusahaan yang memiliki indeks pengungkapan tertinggi adalah PT Bank Central Asia (73%) dan yang paling sedikit indeks pengungkapannya adalah PT Surya Dumai Industri (25%) dan PT. Mayora Indah (25%). Tipe informasi yang paling banyak diungkapkan dalam penelitian ini adalah informasi strategik yang antara lain berisi mengenai karakteristik perusahaan pada umumnya,

strategi perusahaan, kebijakan perusahaan dalam hal penelitian dan pengembangan serta perkiraan pencapaian di masa yang akan datang, yaitu sebanyak 27 hingga 28 perusahaan yang mengungkapkan. Tipe informasi non keuangan juga mendapat perhatian tidak kalah penting oleh perusahaan. Hal ini terbukti ada sekitar 27 hingga 28 perusahaan yang mengungkapkan informasi ini. Informasi non keuangan meliputi informasi tentang direktur, informasi tentang karyawan, pengungkapan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan.

Tipe informasi yang lebih sedikit diungkap dibandingkan dengan kedua tipe yang lain adalah informasi keuangan, yaitu hanya sekitar 25 hingga 26 perusahaan. Informasi ini meliputi informasi segmen, informasi pemeriksaan laporan keuangan, informasi pemakaian mata uang asing dan informasi tentang saham. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perusahaan multinasional di Indonesia telah mempertimbangkan informasi non keuangan yang dibutuhkan oleh para investor dan informasi pemakai laporan keuangan lainnya. Hal ini terbukti di samping mengungkapkan informasi keuangan, perusahaan juga mengungkapkan informasi non keuangan dan strategik karena sangat dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Uji regresi antara variabel *size* perusahaan, proporsi kepemilikan saham oleh publik, basis perusahaan, tipe industri, dan ukuran dewan komisaris terhadap luas pengungkapan sukarela menunjukkan bahwa hanya variabel basis perusahaan dan tipe industri saja yang secara signifikan berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Sedangkan tiga variabel yang lain tidak ditemukan adanya pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Variabel *size* perusahaan secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan, dengan nilai signifikansinya sebesar 0,160 pada  $\alpha = 0,05$  dan 0,1. Berdasarkan hal tersebut maka  $H_1$  yang menyatakan bahwa variabel *size* perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan, ditolak.

Perusahaan yang memiliki total aktiva besar belum tentu memberikan pengungkapan yang lebih luas dibanding perusahaan yang mempunyai total aktiva kecil. Alasan yang mendasari hal ini adalah perusahaan kecil juga mempunyai kepentingan yang sama dengan



perusahaan besar dalam hal persaingan perolehan tambahan dana di pasar modal, sehingga perusahaan kecil akan memberikan pengungkapan informasi minimal menyamai perusahaan besar (pesaingnya) untuk dapat memenangkan persaingan tersebut. Kemungkinan lainnya adalah sampel perusahaan yang diteliti rata-rata memiliki total aktiva kurang dari dua triliun yaitu sebanyak 61%, sehingga kurang dapat membuktikan teori yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki total aktiva besar akan memberikan pengungkapan yang lebih luas. Hasil penelitian ini bertentangan dengan temuan Meek dkk. (1995), yang menyatakan bahwa *size* perusahaan berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan perusahaan.

Variabel proporsi kepemilikan saham oleh publik dalam perhitungannya menunjukkan bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,977 pada  $\alpha = 0,05$  dan 0,1. Hasil ini menunjukkan tidak adanya pengaruh proporsi kepemilikan saham publik terhadap luas pengungkapan sukarela, sehingga  $H_2$  yang diajukan ditolak. Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh publik dalam jumlah besar belum tentu memberikan pengungkapan lebih luas dibanding perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh publik dalam jumlah kecil. Hal ini dimungkinkan karena pemilik saham publik pada umumnya merupakan investor kecil sehingga tidak mempunyai otoritas atas informasi keuangan maupun non keuangan yang diinginkan dan tidak dapat mempengaruhi luas pengungkapan sukarela. Perusahaan sampel yang sahamnya dimiliki dalam jumlah besar hanya sedikit, yaitu 13 perusahaan atau hanya 22% dari sampel yang diteliti. Dengan rendahnya tingkat kepemilikan saham oleh publik dalam suatu perusahaan membuat publik tidak dapat mempengaruhi perusahaan untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya sesuai yang dibutuhkan oleh publik.

Variabel basis perusahaan dalam perhitungannya menunjukkan bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,097 pada  $\alpha = 0,1$ . Hasil ini menunjukkan adanya pengaruh antara variabel basis perusahaan dengan luas pengungkapan sukarela, sehingga  $H_3$  yang menyatakan bahwa basis perusahaan berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan, diterima. Pada tingkat keyakinan  $\alpha = 0,1$  basis perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan. Hal ini

menunjukkan bahwa perusahaan yang berbasis asing memberikan pengungkapan yang lebih luas dibanding perusahaan yang berbasis domestik.

Variabel tipe industri secara statistik signifikan berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela dengan nilai signifikansi 0,001 pada  $\alpha = 0,05$  dan 0,1. Hal ini dapat menjawab  $H_4$  yang menyatakan bahwa tipe industri berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan sehingga hipotesis yang diajukan diterima. Nilai t-hitung yang bertanda negatif yaitu sebesar -3,696 berarti bahwa variabel tipe industri dalam mempengaruhi luas pengungkapan arahnya negatif. Teori yang menyatakan bahwa industri manufaktur akan memberikan informasi yang lebih luas dibanding industri yang lain tidak terbukti dalam penelitian ini (Cooke, 1989 dalam Meek dkk. 1995). Industri manufaktur memberikan pengungkapan lebih rendah dibandingkan dengan industri non manufaktur. Hal ini dapat terjadi karena industri non manufaktur di antaranya bank mempunyai kepentingan untuk memberikan pengungkapan secara luas seperti halnya industri manufaktur untuk dapat menarik perhatian para calon nasabah. Di samping itu, industri non manufaktur juga mempunyai kepentingan yang sama untuk dapat memenangkan persaingan perolehan tambahan investasi dana di pasar modal, seperti halnya industri manufaktur. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Meek dkk. (1995), yang menyatakan bahwa tipe industri berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela.

Variabel independen yang terakhir diteliti adalah ukuran dewan komisaris. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,569 pada  $\alpha = 0,05$  dan 0,1. Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela perusahaan. Hal ini berarti  $H_5$  yang menyatakan bahwa variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela perusahaan, ditolak. Alasan yang mendasari hasil penelitian ini adalah anggota dewan komisaris kebanyakan berasal dari luar perusahaan atau independen, sehingga tidak dapat menekan perusahaan untuk memberikan pengungkapan seluas-luasnya, karena dewan komisaris tidak terjun langsung dalam kegiatan operasi perusahaan sehingga kurang dapat

mengetahui kondisi perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori agensi yang menyatakan bahwa agen (manajemen perusahaan) mempunyai informasi yang lebih luas dibanding prinsipal karena terjun langsung dalam kegiatan operasi perusahaan. Dalam melakukan pengungkapan, pihak manajemen perusahaan akan mempertimbangkan manfaat dan biaya yang dikeluarkan akibat *men-disclosure*, sehingga dewan komisaris hanya dapat memberikan usulan atau saran untuk mengungkapkan suatu *item*. Namun keputusan diungkapkan atau tidaknya suatu *item* tetap berada ditangan manajemen perusahaan yang lebih mengetahui situasi perusahaan.

#### **IMPLIKASI, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan bukti empiris bahwa variabel *size* perusahaan, proporsi kepemilikan saham oleh publik, basis perusahaan, tipe industri, dan ukuran dewan komisaris berpengaruh baik secara parsial maupun secara simultan terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan, khususnya untuk perusahaan multinasional di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) tahun 2005.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu 1) Dasar ukuran pengungkapan sukarela menggunakan indeks pengungkapan yang diperoleh dari interpretasi dalam membaca data laporan tahunan perusahaan, sehingga sangat mungkin dipengaruhi oleh tingkat kejelian dan subjektivitas peneliti pada saat membaca laporan tahunan; 2) *Item* informasi yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara tanpa pembobotan, sehingga masing-masing *item* pengungkapan diberlakukan secara sama; dan 3) Periode penelitian hanya satu tahun (data yang digunakan berupa data *cross sectional*) yaitu hanya tahun 2005, sehingga hasil penelitian tidak dapat dibandingkan dari tahun ke tahun. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas variabel pengungkapan sukarela pada laporan tahunan perusahaan; melakukan pembobotan pada setiap *item* informasi, sehingga memberikan penelitian lebih representatif; dan menggunakan data *time series* untuk memprediksi sifat konsistensi data.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Baiman, Stanley. 1990. "Agency Research in Managerial Accounting: A Second Look", *Accounting Organization and Society*, Vol.15, No.4: 341-371.
- BAPEPAM. Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-38/PM/1996 mengenai pengungkapan informasi dalam laporan tahunan.
- Belkaoui, AR. 1992. *Accounting Theory*, 3rd. Edition, Boston: Harcourt Brace Jovanovich.
- Financial Accounting Standards Board*, 1986, *Accounting Standards-Statements of Financial Accounting Concepts 1-6*, McGraw-Hill Book Company, US of America.
- Gujarati, Dhamodar. 2004. *Basic Econometric*, Prentice-Hall, New York.
- Hansen, Don R dan Maryanne M Mowen. 2005. *Management Accounting*, Prentice Hall.
- Hendriksen, Eldon S. 1992. *Accounting Theory*, 5th. Edition, Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, Inc.
- Meek, Gary K, Robert, Clare B, Gray, Sidney J. 1995. "Factors Influencing Voluntary Annual Report Disclosure By U.S, U.K, and Continental European Multinational Corporations", *Journal of International Business Studies*, Washington: *Third Quarte*, Vol. 26, Iss. 3.

## **PERAN DANA PENGUATAN MODAL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA ANGGOTA KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN LELE DI KECAMATAN MOYUDAN, KABUPATEN SLEMAN**

*Siti Mustholihah*

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Penanaman Modal Kabupaten Sleman  
Jalan Parasamya Nomor 2, Beran, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon +62 274 866501, 865559, Fax +62 274 865559  
*E-mail: shee\_en\_en@yahoo.com*

### **ABSTRACT**

The objectives of this research are to identify the difference between the operating income of lele fish culturist before and after accepting the fund of reinforcement capital and to identify the influences of fund reinforcement capital, owner's equity, wide of fish culture area, labor, and experience in business of fish culturist to the operating income of catfish fish culturist. Data which used in this research is primary data of direct interview and questionnaire of the fish culturist, and secondary data of Agriculture and Forestry Office of Sleman Regency. This research used quantitative method and sample used 35 persons of lele fish culturist in Moyudan District. The samples were selected by purposive sampling and this research used t-paired and double linear regression analysis. The result of t-paired analysis indicated by statistic that operating income of lele fish culturist on accept fund reinforcement of capital is bigger compared to before accepting fund reinforcement of capital. This test yield the value of t statistic is equal to 3.392 with significance level of  $\alpha = 0.002$ . The result of double linear regression analysis showed that by individual factor fund reinforcement of capital, fish culturist's own capital and wide of fish culture area have a significant influence to operating income. The factors of labor and experience in business of fish culturist not significantly influence the operating income. The result of simulant

test of fund reinforcement of capital, fish culturist's own capital, wide of fish culture area, labor and experience of business have a significant effect on operating income in 99% level of confidence.

**Keywords:** fund reinforcement of capital, *lele* fish culturist, operating income, t-paired, double linear regression analysis

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan perikanan Kabupaten Sleman pada dasarnya adalah upaya mewujudkan sumberdaya manusia yang mandiri dan profesional untuk dapat memanfaatkan sumberdaya alam menjadi sumberdaya ekonomi secara optimal. Upaya-upaya yang dilakukan senantiasa diarahkan pada peningkatan pendapatan dan taraf hidup pembudidaya ikan, peningkatan hasil dan mutu produksi, memperluas lapangan kerja dan berusaha, meningkatkan gizi ikani masyarakat, serta meningkatkan mutu lingkungan budidaya dan penangkapan ikan.

Pembangunan perikanan di Kabupaten Sleman dilakukan melalui pembangunan sumberdaya manusia (petugas dan pembudidaya ikan), pengembangan kelembagaan utamanya kelembagaan di tingkat basis (kelompok pembudidaya ikan), pemantapan dan

pengembangan produksi, pengembangan agribisnis dan agroindustri, serta peningkatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Upaya-upaya yang telah dan akan terus dilakukan pada intinya terletak pada komunikasi yang terbuka, apa adanya, bertanggung jawab, dan ikhlas secara terus menerus antara petugas dan masyarakat. Dengan menempatkan diri sebagai motivator, mediator, fasilitator, atau bahkan sebagai “provokator” Bidang Perikanan Kabupaten Sleman selalu siap melayani masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan yang secara langsung sejak perencanaan, pelaksanaan, dan sekaligus melakukan kontrol terhadap program yang dilaksanakan.

Dalam perkembangannya, di Kabupaten Sleman secara alamiah terjadi perwilayahan komoditas perikanan. Sleman bagian barat didominasi komoditas lele (*Clarias*), gurami (*Oreochromis gouramy*), udang galah (*Macrobrachium rosenbergii de Man*), dan bawal (*Collosoma macropomum*). Sleman bagian tengah sebagian lele (*Clarias*), nila (*Tilapia nilotica*), gurami (*Oreochromis gouramy*). dan ikan hias. Sedangkan Sleman bagian timur didominasi nila (*Tilapia nilotica*), gurami (*Oreochromis gouramy*), bawal (*Collosoma macropomum*), dan kegiatan pembenihan.

Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997/1998 memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap menurunnya kegiatan usaha perikanan baik dari segi intensitas maupun jumlah unit yang diusahakan. Harga pakan yang melambung tinggi tidak diimbangi dengan kenaikan harga jual produk perikanan menyebabkan banyak usaha perikanan yang tidak dapat beroperasi secara optimal. Dampak lainnya adalah semakin meningkatnya biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh pembudidaya ikan untuk berproduksi. Meskipun potensi alam tetap mendukung tetapi karena lemahnya permodalan pembudidaya ikan, kondisi ini menyebabkan sebagian besar pembudidaya ikan lele menghentikan usahanya. Sebagai gambaran, sebelum terjadi krisis pedagang pengentas mampu menyalurkan 1 – 2 ton lele per hari, sedangkan pada saat krisis hanya mampu menyalurkan 4 – 5 kuintal lele per hari (Passandaran, 2003). Pada saat itu produksi ikan lele memberikan kontribusi ± 60% dari total produksi ikan konsumsi di Kabupaten Sleman (Bidang Perikanan, 2006).

Keadaan sosial ekonomi pembudidaya ikan

yang di antaranya tercermin dari rata-rata tingkat pendidikan, pengetahuan, dan ketrampilan yang relatif rendah menjadi penghambat utama bagi pembudidaya ikan dalam memanfaatkan peluang pasar, modal, informasi, dan ilmu pengetahuan perikanan. Selain itu, pemilikan lahan yang relatif sempit dan lemahnya permodalan menyebabkan produktifitas tenaga kerja rendah sehingga mengurangi efisiensi dalam berusaha tani dan daya saing menjadi rendah. Di samping itu, fasilitas kredit untuk petani yang memang terbatas ternyata kurang diminati karena adanya prosedur yang berbelit atau tidak sederhana.

Dalam kondisi demikian, dengan memahami tugas dan fungsinya, Bidang Perikanan Kabupaten Sleman ingin berbuat sesuatu yang dapat memberikan/ menawarkan pemecahan sebagian masalah yang dihadapi oleh pembudidaya ikan dengan meluncurkan Program Penguatan Modal. Program yang diluncurkan sejak tahun 1998 ini merupakan penyederhanaan dan penyempurnaan program perguliran modal yang dilaksanakan sebelumnya. Pelaksanaan program ini telah didahului dengan serangkaian tahapan proses, di mana telah tumbuh saling kepercayaan antara bidang perikanan dengan masyarakat.

Tujuan dilaksanakannya Program Penguatan Modal antara lain adalah membantu masyarakat pelaku pembangunan perikanan untuk meningkatkan usahanya di bidang perikanan, pemberdayaan rakyat dan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pemberian fasilitas penguatan modal dengan prosedur yang sangat sederhana, dan efisiensi pemanfaatan anggaran pembangunan yang jumlahnya semakin terbatas. Sasaran utama pelaksanaan program ini adalah pembudidaya ikan yang tergabung dalam wadah kelompok pembudidaya ikan, baik yang berusaha di bidang pembenihan maupun pembesaran ikan. Meskipun demikian, pelaku pembangunan perikanan lainnya seperti pedagang pengentas ikan, pengelola pemancingan maupun pengusaha rumah makan khas ikan juga tidak lepas dari jangkauan program ini.

Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan potensi perikanan, Direktorat Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan telah menetapkan kebijakan pengembangan kawasan untuk komoditas unggulan. Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan RI (2006), pengembangan komoditas unggulan ditetapkan untuk lebih memacu kegiatan

budidaya sepuluh komoditas yang telah ditetapkan sebagai komoditas unggulan. Komoditas yang dimaksud adalah komoditas yang memiliki kriteria antara lain bernilai ekonomis tinggi, teknologi budidaya yang dapat diterapkan telah tersedia, permintaan luar negeri dan lokal tinggi, dan dapat dibudidayakan dan dikembangkan secara masal.

Salah satu komoditas unggulan budidaya yang akan lebih dikembangkan adalah ikan lele. Ikan lele memiliki salah satu komoditas unggulan di bidang perikanan budidaya yang merupakan prospek sangat baik sebagai sumber protein (gizi) masyarakat, peningkatan pendapatan dan menyediakan lapangan kerja, dapat dibudidayakan secara intensif, dan hemat lahan dan air. Di samping itu, ikan lele juga merupakan komoditas yang dapat menunjang ekonomi rumah tangga pembudidaya khususnya di pedesaan. Ikan lele mempunyai serapan pasar yang cukup baik, selain pasar dalam negeri juga terdapat peluang untuk pasar ekspor (Departemen Kelautan dan Perikanan RI, 2006).

Kabupaten Sleman dengan area lahan perikanan seluas 5.298.199 m<sup>2</sup>, pada tahun 2005 produksi ikan konsumsi mencapai 5.275.800 kg. Data pada lampiran 1 menunjukkan bahwa produksi ikan konsumsi tahun 2005 terbesar adalah ikan lele yaitu sebesar 30,48% atau sebanyak 1.608.175 kg. Dari produksi ikan lele tersebut, 35,91%-nya atau sebanyak 577.540 kg merupakan hasil produksi dari Kecamatan Moyudan. Produktivitas usaha budidaya ikan lele dipengaruhi oleh faktor sumberdaya alam, tenaga kerja, modal, dan teknologi sebagai faktor produksi. Menurut Soekartawi et al. (1986), pengelolaan usaha tani pada dasarnya terdiri dari pemilihan antara berbagai alternatif penggunaan sumberdaya yang terbatas yang terdiri dari lahan, tenaga kerja, modal, waktu, dan pengelolaan. Dengan demikian, budidaya ikan lele mempunyai dua dimensi yaitu dimensi teknologi dan dimensi yang menyangkut masalah ekonomi. Dimensi yang berkaitan dengan teknologi adalah teknik produksi yang harus dilakukan sehingga dicapai hasil yang maksimal. Sedangkan dimensi yang erat kaitannya dengan ekonomi adalah bentuk usaha yang dipilih sehingga dapat meningkatkan pendapatan usaha pembudidaya. Keterbatasan modal sangat mempengaruhi usaha yang dilakukan oleh pembudidaya, sehingga pendapatan usaha pembudidaya juga terbatas. Dengan dilaksanakannya program penguatan modal diharapkan

akan membantu pengembangan usaha budidaya yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan usaha pembudidaya.

Berdasarkan latar belakang, penelitian ini ingin mengetahui peran dana penguatan modal dalam meningkatkan pendapatan usaha anggota kelompok pembudidaya ikan lele di Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman. Perumusan masalah dalam penelitian ini secara lebih spesifik adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan usaha anggota kelompok pembudidaya ikan lele sesudah menerima dana penguatan modal dengan pendapatan usaha anggota kelompok pembudidaya ikan lele sebelum menerima dana penguatan modal dan apakah dana penguatan modal dan faktor lain (modal sendiri, luas lahan, tenaga kerja, dan pengalaman usaha) berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan usaha anggota kelompok pembudidaya ikan lele.

Berdasar latar belakang dan perumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan antara pendapatan usaha anggota kelompok pembudidaya ikan lele sesudah menerima dana penguatan modal dengan pendapatan usaha anggota kelompok pembudidaya ikan lele sebelum menerima dana penguatan modal dan untuk mengidentifikasi pengaruh dana penguatan modal dan faktor lain (modal sendiri, luas lahan, tenaga kerja, dan pengalaman usaha) terhadap pendapatan usaha anggota kelompok pembudidaya ikan lele. Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan kajian tentang pelaksanaan program penguatan modal perikanan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan usaha anggota kelompok pembudidaya ikan, sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam perumusan kebijakan dalam rangka peningkatan pendapatan usaha anggota kelompok pembudidaya ikan, dan sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi *stakeholder* dalam menentukan strategi peningkatan pendapatan usaha anggota kelompok pembudidaya ikan.

## MATERI DAN METODE PENELITIAN

Usaha perikanan adalah usaha di bidang perikanan yang kegiatannya berhubungan langsung dengan sumberdaya alamnya (Hannesson dalam Passandaran,



2003). Dalam usaha perikanan dikenal dua tipe, yaitu usaha perikanan di bidang penangkapan ikan (ekstraktif) dan usaha perikanan di bidang budidaya (generatif). Usaha produksi lele dipisahkan menjadi usaha pembenihan dan usaha pembesaran. Pola pengusahaan ini pada prinsipnya sama, tetapi dalam budidaya lele istilah pembenihan/pendederan dan pembesaran ditentukan oleh ukuran lele hasil panennya. Lele (*Clarias*) merupakan salahsatu komoditas perairan yang dibudidayakan di air tawar. Keberadaannya amat populer hampir di seluruh Indonesia. Menurut Hernowo & Suyanto (2000), di Indonesia terdapat beberapa spesies lele, antara lain spesies *Clarias leiacanthus*, *Clarias nieuwhofi*, dan *Clarias teesmanii* terdapat di perairan umum di Sumatera dan Kalimantan, dan hidup secara liar. Sedangkan spesies yang biasa dibudidayakan ialah *Clarias barrachus* yang secara umum disebut lele lokal. Di berbagai daerah, lele diberi nama sesuai bahasa daerah masing-masing: lele (Jawa), ikan kalang (Sumatera Barat), pintet (Kalimantan), dan ikan keling/keli (Sulawesi Selatan/Makasar). Dalam Bahasa Inggris, lele disebut *cat fish* dan nama ini digunakan dalam perdagangan secara internasional.

Sejak tahun 1986 telah diimpor (diintroduksi) jenis lele baru dari Taiwan. Lele ini kemudian dipopulerkan dengan sebutan lele dumbbo dan jenis ini dicatat sebagai *king cat fish* dengan nama ilmiah *Clarias fuscus* (Hernowo & Suyanto, 2000). Lele dumbbo memang mempunyai sifat yang unggul, yaitu dapat tumbuh pesat dan mencapai ukuran besar dalam waktu lebih cepat dibandingkan lele lokal. Karena cepat tumbuh dan badannya gemuk itulah maka dinamai lele jumbo yang kemudian dikenal sebagai lele dumbbo. Hasil telur dari satu ekor induk lele dumbbo lebih banyak dibanding lele lokal. Kandungan telur lele dumbbo dapat mencapai 8.000 – 10.000 butir per induk betina, sedangkan pada lele lokal hanya 1.000 – 4.000 butir per induk betina (Prihartono dkk, 2000).

Habitat atau lingkungan hidup lele adalah air tawar. Menurut Hernowo dan Suyanto (2000), meskipun air yang terbaik untuk memelihara lele ialah air sungai, air dari saluran irigasi, air tanah dari mata air, maupun air sumur, tetapi lele juga relatif tahan terhadap kondisi air yang menurut ukuran kehidupan ikan dinilai kurang baik. Misalnya kolam penampungan air comberan maupun di sawah dengan air yang dangkalnya 5 – 10 cm, asalkan ada tempat-tempat untuk berlindung

seperti kolong dari tumpukan batu-batu atau potongan pipa-pipa pralon. Di samping itu, air untuk memelihara lele tidak boleh mengandung air sabun, deterjen, dan bahan-bahan berbahaya seperti sisa obat semprot serangga, karbol, kreolin, atau limbah pabrik yang mengandung bahan kimia.

Salah satu sifat dari lele dumbbo adalah suka meloncat ke darat terutama pada malam hari. Menurut Prihartono dkk. (2000), munculnya sifat ini karena lele merupakan binatang malam atau disebut nokturnal (binatang yang lebih banyak melakukan aktivitas hidupnya pada malam hari). Sifat ini akan lebih tampak saat lele dumbbo akan mencari makan. Sedangkan pada siang hari lele lebih suka bersembunyi atau berlindung di balik benda-benda atau bebatuan di dasar perairan.

Pakan alami lele adalah binatang-binatang renik yang hidup di lumpur dasar maupun di dalam air, antara lain cacing, jentik-jentik nyamuk, larva serangga, anak siput, kutu air (*zooplankton*). Selain itu lele juga dapat memakan kotoran atau bahan apa saja yang ada di air. Lele juga dapat bersifat buas bahkan kanibal, yaitu memakan sesama ikan yang ukurannya lebih kecil bahkan juga mau memakan anaknya sendiri kalau kekurangan pakan. Oleh karena itu benih lele harus dipelihara terpisah dari lele yang ukurannya lebih besar (Hernowo & Suyanto, 2000). Lele juga mau memakan berbagai bahan makanan berupa limbah pertanian, limbah rumah tangga, maupun limbah industri bahan makanan, seperti nasi, sisa lauk pauk, limbah kotoran binatang ternak yang disembelih, ampas kelapa, maupun ampas tahu. Walaupun lele dapat memakan segala macam makanan, tetapi karena pada dasarnya bersifat karnivora maka pertumbuhannya akan lebih pesat jika diberi pakan yang mengandung protein hewani daripada pakan dari bahan nabati. Sedangkan pakan buatan pabrik dalam bentuk pelet sebenarnya sangat digemari lele tetapi harganya relatif mahal, sehingga penggunaannya harus diperhitungkan agar tidak rugi mengingat harga jual lele relatif murah.

Usaha produksi lele lokal maupun lele dumbbo dipisahkan menjadi usaha pembenihan dan usaha pembesaran. Pola pengusahaan ini pada prinsipnya sama, tetapi dalam budidaya lele istilah pembenihan/pendederan dan pembesaran ditentukan oleh ukuran lele hasil panennya (Hernowo & Suyanto, 2000). Apabila ukuran lele hasil panen adalah ukuran konsumsi maka disebut sebagai tahap pembesaran. Jika ukuran lele hasil



panen adalah benih (akan dibesarkan lagi) maka disebut sebagai pembenihan/pendederan.

Dalam usaha pembenihan dikenal tiga tahap pembenihan yaitu pembenihan tahap I, pembenihan tahap II, dan pembenihan tahap III. Menurut Hernowo & Suyanto (2000), usaha pembenihan tahap I dilakukan mulai dari pemeliharaan calon induk (lele sudah dewasa) kemudian dikawinkan. Telur yang dihasilkan ditetaskan di kolam *ipukan* (kolam pendederan) sampai benih berumur 12 – 15 hari dengan ukuran panjang badan 2 – 3 cm, benih ini sudah dapat dijual. Dalam usaha pembenihan tahap II, benih hasil dari usaha pembenihan tahap I (umur 12 – 15 hari, panjang 2 – 3 cm) dipelihara lagi oleh produsen benih tersebut atau petani lain. Benih tersebut dipelihara dalam kolam pemeliharaan benih selama 21 – 30 hari (3 – 4 minggu) sampai ukuran panjang badannya mencapai 5 – 6 cm. Benih ukuran ini dapat dijual atau dipelihara lebih lanjut. Untuk usaha pembenihan tahap III, benih hasil dari usaha pembenihan tahap II (umur 35 – 45 hari, panjang 5 – 6 cm) dipelihara lagi dalam usaha pembenihan tahap III selama 30 hari. Benih ini dipelihara hingga ukuran panjangnya mencapai 10 – 15 cm dan berat 40 – 50 gram per ekor. Benih besar ini disebut *glondongan*. Selanjutnya benih *glondongan* ini dijual atau dipelihara dalam kolam pembesaran (usaha pembesaran). Usaha pembesaran adalah memelihara benih dari berbagai ukuran hingga menjadi lele ukuran konsumsi. Jangka waktu pembesaran tergantung dari ukuran benih waktu mulai dipelihara dan ukuran/berat ikan konsumsi yang akan dipanen. Apabila pembesaran ikan lele dilakukan dengan benih *glondongan* dan dipelihara selama 45 – 60 hari, maka ikan lele yang dihasilkan rata-rata berukuran (beratnya) 125 – 150 gram per ekor.

Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997/1998 memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap menurunnya kegiatan usaha perikanan baik dari segi intensitas maupun jumlah unit yang diusahakan. Harga pakan yang melambung tinggi tidak diimbangi dengan kenaikan harga jual produk perikanan, sehingga banyak usaha perikanan yang tidak dapat beroperasi secara optimal. Dampak lainnya adalah semakin meningkatnya biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh pembudidaya ikan untuk berproduksi.

Dalam kondisi demikian, dengan memahami tugas dan fungsinya, Bidang Perikanan Kabupaten Sleman ingin berbuat sesuatu yang dapat memberikan/

menawarkan pemecahan sebagian masalah yang dihadapi oleh pembudidaya ikan dengan meluncurkan Program Penguatan Modal. Program yang diluncurkan sejak tahun 1998 ini merupakan penyederhanaan dan penyempurnaan program perguliran modal yang dilaksanakan sebelumnya. Pelaksanaan program ini telah didahului dengan serangkaian tahapan proses, di mana telah tumbuh saling kepercayaan antara bidang perikanan dengan masyarakat.

Program penguatan modal mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 1998/1999 dengan dana senilai Rp.80.000.000,- yang diperuntukkan bagi 4 kelompok pembudidaya ikan. Pada tahun anggaran 1999/2000 program ini disalurkan untuk 14 kelompok pembudidaya ikan dan 12 petani pengelola pemancingan dengan dana senilai Rp.260.000.000,-. Kemudian pada tahun 2000, dana penguatan modal senilai Rp.314.000.000,- dimanfaatkan oleh 14 kelompok pembudidaya ikan, 14 petani pengelola pemancingan, dan pelaksanaan Dem oleh petugas fungsional di 18 lokasi. Dana penguatan modal tahun 2001 senilai Rp.844.000.000,- dimanfaatkan oleh 43 kelompok pembudidaya ikan, 16 petani pengelola pemancingan, dan pelaksanaan 18 unit Dem oleh petugas fungsional. Untuk tahun 2003 dan tahun 2004, dana penguatan modal masing-masing senilai Rp.1.084.000.000,- dimanfaatkan oleh 72 kelompok pembudidaya ikan dan 18 unit Dem oleh petugas fungsional. Pada tahun 2005, dana penguatan modal senilai Rp.1.134.000.000,- dimanfaatkan oleh 96 kelompok pembudidaya ikan dan 18 unit Dem petugas fungsional.

Hakekat program penguatan modal (Bidang Perikanan, 2006: 222), adalah perwujudan *clean government* dan *good governance*, perwujudan pemberdayaan rakyat, pemberdayaan ekonomi rakyat dan ekonomi daerah, dan penyederhanaan dan penyempurnaan konsep perguliran yang sudah ada. Sasaran utama pelaksanaan program ini adalah pembudidaya ikan yang tergabung dalam wadah kelompok pembudidaya ikan, baik yang berusaha di bidang pembenihan maupun pembesaran ikan. Meskipun demikian, pelaku pembangunan perikanan lainnya seperti pedagang pengentas ikan, petani pengelola pemancingan maupun usaha rumah makan khas ikan juga tidak lepas dari jangkauan program ini. Hal ini dilakukan karena ketiga jenis usaha tersebut merupakan pasar utama penyerapan hasil produksi

pembudidaya ikan.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa salah satu masalah yang dihadapi pembudidaya ikan terkait dengan pemasaran produknya di ketiga tempat tersebut adalah pembudidaya ikan sering terhambat untuk memulai proses produksi berikutnya, mengingat keterbatasan modal usaha yang dimiliki. Oleh karena itu, penguatan modal juga diberikan kepada pedagang pengentas ikan, pemancingan, dan rumah makan khas ikan, dengan harapan setiap pembelian hasil produksi pembudidaya ikan akan dilakukan secara konstan (Bidang Perikanan, 2006). Tujuan dilaksanakannya program penguatan modal antara lain membantu masyarakat pelaku pembangunan perikanan untuk meningkatkan usaha di bidang perikanan, pemberdayaan rakyat dan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pemberian fasilitas penguatan modal dengan prosedur yang sangat sederhana, dan efisiensi pemanfaatan anggaran pembangunan pemerintah yang jumlahnya semakin terbatas.

Kegiatan perikanan yang potensial untuk dikembangkan tetapi mengalami kesulitan permodalan dapat diaktifkan kembali dengan program penguatan modal ini. Di samping itu, dilakukan juga komunikasi yang intensif baik intern kelompok, antarkelompok dengan petugas lapangan dan dengan Bidang Perikanan sehingga dapat diperoleh manfaat, antara lain meningkatnya rasa kepercayaan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat, meningkatnya rasa tanggungjawab masyarakat dalam mengelola dana dengan baik dan profesional, memulihkan kegiatan perikanan yang sempat lesu akibat krisis moneter dan krisis ekonomi, dan tumbuhnya pemberdayaan masyarakat dan ekonomi rakyat karena telah menjadi subyek dari pelaksanaan pembangunan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pemberdayaan daerah dalam melaksanakan otonomi yang luas dan bertanggung jawab.

Program penguatan modal dilaksanakan dengan menerapkan prosedur yang pendek dan tidak berbelit. Pelaku pembangunan perikanan yang melaksanakan penguatan modal bebas menentukan sendiri usaha yang akan dilaksanakannya dan secara langsung melaksanakan kegiatan mulai dari perencanaan hingga pemasaran hasil. Dengan telah tumbuhnya saling kepercayaan, pelaksanaan program ini menggunakan petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis yang

tidak terlalu mengikat sehingga tidak membatasi kreativitas masyarakat dalam menangkap dan memanfaatkan peluang usaha perikanan.

Penyerahan dana penguatan modal kepada pelaku pembangunan perikanan dan penyetoran pengembaliannya dilakukan secara terbuka dengan disaksikan oleh DPRD, Bappeda, Bawasda, BPPKD, Bagian Administrasi Pembangunan, dan bahkan oleh pers. Hal ini merupakan perwujudan nyata dari keterbukaan yang bertanggung jawab sekaligus mengkondisikan agar pelaku pembangunan perikanan yang mendapatkan dana ini bertanggung jawab untuk mengelola dana secara profesional.

Pada bulan ke tujuh setelah penerimaan dana, penerima dana wajib menyetorkan angsuran sebesar 50% dari total dana yang diterima ditambah kontribusi 3%. Kemudian pada bulan ketiga belas penerima dana wajib mengembalikan 50% sisanya ditambah kontribusi 3%, dan disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman. Pelaku pembangunan perikanan, khususnya kelompok pembudidaya ikan yang menjadi prioritas pelaksanaan program ini minimal memenuhi prasyarat, antara lain: kelompok sudah tumbuh dan berkembang dari kebutuhan anggotanya, kelompok pembudidaya ikan yang aktif dan dinamis, serta sudah tumbuh saling kepercayaan yang mantap intern kelompok, antara kelompok dengan petugas lapangan dan Bidang Perikanan, dan antara petugas lapangan dengan Bidang Perikanan.

Menurut Bidang Perikanan (2006), prasyarat tersebut di atas mutlak harus dipenuhi mengingat eksistensi kelompok pembudidaya ikan sangat ditentukan dari kondisi anggotanya yang memang membutuhkan untuk berkelompok. Kelompok yang lemah cenderung tidak dapat memanfaatkan dana dengan baik dan profesional, bahkan dimungkinkan untuk mengambil jalan pintas dengan mendepositokan dana yang diterima. Kondisi seperti ini tidak dikehendaki karena program ini dimaksudkan untuk memberdayakan rakyat lewat usaha perikanan yang memang sudah dilaksanakan oleh masyarakat perikanan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon penerima penguatan modal, antara lain diutamakan pelaku pembangunan perikanan yang tercatat dalam Buku Profil Keluarga Perikanan Kabupaten Sleman, dinamika kelompok berjalan dengan baik yang

ditunjukkan dengan pertemuan kelompok secara rutin baik bulanan maupun selapanan, eksistensi pelaku pembangunan perikanan direkomendasikan oleh petugas lapangan, usaha yang dilaksanakan calon penerima penguatan modal sudah berjalan dengan baik, dan penerima penguatan modal bertanggung jawab atas aktivitas kelancaran usaha akibat penguatan modal dan pengembaliannya.

Penelitian tentang peran dana penguatan modal dalam meningkatkan pendapatan usaha anggota kelompok pembudidaya ikan lele di Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman belum pernah dilakukan. Namun, penelitian sejenis tentang dampak pelaksanaan program sudah banyak dilakukan. Rahman (1996) melakukan penelitian tentang dampak program Inpres Desa Tertinggal (IDT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat studi kasus di Desa Mattisrossi Kecamatan Watang Palu Kabupaten Rappang Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan pendapatan masyarakat sebelum adanya IDT dengan pendapatan masyarakat sesudah adanya IDT. Rahman menyimpulkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan masyarakat dengan rata-rata sebesar Rp.11.006,67 setiap kelompok masyarakat atau terjadi peningkatan pendapatan setiap kepala keluarga anggota kelompok masyarakat sebesar Rp.550,33 (Astuti, 2003).

Penelitian tentang pengaruh Program Pengembangan Wilayah Terpadu terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Trenggalek Jawa Timur dilakukan oleh Irianto (1997). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan masyarakat dan selanjutnya dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan permodalan di masyarakat tersebut. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa terdapat kesenjangan peningkatan pendapatan akibat adanya Program Pengembangan Wilayah Terpadu.

Astuti (2003) meneliti tentang analisis pendapatan usahatani cabai pada Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Cabai Merah di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. Penelitian ini antara lain bertujuan untuk mengetahui dampak Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) terhadap pendapatan petani cabai penerima dana BLM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan petani secara signifikan antara sebelum dan sesudah menerima dana BLM pada derajat kepercayaan 95%.

Ketersediaan dana yang cukup untuk berusahatani cabai menyebabkan petani mampu membeli sarana produksi yang sesuai dengan kebutuhan tanaman terutama pupuk dan pestisida sehingga mampu meningkatkan produktivitas tanaman.

Handayani (2004) melakukan penelitian tentang peran dana kukesra dalam meningkatkan pendapatan usaha anggota kelompok UPPKS di Desa Tawang Sari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dana kukesra, modal sendiri, pengalaman usaha, dan tenaga kerja, baik secara individual maupun secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha anggota kelompok pada derajat kepercayaan 99%.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka disusun hipotesis alternatif sebagai berikut:

- H1:** pendapatan usaha anggota kelompok pembudidaya ikan lele sesudah menerima dana penguatan modal diduga lebih besar daripada pendapatan usaha anggota kelompok pembudidaya ikan lele sebelum menerima dana penguatan modal,
- H2:** dana penguatan modal dan faktor lain (modal sendiri, luas lahan, tenaga kerja, dan pengalaman usaha) diduga berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan usaha anggota kelompok pembudidaya ikan lele.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang menggambarkan mengenai situasi yang terjadi berdasarkan data-data yang ada. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) yaitu Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan penghasil ikan lele konsumsi terbesar di Kabupaten Sleman.

Populasi penelitian ini adalah anggota kelompok pembudidaya ikan lele yang ada di wilayah Kecamatan Moyudan. Berdasarkan populasi tersebut diambil sampel sejumlah 35 anggota kelompok pembudidaya ikan lele penerima dana penguatan modal. Sedangkan teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah sampling acak sederhana (*simple random sampling*). Materi yang diamati dalam penelitian ini adalah dana penguatan modal yang diterima anggota kelompok pembudidaya ikan lele, modal sendiri, penggunaan sarana/faktor produksi, hasil produksi, dan pengalaman usaha. Faktor/sarana produksi yang

diamati antara lain penggunaan benih, pakan, tenaga kerja musiman, obat-obatan, pupuk kandang, dan peralatan perikanan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung, wawancara, dan daftar pertanyaan. Data primer berupa identitas responden, dana penguatan modal, modal sendiri, sarana produksi, pengeluaran (biaya-biaya), penerimaan (hasil produksi), dan data-data mengenai anggota kelompok tani ikan lele yang diperoleh dari anggota kelompok pembudidaya ikan lele. Data sekunder diperoleh dari instansi atau lembaga yang terkait dengan penelitian ini yaitu dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman khususnya Bidang Perikanan. Data yang diambil antara lain data produksi ikan konsumsi, data penguatan modal, prosedur penguatan modal, dan sebagainya.

Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis 1 adalah uji beda dua sampel berpasangan (uji *t-paired*). Menurut Nugroho (2005: 29), uji *t-paired* digunakan untuk menentukan ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel bebas. Dua sampel yang dimaksud di sini adalah sampel yang sama namun menjalani proses pengukuran maupun perlakuan yang berbeda. Uji hipotesis yang menggunakan distribusi *t*, nilainya dapat dilihat dari tabel distribusi *t* dengan *degree of freedom* dan tingkat signifikansi yang digunakan (Algifari, 2003: 67).

Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis 2 dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Untuk mengidentifikasi pengaruh dana penguatan modal, modal sendiri, luas lahan, tenaga kerja, dan pengalaman usaha terhadap pendapatan usaha digunakan persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$\ln Y = \ln a + b_1 \ln X_1 + b_2 \ln X_2 + b_3 \ln X_3 + b_4 \ln X_4 + b_5 \ln X_5 + e$$

keterangan:

- Y = pendapatan usaha (Rp.)
- a = koefisien konstanta
- b<sub>1</sub>.....b<sub>5</sub> = koefisien produksi untuk X<sub>1</sub>.....X<sub>5</sub>
- X<sub>1</sub> = dana penguatan modal (Rp.)
- X<sub>2</sub> = modal sendiri (Rp.)

- X<sub>3</sub> = luas lahan (m<sup>2</sup>)
- X<sub>4</sub> = tenaga kerja (HOK)
- X<sub>5</sub> = pengalaman usaha (Tahun)
- e = error

## HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi data, diperoleh gambaran tentang kondisi demografi dan sosial ekonomi responden anggota kelompok pembudidaya ikan lele penerima dana penguatan modal di Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman sebagaimana tercantum pada Tabel 1 dan Tabel 2 sebagai berikut.

**Tabel 1**  
**Kondisi Demografi Responden Anggota Kelompok Pembudidaya Ikan Lele Penerima Dana Penguatan Modal di Kecamatan Moyudan**

No.	Uraian	Responden	Persentase
1.	Kelompok umur		
	21 – 30 tahun	6	17
	31 – 40 tahun	9	26
	41 – 50 tahun	4	11
	> 50 tahun	16	46
	Jumlah	35	100
2.	Jenis kelamin		
	Laki-laki	33	94
	Perempuan	2	6
	<b>Sumber data primer, diolah.</b>	35	100
3.	Status perkawinan		
	Kawin	32	91
	Tidak kawin	3	9
	Jumlah	35	100

Kondisi sosial ekonomi responden yang meliputi tingkat pendidikan, status kepemilikan lahan, dan pengalaman berusaha, disajikan dalam Tabel 2 sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Kondisi Sosial Ekonomi Responden Anggota**  
**Kelompok Pembudidaya Ikan Lele Penerima Dana**  
**Penguatan Modal di Kecamatan Moyudan**

No.	Uraian	Responden	Persentase
1.	Pendidikan formal		
	Sarjana	4	11
	Sarjana Muda	2	6
	SLTA	12	34
	SLTP	7	20
	SD	8	23
	Tidak tamat SD	2	6
	Jumlah	35	100
2.	Lama usaha		
	< 4 tahun	12	34
	4 – 6 tahun	8	23
	7 – 9 tahun	5	14
	10 tahun ke atas	10	29
	Jumlah	35	100
3.	Status kepemilikan lahan		
	Milik sendiri	20	57
	Sewa dan milik sendiri	3	9
	Sewa	12	34
	Jumlah	35	100

**Sumber:** Data primer, diolah.

Berdasarkan Tabel 2, nampak bahwa responden yang berpendidikan SLTA, Sarjana Muda, dan Sarjana mencapai 51%. Hal ini menunjukkan bahwa pembudidaya ikan lele memiliki latar belakang pendidikan formal yang cukup tinggi. Sedangkan berdasarkan pengalaman berusaha terdapat 66% responden telah berusaha dalam usaha budidaya ikan lele lebih dari 3 tahun. Berdasarkan status kepemilikan lahan, 57% responden memanfaatkan lahan milik sendiri, 9% responden sebagian menyewa lahan dan sebagian memanfaatkan lahan milik sendiri, dan 34% responden menyewa tanah kas desa untuk lahan budidaya.

Usaha pembesaran adalah memelihara benih dari berbagai ukuran hingga menjadi lele ukuran konsumsi. Jangka waktu pembesaran tergantung dari ukuran benih waktu mulai dipelihara dan ukuran/berat ikan konsumsi yang akan dipanen. Pembudidayaan ikan lele di daerah penelitian terdiri atas dua tahapan teknologi budidaya yaitu persiapan kolam dan pembesaran/pemeliharaan ikan lele. Kegiatan dalam persiapan kolam antara lain pengurasan, pemupukan (dengan pupuk kandang), dan pengapuran. Kegiatan pembesaran/pemeliharaan dilakukan untuk

menghasilkan ikan lele ukuran konsumsi sesuai permintaan pasar. Benih yang digunakan untuk pembesaran berupa benih yang dibeli yang berasal dari kegiatan pendederan/pembenihan. Di lokasi penelitian terdapat 20% responden menggunakan benih ukuran 5 – 7 cm, 54% responden menggunakan benih ukuran 6 – 8 cm, dan 26% responden menggunakan benih ukuran 7 – 9 cm. Sebagian besar responden membeli benih dari luar lokasi penelitian karena usaha pembenihan ikan lele relatif sedikit sehingga produksi benih yang ada belum bisa memenuhi kebutuhan benih usaha pembesaran.

Berdasarkan jumlah kolam yang digunakan untuk budidaya ikan lele, sebanyak 77% responden menggarap kurang dari 10 petak/unit kolam dan 23% responden menggarap 10 petak/unit kolam atau lebih. Sumber pembiayaan usaha selain dari dana penguatan modal adalah dari dana pribadi (tabungan) 67% responden, 27% responden pinjam saudara, 3% responden pinjam koperasi, dan 3% responden mengambil pinjaman/kredit dari bank.

Pakan tambahan merupakan makanan yang diberikan untuk menambah kekurangan makanan yang sebenarnya ada di dalam kolam. Jenis pakan tambahan harus banyak mengandung protein hewani yang mudah dicerna dan dapat mempercepat pertumbuhan sehingga produksi yang diharapkan dapat tercapai. Pakan tambahan berupa pellet yang mengandung protein di atas 20% dan banyak jenisnya. Di lokasi penelitian sebanyak 14% responden menggunakan SNA-2, 20% menggunakan SNA-3, 17% menggunakan SW-L, 6% menggunakan kombinasi SNA-2 dan SNA-3, 40% menggunakan kombinasi SNA-2 dan SW-L, dan 3% menggunakan kombinasi SNA-2, SNA-3, dan SW-L. Hasil produksi ikan lele yang dihasilkan di lokasi penelitian rata-rata 70% ikan lele ukuran 6 – 12 ekor per kg, 20% ikan lele ukuran di bawah 6 ekor per kg, dan 10% ikan lele ukuran di atas 12 ekor per kg. Ikan lele dengan ukuran di atas 12 ekor per kg biasanya dimasukkan lagi ke kolam untuk dipelihara hingga mencapai berat ikan konsumsi.

## PEMBAHASAN

Program penguatan modal mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 1998/1999 dengan dana senilai Rp.80.000.000,- yang diperuntukkan bagi 4 kelompok



pembudidaya ikan. Pada tahun anggaran 1999/2000 program ini disalurkan untuk 14 kelompok pembudidaya ikan dan 12 petani pengelola pemancingan dengan dana senilai Rp.260.000.000,-. Kemudian pada tahun 2000, dana penguatan modal senilai Rp.314.000.000,- dimanfaatkan oleh 14 kelompok pembudidaya ikan, 14 petani pengelola pemancingan, dan pelaksanaan Dem oleh petugas fungsional di 18 lokasi. Dana penguatan modal tahun 2001 senilai Rp.844.000.000,- dimanfaatkan oleh 43 kelompok pembudidaya ikan, 16 petani pengelola pemancingan, dan pelaksanaan 18 unit Dem oleh petugas fungsional. Untuk tahun 2003 dan tahun 2004, dana penguatan modal masing-masing senilai Rp.1.084.000.000,-. Dana penguatan modal pada tahun 2003 dimanfaatkan oleh 72 kelompok pembudidaya ikan dan 15 unit Dem oleh petugas fungsional, sedangkan pada tahun 2004 dimanfaatkan oleh 72 kelompok pembudidaya ikan dan 14 unit Dem oleh petugas fungsional. Pada tahun 2005, dana penguatan modal senilai Rp.1.134.000.000,- dimanfaatkan oleh 96 kelompok pembudidaya ikan dan 18 unit Dem petugas fungsional.

Pada tahap awal pelaksanaan penguatan modal ini yaitu tahun 1998 sampai dengan 2000, penerima dana penguatan modal tidak dibebani kontribusi apapun. Namun dengan meningkatnya kemampuan dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan daerah, maka pada tahun keempat (tahun 2001) pengembalian dana dari masyarakat telah dibebani kontribusi untuk pembangunan daerah sebesar 10% dari dana penguatan modal yang diterima. Kemudian mulai tahun 2002 sampai sekarang kontribusi yang diberikan oleh penerima dana penguatan modal adalah sebesar 6% dari dana penguatan modal yang diterima. Tahun 1998 dan tahun 1999 tidak terjadi penunggakan pengembalian dana penguatan modal. Hal ini disebabkan karena pada tahun-tahun tersebut penerima dana penguatan modal tidak dibebani kontribusi. Namun demikian, meskipun tidak dibebani kontribusi,

pada tahun 2000 terdapat tunggakan pokok pengembalian sebesar Rp.3.500.000,- atau 1,15%. Pada tahun 2001 terdapat tunggakan pokok pengembalian sebesar Rp.22.230.000,- (2,63%) dan tunggakan kontribusi sebesar Rp.4.650.000,-. Meski demikian, tunggakan pokok sebesar 2,63% masih di bawah persentase kontribusi yang dibebankan yaitu 10%.

Kemudian pada tahun 2002 terdapat tunggakan pokok pengembalian sebesar Rp.54.180.000,- atau 5,51% dan tunggakan kontribusi sebesar Rp.3.600.000,-. Untuk tahun 2003 terdapat tunggakan pokok pengembalian sebesar Rp.28.000.000,- atau 2,58% dan tunggakan kontribusi Rp.2.400.000,-. Kemudian pada tahun 2004 terdapat tunggakan pokok pengembalian sebesar Rp.16.000.000,- atau 1,48% dan tunggakan kontribusi Rp.1.500.000,-. Dan pada tahun 2005 terdapat tunggakan pokok pengembalian sebesar Rp.63.905.000,- atau 5,64% dan tunggakan kontribusi Rp.4.650.000,-.

Total plafon dana penguatan modal yang telah diterimakan kepada pelaku pembangunan perikanan di Kabupaten Sleman dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2005 adalah Rp.5.784.000.000,-. Dari jumlah tersebut, masih terdapat tunggakan sebanyak 3,36% atau Rp.187.815.000,-. Sisa tunggakan baik pokok pengembalian maupun tunggakan kontribusi masih ada kemungkinan dibayar oleh penerima dana penguatan modal meskipun sudah melewati batas waktu pengembalian.

Uji beda dua sampel berpasangan (*t-paired*) digunakan untuk menguji hipotesis 1. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi apakah pendapatan usaha anggota kelompok pembudidaya ikan lele sesudah menerima dana penguatan modal lebih besar dibandingkan dengan pendapatan usaha anggota kelompok pembudidaya ikan lele sebelum menerima dana penguatan modal. Hasil uji beda dua sampel berpasangan (*paired sample t test*) disajikan pada Tabel 3 berikut:

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Beda Dua Sampel Berpasangan Pendapatan Usaha Anggota Kelompok Pembudidaya Ikan Lele**

Pendapatan Usaha	Mean	Standard Deviation	Standard Error	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>
Sesudah Penguatan Modal	5017530	10364072,178	1751848		
Sebelum Penguatan Modal	2896281	7400848,532	1250972	3,392	1,691

Sumber: Data primer, diolah.



Berdasarkan hasil uji beda dua sampel berpasangan pada Tabel 3, diperoleh nilai rata-rata pendapatan usaha anggota kelompok pembudidaya ikan lele sesudah menerima dana penguatan modal sebesar Rp.5.017.530,- dan sebelum menerima dana penguatan modal sebesar Rp.4.145.805,-. Hasil korelasi menunjukkan nilai sebesar 0,968 pada level signifikansi  $\alpha = 0,00$ , berarti ada korelasi signifikan secara statistik. Rata-rata perbedaan pendapatan usaha anggota kelompok pembudidaya ikan lele sesudah dan sebelum menerima dana penguatan modal adalah Rp.2.121.249,- Hasil penghitungan statistik menghasilkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,392 pada level signifikansi  $\alpha = 0,002$ , lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu sebesar 1,691. Berdasarkan hasil uji beda dua sampel berpasangan tersebut dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima, artinya bahwa pendapatan usaha anggota kelompok pembudidaya ikan lele sesudah menerima dana penguatan modal lebih besar dibandingkan dengan sebelum menerima dana penguatan modal secara statistik.

Pengujian dengan menggunakan analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas yang diketahui. Nilai  $t_{hitung}$  dari masing-masing koefisien regresi variabel bebas

diperoleh dari hasil analisis dengan bantuan *SPSS 11* seperti terlihat dalam Tabel 4 berikut:

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat hasil analisis regresi linear berganda yang secara matematis dapat ditulis dalam persamaan sebagai berikut:

$$\text{Ln } Y = 6,309 + 0,290\text{Ln}X_1 + 0,233\text{Ln}X_2 + 0,385\text{Ln}X_3 + 0,099\text{Ln}X_4 + 0,025\text{Ln}X_5$$

Variabel dana penguatan modal, modal sendiri, dan luas lahan secara individual berpengaruh nyata terhadap pendapatan usaha. Hal ini ditunjukkan dari nilai  $t_{hitung}$   $X_1$  (dana penguatan modal) sebesar 2,124,  $X_2$  (modal sendiri) sebesar 2,107, dan  $X_3$  (luas lahan) sebesar 2,052 pada derajat kepercayaan 95%. Nilai  $t_{hitung}$  dari ketiga variabel tersebut lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu 2,032 pada derajat kepercayaan 95%, artinya dana penguatan modal, modal sendiri, dan luas lahan secara individual berpengaruh terhadap pendapatan usaha anggota kelompok pembudidaya ikan lele.

Variabel tenaga kerja dan pengalaman usaha secara individual tidak berpengaruh nyata terhadap pendapatan usaha. Hal ini ditunjukkan dari nilai  $t_{hitung}$   $X_4$  (tenaga kerja) sebesar 0,492 dan  $X_5$  (pengalaman usaha) sebesar 0,149. Nilai  $t_{hitung}$  dari kedua variabel tersebut lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu 2,032 pada derajat kepercayaan 95%, artinya bahwa tenaga kerja dan

**Tabel 4**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**  
**Pendapatan Usaha Anggota Kelompok Pembudidaya Ikan Lele**

Variabel	Koefisien	$t_{hitung}$	
Konstanta	6,309		
Dana Penguatan Modal ( $X_1$ )	0,290	2,124	**
Modal Sendiri ( $X_2$ )	0,233	2,107	**
Luas Lahan ( $X_3$ )	0,385	2,052	**
Tenaga Kerja ( $X_4$ )	0,099	0,492	
Pengalaman Usaha ( $X_5$ )	0,025	0,149	
R Square	0,879		
Adjusted R <sup>2</sup>	0,858		
F <sub>test</sub>	42,124	***	
Durbin Watson Test	1,927		
Residual	29		

**Sumber:** Data primer, diolah.

Keterangan:

\*\*\* nyata pada derajat kepercayaan 99%

\*\* nyata pada derajat kepercayaan 95%

pengalaman usaha secara individual tidak berpengaruh terhadap pendapatan usaha anggota kelompok pembudidaya ikan lele. Tenaga kerja, dalam hal ini tenaga kerja musiman untuk budidaya ikan lele secara statistik tidak berpengaruh terhadap pendapatan usaha. Hal ini disebabkan tenaga kerja musiman pada umumnya hanya dipekerjakan untuk kegiatan persiapan kolam dan pemanenan, sehingga tenaga kerja yang dimanfaatkan relatif sedikit. Sedangkan untuk pekerjaan sehari-hari dikerjakan sendiri oleh pembudidaya dan anggota keluarganya. Kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh pembudidaya adalah memberi pakan pada ikan setiap pagi dan sore, dan waktu yang diperlukan untuk mengerjakan kegiatan tersebut relatif tidak lama, sehingga tidak perlu menyewa tenaga kerja musiman untuk menghemat biaya produksi.

Pengalaman usaha budidaya ikan lele secara statistik tidak berpengaruh terhadap pendapatan usaha. Hal ini karena pembudidaya sudah menjadi anggota kelompok pembudidaya ikan lele, di mana di dalam kelompok sudah terjalin komunikasi yang mantap baik antar anggota kelompok maupun antara anggota dengan kelompok. Dalam forum komunikasi tersebut bisa terjalin saling bertukar pengalaman dan belajar di antara para anggota kelompok. Di samping itu, lokasi lahan masing-masing anggota kelompok berada dalam satu area sehingga mereka bisa bekerja sama dalam masalah teknis budidaya ikan lele di lokasi lahan. Pembudidaya yang pengalaman usahanya belum lama, pendapatan usahanya belum tentu lebih rendah dari pembudidaya yang pengalaman usahanya sudah lama. Hal ini dapat terjadi karena pembudidaya yang pengalamannya belum lama, bisa belajar tentang teknik budidaya ikan lele sebelum mereka terjun ke usaha budidaya ikan lele, belajar dari pembudidaya yang sudah profesional, atau mendapat pembinaan dari petugas lapangan maupun Bidang Perikanan. Sebaliknya, pembudidaya yang pengalaman usahanya sudah cukup lama belum tentu pendapatannya lebih besar dari pembudidaya yang pengalaman usahanya belum lama. Hal ini bisa disebabkan karena pembudidaya yang memiliki pengalaman usaha sudah lama, tidak mau melakukan perubahan perilaku berbudidaya (karena sudah menjadi kebiasaan) sehingga usaha budidayanya tidak berkembang dan pada akhirnya pendapatan usahanya tidak meningkat.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang peran dana penguatan modal dalam meningkatkan pendapatan usaha anggota kelompok pembudidaya ikan lele di Kecamatan Moyudan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut 1) Berdasarkan hasil uji beda dua sampel berpasangan diperoleh nilai rata-rata perbedaan pendapatan usaha anggota kelompok pembudidaya ikan lele sesudah dan sebelum menerima dana penguatan modal adalah Rp.2.121.249,-. Perhitungan statistik menghasilkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,392 pada level signifikansi  $\alpha = 0,002$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,691 pada  $\alpha = 5\%$ , artinya pendapatan usaha anggota kelompok pembudidaya ikan lele sesudah menerima dana penguatan modal lebih besar dari sebelum menerima dana penguatan modal. Hal ini berarti bahwa dana penguatan modal mempunyai peran dalam peningkatan pendapatan usaha, khususnya anggota kelompok pembudidaya ikan lele di Kecamatan Moyudan; 2) Hasil analisis regresi menunjukkan nilai  $F_{hitung}$  yang cukup besar yaitu 42,124 pada derajat kepercayaan 99% dan nilai koefisien determinasi yang disesuaikan ( $adjusted R^2$ ) sebesar 0,858. Hal ini berarti bahwa secara bersama-sama variabel bebas yang diikutkan dalam model berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Di samping itu, di dalam model yang digunakan tidak terjadi penyimpangan asumsi klasik regresi linear berganda baik asumsi multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, maupun normalitas. 3) Hasil uji individual menunjukkan bahwa dari lima variabel bebas yang diduga berpengaruh terhadap pendapatan usaha, diperoleh tiga variabel yang secara statistik berpengaruh terhadap variabel terikat. Variabel-variabel tersebut adalah dana penguatan modal, modal sendiri, dan luas lahan. Sedangkan variabel tenaga kerja dan pengalaman usaha tidak berpengaruh nyata terhadap pendapatan usaha sampai pada derajat kepercayaan 90%; 4) Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien penguatan modal (0,290) lebih besar dibandingkan nilai koefisien modal sendiri (0,233), hal ini berarti bahwa dana penguatan modal lebih berpengaruh terhadap pendapatan usaha daripada modal sendiri; 5) Total dana penguatan modal perikanan yang telah diterimakan kepada pelaku pembangunan

perikanan di Kabupaten Sleman dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2005 adalah sebesar Rp.5.784.000.000,-. Dari jumlah tersebut, masih terdapat tunggakan pokok pengembalian sebesar 3,36% atau Rp.187.815.000,-. Sisa tunggakan baik pokok pengembalian maupun kontribusi masih ada kemungkinan dibayar oleh penerima dana penguatan modal meskipun sudah melewati batas waktu pengembalian.

### Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan tersebut, maka disampaikan saran-saran sebagai berikut 1) program ini dapat dilanjutkan bahkan ditingkatkan baik unit maupun jumlahnya. 2) Program penguatan modal dengan prosedur yang sederhana merupakan bukti keberpihakan Pemerintah kepada pembudidaya ikan yang memiliki berbagai keterbatasan dalam mengakses modal dari lembaga perbankan, untuk itu disarankan agar pemerintah daerah memberikan proporsi penguatan modal yang memadai agar dapat menjangkau sasaran pembudidaya ikan yang semakin luas; 3) Kelancaran program penguatan modal ini sangat tergantung pada kelancaran pengembalian dari penerima penguatan modal sehingga sesuai dengan prinsip penguatan modal yang didasari atas kepercayaan dan tanggung jawab diperlukan suatu sistem supervisi dan monitoring yang lebih menekankan pada pendekatan silaturahmi dengan menumbuhkan kesadaran untuk bertanggungjawab. 4) Ketentuan untuk memberikan kontribusi pada pengembalian dana penguatan modal merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka ikut menyumbang PAD sehingga pemerintah daerah perlu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pembudidaya ikan, misalnya dengan melengkapi sarana dan prasarana perikanan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Algifari, 2003, *Statistika Induktif untuk Ekonomi dan Bisnis*, UPPAMP YKPN, Yogyakarta.
- Astuti, L., 2005, *Analisis Pendapatan Usahatani Cabai pada Bagian Proyek Pengembangan*

*Agribisnis Cabai Merah di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- Hadisapoetra, S., 1973, *Biaya dan Pendapatan di dalam Usahatani*, Penerbit Departemen Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Handayani, N., 2004, *Peran Dana Kukesra dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Anggota Kelompok UPPKS di Desa Tawang Sari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali*, Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Hernowo dan Suyanto, S.R., 2000, *Pembenihan dan Pembesaran Lele di Pekarangan, Sawah, dan Longyam*, PT Penebar Swadaya, Jakarta.
- Irianto, J., 1996, *Pengaruh Program Pengembangan Wilayah Terpadu terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Trenggalek Jawa Timur*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Jogiyanto, 2004, *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Kuncoro, M., 2003, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro, M., 2004, *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*, UPPAMP YKPN, Yogyakarta.
- Nugroho, B.A., 2005, *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Passandaran, Y.S., 2003, *Pengaruh Penguatan Modal terhadap Peningkatan Produksi dan Pendapatan Kelompok Tani Ikan: Studi Kasus di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas

Perikanan Universitas Brawijaya, Malang.

Prihartono, R.E., Rasidik, J., dan Arie, U., 2000, *Mengatasi Permasalahan Budi Daya Lele Dumbo*, Penebar Swadaya, Jakarta.

Smith, I.R., 1981, *Ekonomi Mikro dari Sistem Produksi Budidaya Perairan yang Ada Sekarang*, dalam Penelitian Ekonomi Budidaya Perairan di Asia, Edisi Pertama, Gramedia, Jakarta

Soekartawi, Soeharjo, A., Dillon, J.L., dan Hardaker, J.B., 1986, *Ilmu Usahatani dan Penelitian untuk Perkembangan Petani Kecil*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Suparmono, 2006, *Analisis Optimasi Faktor Produksi Budidaya Udang Galah di Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Yulianto, A., 2001, *Pengembangan Penguatan Modal Kelompok Tani Perikanan untuk Meningkatkan Kompetensi Aparatur Dinas Pertanian dan Kehutanan dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Prinsip-prinsip Good Governance di Kabupaten Sleman*, Karya Tulis Prestasi Perorangan (KTP2), Lembaga Administrasi Negara RI, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2006, *Profil Keluarga Perikanan Sleman Tahun 2006*, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

<http://www.dkp.go.id/content.php?c=2406>

## **PENERAPAN TOTAL QUALITY SERVICE SEBAGAI UPAYA MENCAPAI LOYALITAS CUSTOMER**

**Siti Ai Fajar**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta  
Jalan Seturan Yogyakarta 55281  
Telepon +62 274 486160, 486321, Fax. +62 274 486155  
E-mail: syech\_said@yahoo.com

### **ABSTRACT**

Globalization has created business environment that cause necessariness reoverview of management system which used by organization to get survive and prosper. Globalization create a big change to the way organization to compete. Although that in essence still same, it means only organization which give the higher value to customers which will survive and grow. So that, organization have to deliver the higher value to customers in order to the organization can give the satisfaction to customers so emerges trust from customers. It is will emerge the highest of level of confidence so result appearence sense of belonging for customers. Finally, will create customers loyalty is the highest form of the customer satisfaction. To get there, the application of Total Quality Service is needed. The Total Quality Service has five dimensions: customer focus, total involvement, measurement, systematic support, and continual improvement.

**Keywords:** customer loyalty, total quality service, value, and the customer satisfaction.

### **PENDAHULUAN**

Abad 21 diawali dengan globalisasi ekonomi yang melanda semua negara di dunia. Dalam sejarah umat manusia belum pernah ada pergantian abad yang

sekaligus merupakan pergantian *millennium*. Globalisasi ekonomi dimungkinkan karena semakin luasnya penerapan teknologi informasi (komputer, telekomunikasi, dan peralatan kantor elektronik) dalam semua arena dan kemajuan yang pesat dalam bidang transportasi. Proses globalisasi akan menuntut setiap perusahaan untuk selalu tanggap terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Globalisasi telah menciptakan lingkungan bisnis yang menyebabkan perlunya peninjauan kembali sistem manajemen yang digunakan oleh perusahaan untuk dapat hidup dan berkembang.

Globalisasi memberikan perubahan yang besar terhadap cara perusahaan untuk berkompetisi. Walaupun demikian, esensinya tetap sama, yaitu hanya perusahaan yang dapat memberikan nilai yang lebih tinggi bagi para *customer* yang akan tetap bertahan dan tumbuh. Dengan demikian, perusahaan harus dapat mengantarkan nilai yang lebih kepada *customer* agar mendapatkan kepercayaan *customer*. Hal ini akan menimbulkan tingkat kepercayaan *customer* yang semakin tinggi dan selanjutnya mengakibatkan munculnya *sense of belonging* bagi *customer*, sehingga akan tercipta loyalitas *customer*. Oleh karena itu, penerapan *Total Quality Service* sangat diperlukan. *Total Quality Service* adalah sistem manajemen strategik dan integratif yang melibatkan semua manajer dan karyawan menggunakan metode-metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperbaiki proses organisasi secara berkesinambungan agar dapat memenuhi dan melebihi kebutuhan, keinginan, dan harapan *customer* (Stamatis, 1996). Zeithalm dan Bitner (1996) berhasil

mengidentifikasi lima dimensi *Total Quality Service*, yang mencakup 1) *Reliability*, yaitu kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan, misalnya memberikan garansi selama tiga tahun setelah terjadi transaksi jual beli; 2) *Responsiveness*, yaitu keinginan staf untuk membantu *customer* dan memberikan layanan terbaik, misalnya sebuah hotel menyediakan makanan dan minuman bagi tamu dalam jangka waktu 6 menit; 3) *Assurance*, mencakup kemampuan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan melalui pengembangan karyawan, misalnya mengizinkan para karyawannya untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kepuasan *customer*; 4) *Empathy*, yaitu berusaha menempatkan diri kita pada diri orang lain, maksudnya berbagi perhatian kepada *customer*, misalnya setiap bertemu dengan *customer* karyawan selalu memberikan senyuman manis dan pandangan keramahan; peduli terhadap *customer* (*car-ing*), misalnya berusaha menjawab pertanyaan *customer* secara cepat; keberanian untuk mengambil keputusan dengan cepat (*daring*), misalnya mengantisipasi kebutuhan tamu dan berusaha memecahkan persoalan yang tengah dihadapinya; dan 5) *Tangibles*, mencakup fasilitas fisik (*equipment, personal, dan communication materials*), misalnya hotel selain menyediakan kamar tidur bagi para tamu juga menyediakan fasilitas lain, seperti restoran terutama yang dibutuhkan oleh kalangan bisnis. Kelima dimensi tersebut saling berinteraksi dan terkait satu sama lain dengan intensitas yang berbeda pada masing-masing individu.

#### MASALAH DAN PEMBAHASAN

Parasuraman (1994) menyebutkan bahwa ada tiga kriteria pokok dalam menilai kualitas jasa, yaitu *outcome-related, process-related, dan image-related criteria*. Ketiga kriteria tersebut masih dapat dijabarkan menjadi enam unsur, yaitu 1) *Professionalism and Skills*. Kriteria ini merupakan *outcome-related criteria*, yaitu *customer* menyadari bahwa penyedia jasa, karyawan, sistem operasional, serta sumberdaya fisik memiliki pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah *customer* secara profesional; 2) *Attitudes dan Behavior*, merupakan *process-related criteria*, yaitu *customer* merasa karyawan menaruh perhatian terhadap mereka

dan berusaha membantu dalam memecahkan masalah mereka secara spontan dan dengan senang hati; 3) *Accessability dan Flexibility*, merupakan *process-related criteria*, yaitu *customer* merasa bahwa penyedia jasa, karyawan, jam kerja, lokasi, dan sistem operasionalnya dirancang dan dioperasikan sedemikian rupa sehingga *customer* dapat melakukan akses dengan mudah. Selain kemudahan akses, perancangan juga dimaksudkan agar dapat bersifat fleksibel dalam menyesuaikan permintaan dan keinginan *customer*; 4) *Reliability dan Trustworthiness*, merupakan *process-related criteria*, yaitu *customer* memahami bahwa apapun yang terjadi, mereka bisa mempercayakan segala sesuatunya kepada penyedia jasa beserta karyawan dan sistemnya; 5) *Recovery*, merupakan *process-related criteria*, yaitu *customer* menyadari bahwa apabila ada kesalahan atau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, maka penyedia jasa akan segera mengambil tindakan untuk mengendalikan situasi dan mencari pemecahan yang tepat; dan 6) *Reputation dan Credibility*, merupakan *image-related criteria*, yaitu *customer* meyakini bahwa operasi dari penyedia jasa dapat dipercaya dan memberikan nilai atau imbalan yang sesuai dengan pengorbanannya.

Stamatis (1996), menegaskan bahwa *Total Quality Service* berfokus pada lima bidang, yaitu 1) *Customer focus*. Manajemen mengidentifikasi kebutuhan, keinginan, dan harapan *customer*. Manajemen perlu merancang sistem yang dapat memberikan jasa tertentu yang memenuhi tuntutan tersebut. Selain itu, organisasi juga wajib menjalin hubungan kemitraan dengan para pemasok kunci atas dasar *win-win situation*; 2) *Total involvement* yang mengandung arti komitmen. Manajemen harus memberikan peluang perbaikan kualitas bagi semua karyawan dan menunjukkan kualitas kepemimpinan yang dapat memberikan inspirasi positif melalui partisipasi aktif dan tindakan nyata bagi organisasi yang dipimpinnya. Manajemen juga harus mendelegasikan tanggungjawab dan wewenang penyempurnaan proses kerja kepada karyawan yang secara aktual melaksanakan pekerjaan. Manajemen juga dituntut untuk memberdayakan para karyawannya. Untuk itu perlu diciptakan iklim yang kondusif dan mendukung tim kerja multidisipliner dan lintas fungsional agar dapat berperan aktif dalam merancang dan memperbaiki barang, jasa, proses, sistem, dan lingkungan perusahaan; 3) *Measurement*.



Dalam hal ini, kebutuhan pokoknya adalah menyusun ukuran-ukuran dasar, baik internal maupun eksternal. Unsur-unsur sistem pengukuran tersebut meliputi a) menyusun ukuran proses dan hasil; b) mengidentifikasi *output* dari proses kerja kritis; c) mengukur kesesuaiannya dengan tuntutan *customer*; dan d) mengoreksi penyimpangan dan meningkatkan kinerja; 4) *Systematic support*. Manajemen bertanggungjawab dalam mengelola proses kualitas dengan cara menghubungkan kualitas dengan sistem manajemen yang ada, seperti perencanaan strategik, manajemen kinerja, pengakuan, penghargaan, komunikasi, dan promosi karyawan; dan 5) *Continual improvement*. Setiap orang bertanggungjawab untuk a) memandang semua pekerjaan sebagai suatu proses; b) mengantisipasi perubahan kebutuhan, keinginan, dan harapan *customer*; c) melakukan perbaikan secara berkelanjutan; d) mengurangi waktu siklus; dan e) senang hati menerima umpan balik tanpa rasa takut atau khawatir.

Untuk melakukan *continual improvement* diperlukan langkah-langkah berikut ini: 1) Mengidentifikasi layanan bernilai tambah yang disediakan untuk *customer*. Hal ini dilihat dari kontribusinya pada kepuasan *customer*; 2) Mengidentifikasi *customer* dan menentukan harapannya seteliti mungkin. Langkah ini berfokus pada mengidentifikasi *customer* yang dijadikan sasaran penawaran jasa layanan. *Customer* memiliki kebutuhan, keinginan, harapan, dan prioritas yang berbeda. Oleh karena itu, perlu upaya yang lebih atau tindakan yang beragam untuk memuaskan *customer*, misalnya sikap responsif yang diperlihatkan kalau ada pertanyaan atau keluhan *customer*, mudah dihubungi, dan menepati janji; 3) Mengidentifikasi kebutuhan kritis organisasi yang memungkinkan untuk memuaskan *customer*; 4) Menentukan aliran proses atau peta proses untuk melaksanakan pekerjaan; 5) Mencermati kekeliruan proses dan mengeliminasi usaha yang sia-sia. Kinerja proses perlu dievaluasi berdasarkan beberapa ukuran, seperti waktu siklus mulai dari pesanan sampai pesanan dipenuhi, masalah penanganan rekening, dan sejumlah masalah *customer* yang tidak terpecahkan pada kesempatan pertama. Dengan demikian, organisasi dapat menentukan sebaiknya menyempurnakan jasa yang sudah ada, menciptakan jasa baru, ataukah menghentikan jasa yang ada saat ini; 6) Menjamin

perbaikan berkesinambungan dengan cara mendukung umpan balik terus menerus. Langkah terakhir ini berfokus pada memantau secara terus menerus setiap perubahan tuntutan *customer*. Untuk itu pengumpulan dan analisis data harus dilakukan secermat dan seakurat mungkin. Di samping itu, organisasi juga dituntut untuk benar-benar berupaya mengukur dan memantau proses yang telah disempurnakan.

*Total Quality Service* sangat diperlukan organisasi antara lain karena adanya perubahan. Globalisasi ekonomi mengakibatkan karakteristik perubahan sangat berbeda dengan sebelumnya. Perubahan telah menjadi persuasif, dalam arti menembus ke semua aspek bisnis dan terjadi secara terus menerus. Perubahan menjadi suatu yang normal terjadi. Sebagai contoh, adanya perubahan pada aspek teknologi, yaitu sebelum manusia mengenal alat-alat pertanian, manusia belum menetap, mereka belum bercocok tanam ataupun beternak. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka hanya memetik dan berburu. Kalau pada suatu ketika, sesuatu yang dipetik dan diburu sudah habis, maka mereka akan berpindah tempat. Manusia seperti ini untuk memenuhi kebutuhan kehausannya, barangkali hanya membutuhkan air kelapa yang dipetik dengan cara memanjat pohon. Kemudian beralih ke era pertanian, ketika ditemukannya alat-alat pertanian, kemudian beralih ke era industri, ketika alat-alat industri mulai digunakan.

Globalisasi menjadikan lingkungan bisnis sangat bergolak, penuh dengan perubahan. Perubahan mau tidak mau harus dihadapi. Meskipun sejak dahulu perubahan senantiasa terjadi, namun perubahan dalam era globalisasi ini sangat berbeda sifatnya dengan era sebelumnya. Menurut Kartajaya (1996), ada tiga alasan mengapa perubahan yang terjadi pada kali ini benar-benar luar biasa. Pertama, perubahan yang terjadi pada saat ini bersifat diskontinu, tidak berada dalam suatu pola tertentu. Kedua, perubahan sekecil apapun yang terjadi akan menyebabkan perbedaan yang besar pada seluruh umat manusia termasuk cara bekerja dan bahkan cara hidup. Ketiga, perubahan yang diskontinu akan memerlukan orang berpikir terbalik. Apa yang dulu benar jadi salah, begitu pula sebaliknya.

Situasi persaingan yang kacau, pesaing sudah datang dari mana-mana, termasuk yang tidak kelihatan. Artinya, pesaing dapat datang dari wilayah manapun. Pada saat itu, sulit mengenali pesaing secara langsung.

Teknologi informasi telah mengubah secara dramatis karakteristik persaingan yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya oleh banyak perusahaan. Teknologi informasi memperluas hal yang mungkin dilaksanakan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, yang akhirnya meningkatkan tuntutan *customer* terhadap perusahaan-perusahaan yang memenuhi kebutuhannya. Perubahan lingkungan bisnis yang tidak dapat diduga sebelumnya, semuanya berjalan penuh kejutan, tidak dapat diprediksi, apalagi dievaluasi *trend*-nya. Hal-hal yang demikian dapat membuat situasi persaingan jadi kacau.

*Customer* yang semakin *informationlised*, *enlightened*, dan *empowered*. Perubahan teknologi informasi yang demikian dahsyat mengakibatkan informasi lebih mudah diolah dan disalurkan kemanapun. Dunia seolah-olah menjadi sangat transparan, sehingga tidak ada lagi yang disembunyikan, yang mengakibatkan *customer* menjadi *informationlised* dan memiliki banyak pilihan. *Customer* tanpa informasi adalah *customer* yang terbelenggu dan tidak punya pilihan. *Customer* seperti ini mau tidak mau hanya dapat menerima produk yang sudah ada saja. *Customer* yang *enlightened* adalah *customer* yang tidak hanya memiliki visi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain supaya ikut percaya pada visinya. *Customer* yang *enlightened* lebih sadar terhadap masalah lingkungan atau paling tidak telah sadar akan kesehatan. *Customer* seperti ini sikapnya berbeda dengan *customer* yang tradisional dalam pengambilan keputusan, karena *value* dalam pandangannya sudah berubah menjadi semakin luas dan maju. Demikian juga *customer* yang *empowered* memiliki kekuatan untuk merealisasikan keputusan yang diambilnya. Oleh karena itu, secara keseluruhan perilakunya jadi berubah. *Customer* yang semakin *informationlised*, *enlightened*, dan *empowered* akan semakin tinggiuntutannya, maka hal terpenting yang diperhatikan organisasi adalah *customer value*.

Sukses tidaknya suatu perusahaan sangat ditentukan oleh *customer*. Seluruh kegiatan perusahaan yang diwujudkan dalam produk bermuara pada ketentuan akhir ditentukan *customer*. Kebutuhan, keinginan, dan harapan *customer* adalah kunci pokok dalam menjalankan bisnis. *Customer* adalah satu-satunya alasan setiap karyawan berada dalam usaha penyediaan barang dan jasa. Karyawan memiliki

kebutuhan dasar untuk menerima umpan balik positif dari siapa saja yang dilayani. Dengan memberikan kesempatan kepada karyawan dalam memiliki obsesi untuk memuaskan *customer*, memungkinkan mereka untuk menyediakan produk bermutu yang bernilai bagi *customer*. Obsesi terhadap *customer* merupakan visi pemersatu yang memberikan panduan bagi usaha karyawan dalam menuju tujuan yang ditetapkan bersama. Apabila *customer* mengetahui dan merasakan bahwa semua organisasi memiliki obsesi untuk memuaskan kebutuhan *customer*, *customer* akan memiliki kebanggaan dan kesetiaan kepada perusahaan.

Unsur yang sekarang merupakan pemuas kebutuhan *customer* bukan lagi diterima *customer* sebagai pemuas kebutuhannya jika semua perusahaan lain telah menyediakannya, unsur tersebut telah berubah menjadi sesuatu yang diharapkan. Oleh karena itu, perusahaan senantiasa harus memantau perubahan kebutuhan *customer* untuk memacu perubahan dalam sistem yang digunakan perusahaan dalam melayani kebutuhan *customer*. Manajemen perusahaan harus membantu karyawan untuk belajar, berkembang, berkontribusi, dan menjadi unggul. Manajemen perusahaan harus berkeyakinan bahwa karyawan yang puas dengan pekerjaannya akan menghasilkan *customer* yang puas, karena karyawan yang bahagia akan lebih memperdulikan kebutuhan *customer*. Manajemen perusahaan harus berkeyakinan bahwa mutu produk yang disediakan oleh perusahaan sangat tergantung oleh karyawan yang diberdayakan, dilatih, dan diakui serta puas dengan pekerjaannya sehingga perusahaan akan menghasilkan *customer value*.

*Customer value concept* menyatakan bahwa *customer* berkaitan dengan *benefit*, *sacrifice*, dan *relationship* (Bounds et al., 1994). *Benefit* menunjukkan besarnya manfaat yang diperoleh *customer* dengan mengkonsumsi suatu produk berdasarkan kesukaan dan harapan mereka, sedangkan *sacrifice* adalah pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mengkonsumsi produk tersebut. Selisih antara *benefit* dan *sacrifice* merupakan salah satu penentu besarnya *customer value*. Unsur lain sebagai penentu adalah *relationship* yang menunjukkan bagaimana perusahaan berhubungan dengan *customer*. Semakin baik hubungan antara perusahaan dengan *customer* semakin tinggi pula *customer value*-nya.

Perubahan lingkungan yang terjadi secara terus

menerus dan dramatis mengakibatkan perusahaan perlu menyesuaikan konsep pemasaran yang diterapkannya. Perubahan yang terjadi mengakibatkan perusahaan mulai mengubah cara pandang atau paradigma terhadap *customer*. Konsep yang dianut mulai digeser menuju paradigma pemasaran yang berfokus pada *customer* (Dharmmesta, 1997) yang mengarah kepada pemenuhan kebutuhan, keinginan, dan harapan *customer* sehingga *customer* merasa puas dan akhirnya loyalitas *customer* tercipta. Loyalitas yang tinggi memungkinkan terjadinya pembelian kembali dan penggunaan produk tersebut dalam jangka panjang.

Fredricks dan James (1995) menyebutkan bahwa untuk meningkatkan loyalitas *customer* perusahaan memerlukan proses terpadu yang akan 1) Menyiapkan informasi akurat tentang *customer value requirement* yang mendorong loyalitas dan pengetahuan tentang bagaimana kemampuan perusahaan memberikan *value* relatif dibandingkan dengan pesaing; 2) Membangun *customer value package* yang terdiri dari bauran pemasaran, inovasi, kualitas layanan, dan citra perusahaan; 3) Menghubungkan informasi *customer requirements* ke dalam sistem manajemen dan kultur organisasi; dan 4) Konsep *customer value* merupakan konsep penting yang memfokuskan keputusan-keputusan strategik dengan *continuous improvement*. Keputusan strategik merupakan keputusan manajemen puncak yang melibatkan seluruh unsur organisasi dalam jangka panjang untuk menghasilkan *customer value*. Dengan demikian, kualitas produk harus diperhatikan.

Dalam kehidupan sehari-hari seringkali mendengar orang membicarakan kualitas, misalnya mengenai kualitas sebagian besar produk buatan luar negeri yang lebih baik daripada produk dalam negeri. Kualitas memiliki banyak kriteria yang berubah secara terus menerus. Meskipun demikian kualitas dapat dirinci. Sebagai contoh, seseorang yang makan di restoran akan mudah menyebutkan aspek-aspek apa saja yang dinilai dalam menentukan kualitas restoran tersebut, misalnya layanan, kecepatan menghadirkan makanan, suasana, dan harga. Kualitas ini menggambarkan salah satu aspek dari kualitas, yaitu aspek hasil. Konsep kualitas itu sendiri sering dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan suatu produk yang terdiri atas kualitas desain atau kualitas kesesuaian. Kualitas desain merupakan fungsi spesifik produk,

sedangkan kualitas kesesuaian adalah suatu ukuran seberapa jauh suatu produk memenuhi persyaratan atau spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan.

Kualitas sering didefinisikan sebagai kecocokan penggunaan, kesesuaian pada kebutuhan, bebas dari penyimpangan, dan sebagainya. Menurut *American Society for Quality Control* (Kotler, 1997), kualitas didefinisikan sebagai keseluruhan ciri serta sifat barang dan jasa yang berpengaruh pada kemampuannya memenuhi kebutuhan yang dinyatakan maupun yang tersirat. Pernyataan tersebut jelas merupakan definisi kualitas yang berpusat pada *customer*. *Customer* memiliki kebutuhan dan harapan tertentu. Perusahaan dikatakan telah mengantarkan kualitas apabila produk dan layanan memenuhi atau melebihi harapan *customer*. Perusahaan yang dapat memuaskan sebagian besar kebutuhan *customer* hampir sepanjang waktu adalah perusahaan yang berkualitas. Sering terdengar bahwa ada hubungan antara kualitas produk dengan kepuasan *customer* serta keuntungan perusahaan. Kualitas yang lebih tinggi menghasilkan kepuasan *customer* yang lebih tinggi pula.

Lovelock (1994) mengidentifikasi ada lima alternatif perspektif kualitas yang biasa digunakan. Adapun kelima alternatif tersebut adalah 1) *Transcendental Approach*. Kualitas dalam pendekatan ini dapat dirasakan atau diketahui, tetapi sulit didefinisikan atau dioperasionalkan. Sudut pandang biasanya diterapkan dalam seni musik, seni drama, seni tari, dan seni rupa. Di samping itu, ada juga pernyataan-pernyataan seperti, tempat berbelanja yang menyenangkan (misal *supermarket*); produknya elegan (misal mobil); kelembutan dan kehalusan kulit (misal sabun mandi); dan lain-lain; 2) *Product-based Approach*. Pendekatan ini menganggap kualitas sebagai karakteristik atau atribut yang dapat dikuantifikasikan dan dapat diukur. Perbedaan dalam kualitas mencerminkan perbedaan dalam jumlah beberapa unsur atau atribut yang dimiliki produk. Karena pandangan ini sangat obyektif, maka tidak dapat menjelaskan perbedaan dalam selera, kebutuhan, dan preferensi individual; 3) *User-based Approach*. Pendekatan didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada orang yang memandangnya dan produk yang paling memuaskan preferensi seseorang. Perspektif yang subyektif dan berorientasi pada permintaan ini juga menyatakan bahwa *customer* yang berbeda memiliki kebutuhan dan

keinginan yang berbeda pula, sehingga kualitas bagi seseorang adalah sama dengan kepuasan maksimum yang dirasakan; 4) *Manufacturing-based Approach*. Perspektif ini bersifat *supply-based* dan terutama memperhatikan praktik-praktik perekayasa dan pemanufakturan, serta mendefinisikan kualitas yang sama dengan persyaratannya. Pendekatan ini berfokus pada penyesuaian spesifikasi yang dikembangkan secara internal, yang seringkali didorong oleh tujuan peningkatan produktivitas dan penekanan biaya. Jadi yang menentukan kualitas adalah standar yang ditetapkan perusahaan, bukan *customer* yang menentukan; dan 5) *Value-based Approach*. Pendekatan ini memandang kualitas dari segi nilai dan harga, dengan mempertimbangkan *trade-off* antara kinerja dan harga. Kualitas dalam perspektif ini bersifat relatif sehingga produk yang memiliki kualitas paling tinggi belum tentu produk yang paling bernilai. Namun yang paling bernilai adalah produk yang paling tepat dibeli.

Organisasi perlu meraih *customer* yang loyal akan produknya agar dapat hidup dalam jangka waktu yang panjang. Untuk itu perlu adanya penerapan *Total Quality Service*. Stamatis (1996) telah menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menerapkan *Total Quality Service*. Adapun langkah-langkah yang dimaksud adalah 1) menyemangati organisasi dengan kesadaran akan kualitas; 2) mengubah kultur organisasi; 3) menentukan jangkauan komitmen terhadap organisasi sebagai suatu keseluruhan; 4) mengidentifikasi proses kunci dan variabel-variabel produk; 5) menerapkan *statistical process control*; dan 6) menyertakan kegaitan-kegiatan perbaikan proses ke dalam organisasi. Langkah-langkah tersebut akan menjadi efektif apabila organisasi memiliki kemauan untuk melibatkan sumberdaya manusia dalam tim-tim proyek yang berkinerja tinggi yang dapat membentuk level keunggulan jauh melebihi konsep sinergi. Artinya 1) tim dapat menghasilkan produk yang bernilai dan berkualitas tinggi; 2) tim secara konsisten menentukan standar eksternal dan internal yang baik; 3) tim menggunakan sumberdaya yang lebih sedikit daripada yang diharapkan; 4) tim menghasilkan rasa antusiasme di antara anggota dan sekaligus bagi siapa saja yang berhubungan dengan mereka; dan 5) tim dapat membagi ide dan inspirasi kepada orang-orang lain. Untuk meraih kinerja seperti itu, perusahaan

harus melakukan perubahan misalnya dengan melakukan pemberdayaan terhadap karyawan.

Penerapan *Total Quality Service* apabila dilakukan dengan baik akan memberikan manfaat (Stamatis, 1996). Manfaat utama yang diperoleh adalah 1) meningkatnya indeks kepuasan kualitas; 2) meningkatnya produktivitas dan efisiensi; 3) meningkatnya profit; 4) meningkatnya pangsa pasar; 5) meningkatnya moral karyawan; dan 6) meningkatnya kepuasan *customer* yang akhirnya menciptakan loyalitas *customer*.

## SIMPULAN

Konosuke Matsushita (1993) seperti yang dikutip dalam Keraf (1998) menyebutkan bahwa hal yang terpenting dalam bisnis adalah kontribusi dalam penciptaan nilai pada masyarakat luas. Keuntungan perusahaan akan datang dengan sendirinya apabila perusahaan memiliki komitmen dalam kontribusi kegiatan tersebut. Pendapat bijak tersebut mungkin ada benarnya apabila perusahaan memiliki pola pikir jangka panjang, karena pada dasarnya bisnis adalah sangat sederhana: menciptakan dan memelihara *customer* dengan berupaya menciptakan *value* kepada *customer* dan melakukan terobosan inovasi sesederhana atau sekecil apapun yang benar-benar memiliki arti bagi *customer*. Salah satu terobosan inovasi yang perlu dilakukan adalah dengan cara menerapkan *Total Quality Service*. Dalam menerapkan *Total Quality Service*, agar penerapannya efektif maka salah satu hal yang perlu dilakukan adalah membentuk tim proyek yang berkinerja tinggi yang dapat menghasilkan keunggulan jauh melebihi konsep sinergi. Untuk mendapatkan hasil tersebut, maka perusahaan harus mau melakukan perubahan. Salah satu perubahan yang harus dilakukan adalah di bidang pemberdayaan karyawan. Perusahaan yang ingin menjadi terbaik sebaiknya menerapkan *Total Quality Service*.

## DAFTAR PUSTAKA

Bounds, G., Lyle Y., Mel A., & Gipsie R. (1994). *Beyond Total Quality Management: Toward the Emerging Paradigm*. Tokyo: McGraw Hill.

Dharmmesta, B.S. (1997). Pergeseran Paradigma dalam Pemasaran: Tinjauan Manajerial dan Perilaku Konsumen. *Kelola*, No. 15/VI: 12-14.

Fredericks, J.O. & James M.S. (1995). Beyond Customer Satisfaction. *Management Review*, May: 29-32.

Goetsch, D.L. & Davis (1994). *Introduction to Total Quality: Quality, Productivity, Competitiveness*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall International, Inc.

Kartajaya, H. (1996). *Marketing Plus 2000: Siasat Memenangkan Persaingan Global*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Keraf, S. (1998). *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Kotler, Philips. (1997). *Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.

Lovelock, C. (1994). *Product Plus: How Product + Service = Competitive Advantage*. New York: Mc Graw Hill, Inc.

Parasuraman, A. (1994). Reassessment of Expectations as A Comparison Standard in Measuring Service Quality: Implication for Further Research. *Journal of Marketing*, Vol.58 (January): 111-124.

Ross, J.E. (1994). *Total Quality Mngement: Text, Cases, and Readings*, 2<sup>nd</sup> ed. London: Kogan Page Limited.

Stamatis, D.H. (1996). *Total Quality Service: Principles & Implementation*. Singapura: SSMB Publishing Division.

Zeithalm, V.A. & Bitner (1996). *Services Marketing*. New York: The Mc Graw Hill Companies, Inc.

## **INDEKS PENULIS DAN ARTIKEL JURNAL AKUNTANSI & MANAJEMEN**

### **Vol. 16, No. 1, April 2005**

Lo, Eko Widodo, pp. 1-10, Penjelasan Teori Prospek Terhadap Manajemen Laba

Tjahyono, Heru Kurnianto, pp. 11-24, Peran Kepemimpinan Sebagai Variabel Pemoderasian Hubungan Budaya Organisasional dengan Keefektifan Organisasional (Studi pada Perguruan Tinggi Swasta di Propinsi DIY)

Astuti, Sri dan M. Hanad Hainafi, pp. 250-34, Pengaruh Laporan Auditor Dengan Modifikasi *Going Concern* Terhadap *Abnormal Accrual*

Siregar, Baldric dan Twenty Selvia Sari Sianturi, pp. 35-49, ; Reaksi Pasar Modal Terhadap Hasil Pemilihan Umum dan Pergantian Pemerintahan Tahun 2004

Prajogo, Wisnu, pp. 51-65, Pengaruh Pemediasian *Trust* Dalam Hubungan Kepemimpinan Transformasional dan *Organizational Citizenship Behavior*

Widiastuti, Sri Wahyuni dan Sri Suryaningrum, pp. 67-77, Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA)

### **Vol. 16, No. 2, Agustus 2005**

Heriningsih, Suchayo, Sri Suryaningrum, Windyastuti, pp. 79-91, *Pengaruh Kecerdasan Emosional pada Pemahaman Pengetahuan Akuntansi di Tingkat Pengantar dengan Penalaran dan Pendekatan Sistem*

Susanto, Djoko dan Baldric Siregar, pp. 93-105, *Peran Saling Melengkapi Laba dan Arus Kas Operasi dalam Menjelaskan Variasi Return Saham*

Rahdi, Fahmy, pp. 107-119, *Industry Policy and Technology Transfer: Review and Analysis of The Indonesian Automotive Industry During New Orde Era*

Yudiarti, Fr. Ninik dan Eko Widodo Lo, pp. 121-127, *Pengaruh Framing; Pertanggungjawaban, dan Jenis Kelamin dalam Keputusan Investasi Tambahan: Keputusan Individual dan Grup*



Vol. 20, No. 2, Agustus 2009

ISSN: 0853-1269

**JURNAL**  
AKUNTANSI & MANAJEMEN

Tahun 1990

Asakdiyah, Salamaton, pp. 129-139, *Analisis Hubungan Antara Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan dalam Pembentukan Intensi Pembelian Konsumen Matahari Group di Daerah Istimewa Yogyakarta*

Saputro, Julianto Agung, pp. 141-152, *Konsep dan Pengukuran Investment Opportunity Set Serta Pengaruhnya pada Proses Kontrak*

**Vol. 16, No. 3, Desember 2005**

Ciptono, Wakhid Slamet, pp. 153-171, *The Critical Success Factors Of Tqm Underlying The Deming Management Method: Evidence From The Indonesia's Oil and Gas Industry*

Lo, Eko Widodo, pp. 173-181, *Manajemen Laba: Suatu Sistesa Teori*

Sanjaya, I Putu Sugiarta, pp. 183-193, *Analisis Pengaruh AkruaI Diskresioner Terhadap Return Saham Bagi Perusahaan-Perusahaan yang Diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Big Four dan Non-Big Four*

Sudarini, Sinta dan Silisia Mita Alloy, pp. 195-207, *Penggunaan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Laba Pada Masa yang Akan Datang (Studi Kasus di Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)*

Winarso, Beni Suhendra, pp. 209-218, *Analisis Empiris Perbedaan Kinerja Keuangan Antara Perusahaan yang Melakukan Stock Split dengan Perusahaan yang Tidak Melakukan Stock Split Pengujian The Signaling Hypothesis*

Siregar, Baldric, pp. 219-230, *Hubungan antara Dividen, Leverage Keuangan, dan Investasi*

**Vol. 17, No. 1, April 2006**

Nurim, Yavida, pp. 1-10, *Pengaruh Karakteristik Pembuat Judgment dalam Prediksi Failure Perusahaan*

Kusuma, Deden Iwan, pp. 11-24, *Studi Empiris Pemilihan Metode Akuntansi pada Perusahaan yang Melaksanakan Akuisisi di Indonesia*

Yunani, Akhmad, pp. 25-40, *Perancangan Model Sales Force Automation (SFA) dalam Rangka Menunjang Customer Relationship Management (CRM): Studi Kasus pada PT Pos Indonesia (Persero)*

Suripto, Bambang, pp. 41-56, *Praktik Pelaporan Keuangan dalam Web Site Perusahaan Indonesia*

Vol. 20, No. 2, Agustus 2009

ISSN: 0853-1269

**JURNAL**  
AKUNTANSI & MANAJEMEN

Tahun 1990

Khasanah, Mufidhatul, pp. 57-78, *Kajian Usaha Ternak Kambing dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sleman*

Dongoran, Johnson, pp. 79-92, *Pengaruh Sikap Kerja Terhadap Kinerja pada Hotel Bintang di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta*

**Vol. 17, No. 2, Agustus 2006**

Sri Darma. Gede, pp. 93-117, *Employee Perception of The Impact of Information Technology Investment in Organizations: A Survey of The Hotel Industry*

Hapsoro, Dody, pp. 119-135, *Pengaruh Transparansi Terhadap Konsekuensi Ekonomik: Studi Empiris di Pasar Modal Indonesia*

Indahwati, Weliana dan Erni Ekawati, pp. 137-152, *Relevansi dan Reliabilitas Nilai Informasi Akuntansi Goodwill di Indonesia*

Rahmawati, pp. 153-169, *Hubungan Nonlinier antara Earnings dan Nilai Buku dengan Kinerja Saham*

Siswanti, Yuni, pp. 171-180, *Alliance Experience, Alliance Capability, Function Alliance Dedicated dan Alliance Learning dalam Aliansi Strategik untuk Meraih Kesuksesan Jangka Panjang di Era Kompetisi Global*

Widjaya, NH Setiadi, pp. 181-196, *Pengaruh Komponen Komitmen Organisasi pada Hubungan Persepsi Kaitan Kinerja-Gaji dan Organizational Citizenship Behavior*

**Vol. 17, No. 3, Desember 2006**

Arsyad, Lincolin, pp. 197-218, *A Process of Creating Business Plan for Microfinance Institution: Case Study of LPD Mas, Gianyar, Bali*

Hapsoro, Dody, pp. 219-234, *Pengaruh Struktur Pengelolaan Korporasi Terhadap Transparansi: Studi Empiris di Pasar Modal Indonesia*

Sri Darma, Gede, pp. 235-255, *The Impact of Information Technology Investment on The Hospitality Industry*

Sulistiyani, Tina, pp. 257-267, *Analisis Perilaku Brand Switching Produk Air Minum Mineral di Daerah Istimewa Yogyakarta*

Vol. 20, No. 2, Agustus 2009

ISSN: 0853-1269

**JURNAL**  
AKUNTANSI & MANAJEMEN

Tahun 1990

Siregar, Baldric, pp. 269-282, *Determinan Risiko Ekspropriasi*

Bawono, Icuk Rangga, dkk., pp. 283-294, *Persepsi Mahasiswa S1 Akuntansi Reguler Tentang Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi Negeri di Purwokerto, Jawa Tengah)*

**Vol. 18, No. 1, April 2007**

Kartikasari, Lisa, pp. 1-9, *Pengaruh Variabel Fundamental terhadap Risiko Sistematis pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ*

Norpratiwi, Agustina M.V., pp. 9-22, *Analisis Korelasi Investment Opportunity Set terhadap Return Saham pada Saat Pelaporan Keuangan Perusahaan*

Rahmawati, pp. 23-34, *Model Pendeteksian Manajemen Laba pada Industri Perbankan Publik di Indonesia dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Perbankan*

Dewi, Sherly Friska dan Eko Widodo Lo, pp. 35-42, *Hubungan Sinyal-Sinyal Fundamental dengan Harga Saham*

Khasanah, Mufidhatul, pp. 43-50, *Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Kasus APBD Kabupaten Sleman dan Kulonprogo Tahun 2004 dan 2005*

Suranto, Anto, pp. 51-64, *Hubungan Antara Sikap dan Perilaku Pejabat Public Relations dengan Efeknya dalam Kinerja (Studi Hubungan antara Sikap Terhadap Penerapan Budaya Korporat dan Perilaku Penerapan Budaya Korporat dengan Efeknya dalam Kinerja Pejabat Public Relations Perbankan Swasta Nasional Anggota Perbanas)*

**Vol. 18, No. 2, Agustus 2007**

Hapsoro, Dody, pp. 65-85, *Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Transparansi: Studi Empiris di Pasar Modal Indonesia*

Ningsih, Dwi Astuti dan Wakhid Slamet Ciptono, pp. 87-98, *Going Beyond Corporate Social Responsibility: The Critical Factors of Corporate Social Innovation—An Empirical Study*

Lako, Andreas, pp. 99-113, *Relevansi Nilai Informasi Akuntansi untuk Pasar Saham: Problema dan Peluang Riset*

Tjahjono, Heru Kurnianto, pp. 115-125, *Validasi Item-Item Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural: Aplikasi Structural Equation Modeling dengan Confirmatory Factor Analysis (CFA)*

Vol. 20, No. 2, Agustus 2009

ISSN: 0853-1269

**JURNAL**  
AKUNTANSI & MANAJEMEN

Tahun 1990

Indriyo, St. Mahendra Soni, pp. 127-134, *Reorientasi Kepentingan Korporasi dari Share-holders ke Stakeholders untuk Menjawab Tantangan Globalisasi di Masa Depan*

Rahardja, Conny Tjandra dan N.H. Setiadi Widjaya, pp. 135-148, *Manajemen Stres: Bagaimana Menghidupi Stres untuk Mencapai Keefektifan Organisasi*

**Vol. 18, No. 3, Desember 2007**

Hery dan Merrina Agustiny, pp. 149-161, *Pengaruh Pelaksanaan Etika Profesi Terhadap Pengambilan Keputusan Akuntan Publik (Auditor)*

Suhartini dan Putri Yusiyanti, pp. 163-177, *Pengaruh Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PDAM Tirtamarta Yogyakarta (Pendekatan Teori Ekspektansi Victor Vroom)*

Supriyanto, Y., pp. 179-198, *Kritik Terhadap Kinerja Pendekatan Profitability Index dan Pendekatan Net Present Value untuk Memilih Sejumlah Proyek Independen dalam Capital Rationing*

Khasanah, Mufidhatul, pp. 199-208, *Analisis Ekonomi-Politik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman dan Bantul Tahun 2004 dan 2005*

Sani, Usman dan Istiqomah Istiqomah, pp. 209-221, *Analisis Experiential Marketing Sabun Lux "Beauty Gives You Super Powers"*

Suripto, Bambang, pp. 223-236, *Atribusi Kinerja oleh Manajemen dalam Industri yang Diregulasi: Pengujian Empiris Teori Atribusi dalam Laporan Tahunan Industri Perbankan di Indonesia*

**Vol. 19, No. 1, April 2008**

Afifurrahman, Wahid dan Dody Hapsoro, pp. 1-14, *Pengaruh Pengungkapan Sukarela Melalui Web Site terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta*

Fachrunnisa, Olivia, pp. 15-23, *Perbedaan Gender dalam Penggunaan Gaya Kepemimpinan Transformasional: Suatu Pengujian dari Perspektif Atasan, Bawahan, Rekan Kerja, dan Diri Sendiri*

Prajogo, Wisnu, pp. 25-38, *Pengaruh Kepemimpinan dan Kepribadian pada Modal Sosial serta Dampaknya pada Kinerja*

Djamaluddin, Subekti dan Rahmawati, pp. 39-50, *Kandungan Informasi Komponen-Komponen Laba pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta*

Vol. 20, No. 2, Agustus 2009

ISSN: 0853-1269

**JURNAL**  
AKUNTANSI & MANAJEMEN

Tahun 1990

Fajar, Siti Al, pp. 51-62, Kepemimpinan Transformasional: Keterkaitannya dengan Tipe Kepribadian Berupa *Behavioral Coping* dan *Emotional Coping*

Hery, pp. 63-70, Peran Normatif dan Upaya Peningkatan Citra *Auditor* Internal, serta Keikutsertaannya dalam Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*

**Vol. 19, No. 2, Agustus 2008**

Hadi, Pramono, pp. 71-77, *An Economic Valuation Of Turtle Conservation Efforts In Riau Case On Tambelan Island At 2006-2007*

Noormansyah, Irvan, pp. 79-87, *Studies In Management Accounting Control Systems In Less Developed Countries*

Giri, Efraim Ferdinan, pp. 89-102, Pengaruh Kebijakan Pembayaran Dividen Terhadap Informasi Asimetri di Bursa Efek Indonesia

Nugraha, Albert Kristian Novi Adhi, pp. 103-111, *The External Variables, Perceived Ease of Use and Perceived Usefulness Toward The Use of Sikasa 2.0 Software: A Survey of Employees in Satya Wacana Christian University*

Utomo, Semcesen Budiman dan Baldric Siregar, pp. 113-125, Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Kontrol Kepemilikan terhadap Perataan Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Hardani, Rahmat Purbandono, pp. 127-137, Pengaruh Strategi dan Taktik terhadap Kesuksesan Tahap Operasionalisasi Proyek

**Vol. 19, No. 3, Desember 2008**

Djamaluddin, Subekti, Rahmawati, dan Handayani Tri Wijayanti, pp. 139-153, Analisis Perubahan Aktiva Pajak Tangguhan dan Kewajiban Pajak Tangguhan untuk Mendeteksi Manajemen Laba

Hapsoro, Dody, pp. 155-172, Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan: Studi Empiris di Pasar Modal Indonesia

Wulandari, Cynthia dan Shanti, pp. 173-183, Pengaruh Pengungkapan Sukarela terhadap Asimetri Informasi pada Perusahaan Perbankan yang *Go Public* di PT. Bursa Efek Indonesia

Vol. 20, No. 2, Agustus 2009

ISSN: 0853-1269

**JURNAL**  
AKUNTANSI & MANAJEMEN

Tahun 1990

Kristina, Batsyeba Maria dan Baldric Siregar, pp. 185-196, Pengaruh Manajemen Laba Nyata terhadap Kinerja.

Bawono, Icuk dan Ranga, pp. 197-207, Persepsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pembantu Pemegang Uang Muka Kerja (PPUMK) terhadap Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Langsung (LS): Studi pada Pendidikan Tinggi Negeri Universitas Jenderal Soedirman

Adhilla, Fitroh, pp. 209-228, Analisis Manfaat Sosial dan Fungsional yang Diperoleh Konsumen dari Hubungan yang Terjalin dengan Pramuniaga

**Vol. 20, No. 1, April 2009**

Setyomurni, Retno dan Tony Wijaya, pp. 1-11, Pengaruh *Computer Anxiety* terhadap Keahlian *Novice Accountant* dalam Menggunakan Komputer: Gender dan *Locus Of Control* sebagai Faktor Moderasi

Hapsoro, Dody, pp. 13-24, Pengaruh Transparansi terhadap Nilai Perusahaan: Studi Empiris di Pasar Modal Indonesia

Noormansyah, Irvan, pp. 25-34, *Management Control Systems and The Deregulation In The Higher Education Sector: A Review of Literature*

Suryawati, pp. 35-46, Analisis Struktur, Perilaku, dan Kinerja Industri Tekstil dan Pakaian Jadi di Provinsi DIY

Pramuka, Bambang Agus dan Wiwiek Rabiatal Adawiyah, pp. 47-60, Persepsi Pengguna terhadap Mutu Layanan Perpustakaan (*Libqual*) Perguruan Tinggi di Kabupaten Banyumas

Yuliana, Christina, pp. 61-67, Kajian Pustaka terhadap Teori Agensi dan Akuntansi Manajemen



## **PEDOMAN PENULISAN JURNAL AKUNTANSI & MANAJEMEN**

### Ketentuan Umum

1. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sesuai dengan format yang ditentukan.
2. Penulis mengirim tiga eksemplar naskah dan satu *compact disk* (CD) yang berisikan naskah tersebut kepada redaksi. Satu eksemplar dilengkapi dengan nama dan alamat sedang dua lainnya tanpa nama dan alamat yang akan dikirim kepada mitra bestari. Naskah dapat dikirim juga melalui *e-mail*.
3. Naskah yang dikirim belum pernah diterbitkan di media lain yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh semua penulis bahwa naskah tersebut belum pernah dipublikasikan. Pernyataan tersebut dilampirkan pada naskah.
4. Naskah dan CD dikirim kepada *Editorial Secretary*  
Jurnal Akuntansi & Manajemen (JAM)  
Jalan Seturan Yogyakarta 55281  
Telpon (0274) 486160, 486321 ext. 1332 • Fax. (0274) 486155  
*e-mail*: rudy@stieykpn.ac.id

### Standar Penulisan

1. Naskah diketik menggunakan program *Microsoft Word* pada ukuran kertas A4 berat 80 gram, jarak 2 spasi, jenis huruf Times New Roman berukuran 12 *point*, margin kiri 4 cm, serta margin atas, kanan, dan bawah masing-masing 3 cm.
2. Setiap halaman diberi nomor secara berurutan. Gambar dan tabel dikelompokkan bersama pada lembar terpisah di bagian akhir naskah.
3. Angka dan huruf pada gambar, tabel, atau histogram menggunakan jenis huruf Times New Roman berukuran 10 *point*.
4. Naskah ditulis maksimum sebanyak 15 halaman termasuk gambar dan tabel.

### Urutan Penulisan Naskah

1. Naskah hasil penelitian terdiri atas Judul, Nama Penulis, Alamat Penulis, Abstrak, Pendahuluan, Materi dan Metode, Hasil, Pembahasan, Ucapan Terima Kasih, dan Daftar Pustaka.
2. Naskah kajian pustaka terdiri atas Judul, Nama Penulis, Alamat Penulis, Abstrak, Pendahuluan, Masalah dan Pembahasan, Ucapan Terima Kasih, dan Daftar Pustaka.
3. Judul ditulis singkat, spesifik, dan informatif yang menggambarkan isi naskah maksimal 15 kata. Untuk kajian pustaka, di belakang judul harap ditulis Suatu Kajian Pustaka. Judul ditulis dengan huruf kapital dengan jenis huruf Times New Roman berukuran 14 *point*, jarak satu spasi, dan terletak di tengah-tengah tanpa titik.
4. Nama Penulis ditulis lengkap tanpa gelar akademis disertai alamat institusi penulis yang dilengkapi dengan nomor kode pos, nomor telepon, fax, dan *e-mail*.

5. Abstrak ditulis dalam satu paragraf tidak lebih dari 200 kata menggunakan bahasa Inggris. Abstrak mengandung uraian secara singkat tentang tujuan, materi, metode, hasil utama, dan simpulan yang ditulis dalam satu spasi.
6. Kata Kunci (*Keywords*) ditulis miring, maksimal 5 (lima) kata, satu spasi setelah abstrak.
7. Pendahuluan berisi latar belakang, tujuan, dan pustaka yang mendukung. Dalam mengutip pendapat orang lain dipakai sistem nama penulis dan tahun. Contoh: Badrudin (2006); Subagyo dkk. (2004).
8. Materi dan Metode ditulis lengkap.
9. Hasil menyajikan uraian hasil penelitian sendiri. Deskripsi hasil penelitian disajikan secara jelas.
10. Pembahasan memuat diskusi hasil penelitian sendiri yang dikaitkan dengan tujuan penelitian (pengujian hipotesis). Diskusi diakhiri dengan simpulan dan pemberian saran jika dipandang perlu.
11. Pembahasan (*review/kajian* pustaka) memuat bahasan ringkas mencakup masalah yang dikaji.
12. Ucapan Terima Kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang membantu sehingga penelitian dapat dilangsungkan, misalnya pemberi gagasan dan penyandang dana.
13. Ilustrasi:
  - a. Judul tabel, grafik, histogram, sketsa, dan gambar (foto) diberi nomor urut. Judul singkat tetapi jelas beserta satuan-satuan yang dipakai. Judul ilustrasi ditulis dengan jenis huruf Times New Roman berukuran 10 point, masuk satu tab (5 ketukan) dari pinggir kiri, awal kata menggunakan huruf kapital, dengan jarak 1 spasi
  - b. Keterangan tabel ditulis di sebelah kiri bawah menggunakan huruf Times New Roman berukuran 10 point jarak satu spasi.
  - c. Penulisan angka desimal dalam tabel untuk bahasa Indonesia dipisahkan dengan koma (,) dan untuk bahasa Inggris digunakan titik (.).
  - d. Gambar/Grafik dibuat dalam program Excel.
  - e. Nama Latin, Yunani, atau Daerah dicetak miring sedang istilah asing diberi tanda petik.
  - f. Satuan pengukuran menggunakan Sistem Internasional (SI).
14. Daftar Pustaka
  - a. Hanya memuat referensi yang diacu dalam naskah dan ditulis secara alfabetik berdasarkan huruf awal dari nama penulis pertama. Jika dalam bentuk buku, dicantumkan nama semua penulis, tahun, judul buku, edisi, penerbit, dan tempat. Jika dalam bentuk jurnal, dicantumkan nama penulis, tahun, judul tulisan, nama jurnal, volume, nomor publikasi, dan halaman. Jika mengambil artikel dalam buku, cantumkan nama penulis, tahun, judul tulisan, editor, judul buku, penerbit, dan tempat.
  - b. Diharapkan dirujuk referensi 10 tahun terakhir dengan proporsi pustaka primer (jurnal) minimal 80%.
  - c. Hendaknya diacu cara penulisan keustakaan seperti yang dipakai pada JAM/JEB berikut ini:

**Jurnal**

Yetton, Philip W., Kim D. Johnston, and Jane F. Craig. Summer 1994. "Computer-Aided Architects: A Case Study of IT and Strategic Change." *Sloan Management Review*: 57-67.

### **Buku**

Paliwoda, Stan. 2004. *The Essence of International Marketing*. UK: Prentice-Hall, Ince.

### **Prosiding**

Pujaningsih, R.I., Sutrisno, C.L., dan Sumarsih, S. 2006. Kajian kualitas produk kakao yang diamoniiasi dengan aras urea yang berbeda. Di dalam: *Pengembangan Teknologi Inovatif untuk Mendukung Pembangunan Peternakan Berkelanjutan. Prosiding Seminar Nasional* dalam Rangka HUT ke-40 (Lustrum VIII) Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman; Purwokerto, 11 Pebruari 2006. Fakutas Peternakan UNSOED, Purwokerto. Halaman 54-60.

### **Artikel dalam Buku**

Leitzmann, C., Ploeger, A.M., and Huth, K. 1979. The Influence of Lignin on Lipid Metabolism of The Rat. In: G.E. Inglett & S.I. Falkehag. Eds. *Dietary Fibers Chemistry and Nutrition*. Academic Press. INC., New York.

### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

Assih, P. 2004. Pengaruh Kesempatan Investasi terhadap Hubungan antara Faktor Faktor Motivasional dan Tingkat Manajemen Laba. *Disertasi*. Sekolah Pascasarjana S-3 UGM. Yogyakarta.

### **Internet**

Hargreaves, J. 2005. Manure Gases Can Be Dangerous. Department of Primary Industries and Fisheries, Queensland Government. <http://www.dpi.gld.gov.au/pigs/9760.html>. Diakses 15 September 2005.

### **Dokumen**

[BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. 2006. Sleman Dalam Angka Tahun 2005.

### **Mekanisme Seleksi Naskah**

1. Naskah harus mengikuti format/gaya penulisan yang telah ditetapkan.
2. Naskah yang tidak sesuai dengan format akan dikembalikan ke penulis untuk diperbaiki.
3. Naskah yang sesuai dengan format diteruskan ke *Editorial Board Members* untuk ditelaah diterima atau ditolak.
4. Naskah yang diterima atau naskah yang formatnya sudah diperbaiki selanjutnya dicarikan penelaah (MITRA BESTARI) tentang kelayakan terbit.
5. Naskah yang sudah diperiksa (ditelaah oleh MITRA BESTARI) dikembalikan ke *Editorial Board Members* dengan empat kemungkinan (dapat diterima tanpa revisi, dapat diterima dengan revisi kecil (*minor revision*), dapat diterima dengan revisi *mayor* (perlu *direview* lagi setelah revisi), dan tidak diterima/ditolak).
6. Apabila ditolak, *Editorial Board Members* membuat keputusan diterima atau tidak seandainya terjadi